

HASANUDDIN YUSUF ADAN
HUSNI A. JALIL

MOSI INTEGRAL MOHAMMAD NATSIR;

UPAYA PERPADUAN
UMMAH DAN **BANGSA**
DALAM NKRI



Mosi Integral Mohammad Natsir; Upaya Perpaduan Ummah Dan Bangsa Dalam Nkri

Penulis: **HASANUDDIN YUSUF ADAN & HUSNI A. JALIL**

Editor: **Dr. Muhammad AR, M.Ed**

Layout & Cover: **@musthafanetwork**

ISBN: 978-623-90813-1-7

Diterbitkan Oleh:

'Adnin Foundation Publisher Aceh

A member of 'Adnin Foundation Groups

Jalan T. Nyak Arif No. 159 Lamgugob, Banda Aceh

Telpon: 0651+7557683/085260185571

e-mail: al_adnin@yahoo.co.uk

1441 H/2019 M/1441 A

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Hak Cipta 2019, pada penulis

Ed. 1, Cet. 1, Banda Aceh:

Dibolehkan mengutip sebahagian atau seluruh isi buku ini untuk ilmu pengetahuan dengan cara ikhlas dan ilmiah, termasuk penggunaan mesin foto copy untuk kepentingan Islam dan muslimin, kecuali plagiat, copy-paste dan keperluan bisnis.

Cetakan Pertama, Rabi'ul Awwal 1441 H/November 2019 M/
Mulod 1441 A



'Adnin Foundation Publisher,

A Member of 'Adnin Foundation Groups

Jalan T. Nyak Arif No. 159 Banda Aceh,

Telp. 0651+7557683/085260185571

e-mail: al_adnin@yahoo.co.uk

Pengantar **PENERBIT**

Kami dari pihak penerbit 'Adnin Foundation bersyukur kepada Allah dan berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyempurnaan dan penerbitan buku hasil penelitian dua akademisi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ini. Kajian Mosi Integral Mohammad Natsir ini menjadi sesuatu yang langka bagi generasi millennial hari ini mengingat ianya tidak dimasukkan dalam pelajaran sejarah pendidikan nasional Indonesia secara sempurna. Oleh karena itu hasil penelitian ini menjadi sesuatu yang amat penting dipahami dan diketahui anak bangsa mengingat dari Mosi Integral inilah lahirnya Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) yang dirobah dari Republik Indonesia Serikat (RIS) ciptaan Van Mook (penjajah dari Belanda).

Orang-orang yang mengklaim diri paling NKRI hari ini harus tau diri apakah sudah paham dari mana asal muasal NKRI tersebut? Jangan sampai mereka mengklaim diri paling NKRI sementara lahirnya saja bukan dalam wilayah NKRI, jangan-jangan mereka yang mengatakan dirinya paling NKRI hari ini Mohammad Natsir sebagai pencetus ide NKRI sendiri idak tau. Bagaimana upaya menghancurkan RIS buatan Belanda yang berupaya memecahbelah bangsa dan negara Indonesia waktu itu sesuatu yang paling dahsyat dan membingungkan bangsa, Mohammad Natsir dengan Mosi Integralnya yang disampaikan di parlemen RIS menjadi punca bagi segala NKRI yang ada hari ini.

Sejarah panjang perjuangan menuju NKRI sangat melelahkan para pejuang bangsa dan pendiri negara yang pada waktu itu Indonesia baru saja merdeka dan pihak Belanda terus berupaya menduduki (menjajah) kembali Indonesia dengan invasi pertamanya tahun 1947 yang gagal dan invasi keduanya hujung tahun 1948 yang berhasil. Dengan keberhasilan tersebut penjajah kristiani tersebut memecah belahkan wilayah Indonesia dengan konsep negara serikat, mengadu domba penduduk negara Indonesia dengan politik *divide et imperra*. Inisiatif seorang pejuang muda yang sarat dengan ilmu agama

dan pengalaman politiknya bernama Mohammad Natsir maka RIS hancur berkeping-keping dan NKRI wujud dengan tegak setegak-tegakinya hingga ke hari ini.

Untuk menebus ketertinggalan politik, ummat Islam Indonesia sangat perlu membaca buku ini sebagai percikan sejarah yang terlupakan, yang dilupakan, dan yang sengaja dibiarkan oleh orang-orang yang sarat dengan interes pribadi, kaum, dan golongan. Semoga sajian ini menjadi sesuatu yang dapat membawa para pembaca kearah keorisinilan sejarah bangsa yang tertinggalkan dan yang terlupakan selama ini, khususnya bagi generasi millenial yang buta dengan sejarah bangsa dan hilangnya identitas diri (*loss identity*).



Banda Aceh, Rabi'ul Awwal 1441 H/
November 2019 M/Mulod 1441 A

Sambutan **PENULIS**

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji hanya milik Allah tuhan sekalian alam yang telah menjadikan langit bumi serta isi keduanya, yang telah mengutuskan hamba sebagai rasulNya sebagai sumber ilmu selain kalamNya. Berkat kalamNyalah dan berkat sunnah RasulNyalah sehingga kami telah mampu merampungkan sebuah hasil penelitian yang kini berbentuk buku di tangan para pembaca sekalian. Buku singkat dan sederhana ini merupakan hasil sebuah penelitian yang penulis jalani selama satu tahun dalam tahun 2019.

Penuh harapan penulis buku ini dapat menghadirkan manfa'at dan penambahan ilmu bagi para pembaca sekalian. Tidak ada yang lebih patut dan pantas yang harus penulis ucapkan dalam kesempatan ini selain terimakasih kepada para pembantu, para

pemberi fasilitas baik dalam bentuk fasilitas pustaka, komputer, dana, maupun jasa angkutan dan jasa penelitian. Semua itu merupakan sarana paling penting dalam menyempurnakan penelitian sehingga keluar hasil seperti buku ini. Semoga Allah memberikan balasan setimpal kepada para pemberi bantuan dan semoga semua bantuannya menjadi amal shalih dan sedekah jariyah untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Kepada para pembaca sekalian penulis titipkan pesan; berilah masukan-masukan dan kritikan-kritikan konstruktif untuk keperluan pembetulan setiap kesalahan yang ada dalam buku ini. Dan terakhir sekali penulis bersyukur dengan syukur yang sangat dalam kepada Allah SWT zat yang Maha 'Alim lagi 'Arif yang dengan itu pula Allah telah mengizinkan penulis untuk meneliti, menulis, dan memaparkan buku sederhana ini. Mudah-mudahan ada manfa'atnya dari sajian yang amat sederhana ini kepada para pembaca sekalian.

November 2019 M

Banda Aceh,

Rabi'ul Awwal 1441 H

M u l o d 1441 A

P e n u l i s

Daftar ISI

PENGANTAR PENERBIT - iii

SAMBUTAN PENULIS - vii

DAFTAR ISI - ix

BAB I

PENDAHULUAN

**1.1. LATARBELAKANG DAN SIGNIFIKANSI
PENELITIAN - 1**

1.2. LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA - 17

1.3. METODE PENELITIAN - 22

1.3.1. Jenis Penelitian - 23

1.3.2. Lokasi Penelitian - 24

1.3.3. Teknik Pengumpulan Data - 25

1.3.4. Observasi - 26

1.3.5. *Interview* (wawancara) - 27

1.3.6. Dokumentasi - 27

1.3.7. Instrumen Pengumpulan Data - 28

1.3.8. Langkah-Langkah Analisis Data - 28

BAB II

EKSISTENSI MOSI INTEGRAL MUHAMMAD NATSIR

- 2.1. Biografi Muhammad Natsir - 29
 - 2.1.1. Keluarga - 31
 - 2.1.2. Pendidikan - 33
 - 2.1.3. Pemikiran Politik - 35
 - 2.1.4. Perjuangan Mohammad Natsir - 39
 - 2.1.5. Pengaruh Tokoh Bangsa terhadap Mohammad Natsir - 43
 - 2.1.6. Karya Tulis - 45
 - 2.1.7. Produk Hukum - 49
 - 2.1.8. Penghargaan - 51
 - 2.1.9. Jabatan-jabatan yang pernah diduduki - 53
- 2.2. Sejarah dan Latar Belakang Mosi Integral Mohammad Natsir - 58
- 2.3. Keberadaan, Harapan, Ancaman dan Tantangan Mosi Integral Mohammad Natsir - 68

BAB III

MOSI INTEGRAL MUHAMMAD NATSIR, ANTARA TUJUAN DAN APLIKASINYA

- 3.1. Pengertian Mosi Integral Mohammad Natsir - 79
- 3.2. Penyebab Lahirnya Mosi Integral Mohammad Natsir - 83
- 3.3. Tujuan Mosi Integral Mohammad Natsir - 95
 - 3.3.1. Tujuan Kebangsaan - 95
 - 3.3.2. Tujuan Kenegaraan - 98
 - 3.3.3. Tujuan Keagamaan - 101

- 3.3.4. Aplikasi - 110
- 3.3.5. Berawal dari Kerisauan Kehancuran NKRI - 112
- 3.3.6. Upaya-Upaya Penyelamatan Bangsa dan Negara - 116
- 3.3.7. Strategi Perpaduan Ummat - 126
- 3.4. Faktor-faktor Ummat dan Bangsa Kurang Mengetahui tentang Mosi Integral Mohammad Nasir - 131
- 3.5. Relevansi Mosi Integral Mohammad Nasir dengan Politik Ummat Islam - 136

BAB IV

PENUTUP

- 4.1. KESIMPULAN - 141
- 4.2. SARAN-SARAN - 143
- 4.3. DAFTAR PUSTAKA - 145
- 4.4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP - 151
 - 4.4.1. HASANUDDIN YUSUF ADAN - 151
 - 4.4.2. HUSNI A. DJALIL - 156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Mohammad Natsir bukan hanya seorang pejuang Islam dan pejuang bangsa melainkan ia juga merupakan seorang politikus, negarawan, ulama, duta ummat Islam dan pendidik. Lahir di desa Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat 17 Juli 1908, Mohammad Natsir yang bergelar Datuk Sinaro Panjang menghembuskan nafas terakhirnya di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1993. Mohammad Natsir yang lahir dari pasangan suami isteri Idris Sutan Saripado sebagai ayah dan Khadijah sebagai ibunya menempuh pendidikan agama dari orang tuanya dan pendidikan

umum pada sekolah-sekolah bentukan Belanda seperti; sekolah rendah bernama Hollands Inlandche School selama tujuh tahun di kampung kelahirannya, Solok.¹

Pendidikan selanjutnya ditempuh pada sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) selama empat tahun (1923-1927). Kelanjutan pendidikannya ditempuh di Bandung Jawa barat pada sekolah Algemene Middelbare School (AMS) dalam bidang kesusasteraan klasik barat selama tiga tahun (1927-1930).² Sekolah-sekolah tersebutlah yang membentuknya menjadi seorang ilmuwan, intelektual, politikus dan negarawan yang dibuktikan dengan kiprah hidupnya yang pernah menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia (RI), pernah menjadi Menteri negara, pernah menjadi Ketua Umum Partai Islam Indonesia (PII), pernah menjadi Ketua Umum partai Islam terbesar bernama Majelis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI), dan sejumlah jabatan lainnya.

Perjuangan panjang Mohammad Natsir terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengadakan *road show* ke berbagai negara-negara bagian bentukan penjajah Belanda dalam wilayah NKRI seperti negara bagian Pasundan, negara bagian

1 Gamal Abdul Nasir Zakaria, *Mohammad Natsir Pendidik Ummah*, Bangi: penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003, hlm. 26 dan 28.

2 *Ibid*, hlm. 29.

Sumatera, dan lainnya dalam masa invasi Belanda kedua tahun 1948, menjadi fakta yang tak terbantahkan kalau Mohammad Natsir merupakan penegak NKRI.

Target perjalanan panjang Mohammad Natsir tersebut kemudiannya populer dengan nama “Mosi Integral Mohammad Natsir”. Dalam perjalanan panjangnya Mohammad Natsir mengadakan pertemuan dengan para pimpinan negara-negara bagian tersebut seraya mengajak mereka untuk meninggalkan konsep negara federal bentukan Belanda dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang berdaulat. Ketika Mosi Integral Mohammad Natsir tersebut berjaya, presiden Soekarno pernah berucap: kedepan siapa lagi yang layak menjadi presiden kalau bukan Mohammad Natsir.³

Usaha keras Mohammad Natsir yang meyakinkan para pemimpin negara-negara bagian bentukan Belanda dengan mengadakan kunjungan ke berbagai wilayah di tanah air memperoleh hasil yang menggembirakan ketika semua negara bagian menerima Mosi Integral tersebut. Lalu Mohammad Natsir kembali ke Jakarta untuk meyakinkan parlemen yang pada waktu itu bernama badan konstituante agar menerima Mosi integralnya. Ternyata upaya penyatuan negara Indonesia

³ Wawancara dengan Abdul Wahid Alwy, Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta, 15 Agustus 2018.

yang tadinya telah dijadikan negara-negara bagian oleh Belanda menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Mohammad Natsir berhasil dengan sempurna.⁴ Usaha tersebutlah yang kemudian populer dengan istilah Mosi Integral Mohammad Natsir yang kini tidak bergaung lagi bagi anak bangsa Indonesia. Padahal ini merupakan suatu kerja besar seorang tokoh bangsa, seorang negarawan, dan seorang pejabat negara pada waktu itu.

Fakta-fakta tersebut menjadi kenyataan ketika dikaji kembali untuk membuktikan apa yang seharusnya telah terjadi dalam konteks das solen, dan ianya harus dipaparkan kembali seadannya agar kenyataan yang sebenarnya juga wujud dalam konteks das sein. Ketika rezim negara berganti dari satu ke rezim lain, para pegawai negarapun semakin hari semakin berganti baik karena memasuki masa pensiun maupun meninggal dunia satu persatu, maka kerja satu generasi sering putus dan tidak dipahami lagi oleh generasi berikutnya, itulah yang terjadi terhadap Mosi Integral Mohammad Natsir yang hari ini tidak banyak orang mengingat dan mengetahuinya. Padahal itu merupakan kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas seorang anak bangsa yang telah menghasilkan eksistensi NKRI sampai hari ini.

⁴ Wawancara dengan Mohammad Nur Kertapati, Ketua bidang Pendidikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta, 5 Agustus 2018.

Eksistensi NKRI pernah terancam hancur ketika invasi kedua Belanda pada tahun 1948 yang menaklukkan ibukota Jakarta. Ketika ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda tidak hanya berhasil menaklukkan Yogyakarta melainkan mampu menangkap Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI.⁵ Walhasil secara defakto dan dejure eksistensi RI dan NKRI sudah tiada, yang ada hanya wilayah dari Sabang sampai Marouke yang dikuasai dan diperintahkan oleh Belanda. Maka kalau mau dikatakan bahwa Indonesia sudah tiada pada waktu itu tidak bisa dibantah karena kenyataan demikian adanya.

Dalam kondisi Indonesia yang tidak punya ibukota, tidak punya presiden dan wakil presiden serta kehilangan sejumlah menteri kabinetnya akibat penangkapan Belanda, sebagai menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara yang pernah mendapatkan mandat samar-samar dari Mohammad Hatta di Yogyakarta kembali ke Bukit Tinggi Sumatera Barat. Pada tanggal 22 Desember 1948 bersama dengan koleganya seperti Mr. Teuku Mohammad Hasan, Lukman Hakim, Kolonel Hidayat, Kolonel Nazir, dan Mr, Sutan

5 George Mc Turnan Kahin dkk, *Sjafruddin Prawiranegara Penyelamat Republik*, Jakarta: Yayasan Asrama dan Pendidikan Islam bekerjasama dengan Panitia Peringatan Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011), 2011, hlm. 3.

Mohammad Rasyid dan lainnya bertempat di Halaban dalam kawasan Bukit Tinggi membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang langsung Sjafruddin Prawiranegara menjadi presidennya.

Dalam waktu singkat PDRI mendirikan satu komisariat (cabang) di Pulau Jawa yang dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsa seperti Dr. Sukiman Wirjosandjoyo sebagai menteri dalam negeri, Mr. Susanto Tirtoprodjo sebagai menteri kehakiman, Mr. I.J. Kasimo sebagai menteri urusan makanan, dan Supeno sebagai menteri pemuda dan pembangunan, mereka semua berhasil meloloskan diri dari penangkapan dan penahanan penjajah Belanda.⁶

Setelah terbentuknya PDRI yang presidennya dijabat oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara seluruh komponen bangsa bersatu padu mendukungnya. Panglima besar Soedirman berhasil lolos dari Yogyakarta dan memimpin perang gerilya melawan Belanda, perwakilan-perwakilan RI di luar negeri berjalan terus mengikut arahan PDRI. Wakil presiden Mohammad Hatta telah memerintahkan angkatan perang untuk terus melawan penjajah Belanda, Sjafruddin Prawiranegara yang ditunjuk menjadi presiden PDRI juga dimintakan agar perjuangan terus berjalan, kalau PDRI gagal dibentuk di Sumatera maka dibentuk pemerintah

⁶ *Ibid*, hlm. 5-6.

dalam pengasingan di New Delhi di mana Dr. Seodarsono dan Mr. Maramis berada di sana.⁷

Dalam masa tenggang kepemimpinan RI ketika presiden dan wakil presiden ditangkap dan ibukota Jakarta serta Yogyakarta dikuasai penuh oleh Belanda, disusuli jatuhnya Bukit Tinggi tempat bermastautin presiden PDRI ketangan Belanda, maka alternatif akhir terjadi. Seluruh perangkat PDRI, markas besar kehakiman, kejaksaan, mabes Polri, mabes TNI beserta sejumlah pejabat negara berpindah dan bertahan di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Letkol. Daan Jahya, Kolonel Hidayat, Kolonel Kawilarang, Mayor Oetarjo, Kolonel Soejono (AURI), dan Kolonel Subiakto (ALRI) merupakan para perwira yang ditugaskan di Aceh dan Sumatera Barat.⁸ Di sinilah mereka menerima makanan, minuman, pakaian (sandang pangan) dari kebaikan hati rakyat Aceh. Selebihnya ummat Islam Aceh terus bertahan di front Medan Area berperang mempertahankan lajunya penjajah Belanda ke Aceh. Dalam kondisi seumpama itu Aceh mengirimkan berton-ton beras dan amunisi lainnya ke Medan Area agar para mujahidin dapat bertahan di sana.⁹

7 O. E. Engelen dkk, *Lahirnya satu bangsa dan negara*, Jakarta: UI Press, 1997, hlm. 285.

8 *Ibid*, hlm. 286.

9 Lihat "Sebuah Tazkirah Pasca-DOM: Aceh "Daerah Modal" Perjuangan dan Pembangunan Indonesia", *Serambi Indonesia* 25 September 1998, hlm., 5. Lihat juga tajuk yang sama dalam *Warta Pemda Aceh*, Oktober 1998. A. Hasjmy, *Bunga Rampai*

Selaras dengan perlawanan tersebut Aceh mengumandangkan berita lewat Radio Rimba Raya di Krueng Simpo Kecamatan Juli. Radio yang dirakit Kolonel Husin Yusuf bersama isterinya tersebut tembus pemberitaannya ke New Delhi di India, informasi Radio Rimba Raya yang mengkhabarkan Indonesia masih wujud dengan perlawanan bangsa Aceh di Medan Area tersebut disebarluaskan oleh radio New Delhi sehingga tersambung ke media PBB. Itulah dasar PBB menolak klaim Belanda yang menyatakan Indonesia sudah jatuh ketangan mereka kembali, dan itu pula bukti nyata bahwa Indonesia wujud kembali dan bebas dari adopsi Belanda atas berkat perjuangan dan perlawanan rakyat Aceh yang mengutamakan keselamatan Islam dan bangsa Islam dari yang lainnya.

Belum cukup sampai di situ, dalam masa yang sama Aceh telah membiayai bantuan penuh duta RI di luar negeri seperti Agussalim (duta keliling Indonesia) dan L.N. Palar duta RI di India.¹⁰ Kepada mereka Aceh

Revolusi dari Tanah Aceh, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 169. Tgk. A.K. Jakobi, *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peran Teuku Hamid Azwar sebagai Pejuang*, Jakarta: Gramedia & Seulawah RI 001, 1998, hlm., 275-276.

10 Lihat Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 9-11, lihat juga Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU. RI. No. 11 Tahun 2006), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 140-143.

menyediakan segala keperluan hidup mulai dari bahan makanan sampai kepada pakaian luar dan dalam. Semua itu menjadi isyarat besar bahwa tidak mungkin ada NKRI yang diagung-agungkan sebahagian manusia di pulau Jawa hari ini tanpa perjuangan Islam bangsa Islam di Aceh tempo dulu, tambah lagi dengan sumbangan dua pesawat terbang dari rakyat Aceh terhadap RI. Dengan demikian sangat amat wajarlah kalau Aceh diberikan hak paten oleh RI untuk menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh di sana, malah lebih wajar lagi RI wajib memberikan self determination bagi Aceh.

Semua bantuan dan perjuangan rakyat Aceh terhadap RI terjadi karena didasari oleh semangat *jihad fi sabilillah* dalam rangka mengusir penjajah dan mendirikan daulah. Semestinya semua pihak lebih mengerti akan hakikat perjuangan tersebut lewat buku-buku pelajaran yang diajari di setiap pendidikan yang ada. Semua itu dapat dijadikan latarbelakang dan dasar pemikiran kenapa semua rakyat Indonesia harus menjaga dan mempertahankan NKRI yang telah diazaskan oleh Mohammad Natsir dengan Mosi Integralnya.

Wilayah yang bernama Indonesia hari ini dipecah-

pecah oleh Belanda dengan konsep negara bagian agar memudahkan mereka menguasainya. Beberapa wilayah berhasil dijadikan negara bagian seperti negara bagian Sumatera, negara wilayah Pasundan, dan lainnya. Pada waktu itu terpetik kesan bahwa sulit untuk melawan Belanda karena mereka kuat dan berkuasa sehingga apasaja yang dilakukan Belanda dapat berjalan dengan lancar. Dalam kondisi semacam itulah tokoh bangsa yang bernama Mohammad Natsir bangkit mempengaruhi anak bangsa lainnya untuk meninggalkan konsep negara bagian ciptaan Belanda dan kembali kepada NKRI, gerakan itulah yang kemudian terkenal dengan nama Mosi integral Mohammad Natsir.¹¹

Kita pahami bersama bahwa NKRI pernah terancam bubar oleh minimal dua gejolak besar yang tercatat dengan tinta emas dalam sejarah, yaitu yang satu gerakan pro Islam yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia lewat wadah perjuangan panjang Gerakan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) dalam rentan waktu 1947-1962. Dan yang satu lagi merupakan gerakan anti agama dan anti tuhan yang bernama Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1948 dan 1965, keduanya memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan karena masing-masing disupport oleh negara asing

11 Wawancara dengan Abdul Wahid Alwy, Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta, 15 Agustus 2018.

seperti United States of Soviet Rusia (USSR), United States of Amerika (USA), dan Republik Rakyat Cina (RRC).

Khusus berkenaan dengan gerakan komunis baik di Indonesia maupun Malaysia ada doktrin komunis internasional via partai komunis RRC yang menganjurkan agar partai komunis di Indonesia dan Malaysia terus berjuang mengkomunikasikan dua negara tersebut.¹² Sementara gerakan DI/TII hendak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dengan menggantikan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia dengan konstitusi negara Islam.¹³

Selain itu, upaya-upaya merusak dan menghancurkan NKRI terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia tegak di muka bumi dengan berbagai kepentingan dan interes-interes jahat. Djuyoto Suntani menyatakan bahwa ada tujuh strategi yang dirancang oleh Illuminati Internasional untuk menghancurkan negara Indonesia, yaitu:

1. Memperlemah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan yang dimunculkan lewat upaya merubah status NKRI menjadi negara serikat, negara federal, pemberian hak istimewa

¹² Mohammad Natsir *Berdakwah di jalur Politik, Perpolitik di Jalur dakwah*, Selangor: Wadah, 2009, hlm. 8.

¹³ Mr. S. M. Amin, *Indonesia di bawah rezim demokrasi terpimpin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 157.

kepada daerah-daerah menjadi strategi sangat jitu untuk menghancurkan NKRI.

2. Menghapus ideologi Pancasila. Upaya yang dilakukan gerakan Illuminati Internasional melalui The Luciferians Conspiracy adalah mengusahakan agar generasi Indonesia terpisah dengan Pancasila, mereka mengarahkan orang-orang Indonesia menghantarkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah asing ang ada baik dalam maupun luar negeri yang tidak diajarkan Pancasila di dalamnya. Dengan demikian generasi penerus bangsa tidak lagi terikat dengan ideologi negara Pancasila.
3. Mendewakan uang. Pihak asing mengedepankan uang sebagai pemicu rakyat Indonesia rajin bekerja, tanpa uang tidak ada orang kerja walaupun dalam kondisi wajib bekerja, akibatnya kebiasaan masyarakat seperti gotong royong, bersilaturrehmi, menjenguk orang sakit semakin pudar dan ditinggalkan masyarakat Indonesia.
4. Menghapus rasa cinta tanah air. Gerakan ini berjalan melalui para tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang mendapatkan gaji lumayan, sementara di Indonesia sendiri bukan hanya tidak mendapatkan gaji lumayan melainkan kerjapun sangat amat susah didapat. Akhirnya mereka yang sudah menyatu

dengan negara luar tidak lagi merasa cinta kepada negara sendiri.

5. Menciptakan sistem multi partai. Cara ini dilakukan dengan memberikan kebebasan mendirikan partai dengan tujuan agar bangsa ini menjadi pecah karena masing-masing mempertahankan partainya. Kondisi ini sangat cepat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat karena orang-orang partailah yang menguasai dan mengurus negara sehingga negara berada di tangan mereka dan sesuai dengan keinginan dan kehendak mereka.
6. Menumbuhkan sekularisme, upaya ini sengaja diluncurkan pihak luar untuk menghancurkan sesuatu negara terutama sekali negara yang mayoritas muslim. Dengan gerakan sekularisme tersebut sesuatu bangsa yang mayoritas muslim cepat pecah dan hancur yang berakibat kepada hancurnya negara.
7. Membentuk tata dunia baru. Tata dunia baru yang dimaksudkan di sini adalah negara kuat dunia memposisikan diri sebagai polisi dunia yang hanya dapat melihat kesalahan negara lain saja sementara kesalahan diri sendiri tidak nampak dilihat mata. Hari ini Indonesia dijadikan sebagai kuda troya kuasa besar dunia, kalau kuasa dunia itu sudah

berada pada kesimpulan menghancurkan Indonesia maka dengan mudah saja dapat diselesaikan. Fenomena semacam ini tidak mampu diprediksi oleh semua orang, oleh karena itu pula NKRI yang diawali oleh Mosi Integral Mohammad Nasir ini sangat rentan bubar dan hancur, sangat tergantung kepada kepentingan kuasa besar dunia hari ini.¹⁴

Masalah yang terkandung dalam kajian ini adalah masih banyak ummat dan anak bangsa ini yang tidak mengerti dan tidak mengetahui apa itu Mosi Integral Mohammad Nasir. Karena tidak tahu konsepnya maka tidak sedikit pula anak bangsa Indonesia ini yang merasa tidak berkepentingan dengan Mosi Integral tersebut. Padahal Mosi Integral Mohammad Nasir itulah yang menjadi pemicu dan latarbelakang wujudnya konsep NKRI yang diagung-agungkan oleh mereka yang tidak pernah mengenal Mosi Integral Mohammad Natsir tersebut.

Karena itu pulalah perlu adanya pemecahan masalah terhadap konsep Mosi Integral Mohammad Natsir sebagai acuan dan patron bagi warga negara yang mengaku rakyat NKRI tetapi buta akan sejarah NKRI itu sendiri. Estafet penerus perjuangan Mohammad

14 Djuyoto Subtani, *Tahun 2015 Indonesia pecah*, Jakarta: Pustaka Perdamaian, 2007, hlm. 42-52.

Natsir sebagai pencetus dan motor NKRI lewat Mosi Integralnya, kini beliau meninggalkan satu lembaga dakwah yang diberi nama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tanggal 18 Februari 1967 sebagai wadah perjuangan ummah untuk menjaga keutuhan NKRI. Ia juga dijadikan lembaga alternatif yang berperan serta dalam perpolitikan negara dan bangsa selaras dengan hobbi dan selera pendirinya.

Fakta sejarah dan fakta perjuangan seorang Mohammad Natsir dalam upaya mewujudkan Mosi Integralnya sangat perlu disosialisasikan kepada segenap anak bangsa Indonesia baik melalui media cetak, media sosial elektronik, maupun lewat jalur pendidikan yang dijadikan bahan wajib bagi setiap jenjang pendidikan yang ada semenjak dari sekolah dasar sampai kepada perguruan tinggi. Selama ini terjadi pemotongan sejarah di negeri ini sehingga banyak kebenaran sejarah bangsa tidak diketahui dan tidak sampai kepada anak bangsa sendiri. Sudah semestinya Mosi Integral Mohammad Nasir dijadikan fakta dan data mendasar cikal bakal NKRI

Penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu nilai tambah terbaru berkenaan dengan politik bangsa, sejarah bangsa, dan peradaban bangsa karena belum ada penulisan persis seperti ini yang ditulis oleh para peneliti dan penuli-penulis lainnya.

Penelitian ini perlu dan penting dilakukan untuk mengetahui konsep dan tujuan Mosi Integral Mohammad Natsir yang dilakukan dalam masa penjajahan Belanda terhadap rakyat dan negara Indonesia. Ia juga penting dan perlu dilakukan untuk mengetahui target, sasaran, dan tujuan Mosi Integral Mohammad Natsir yang dengan usaha tersebut menghasilkan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diagung-agungkan bangsa Indonesia hari ini. Hari ini hampir semua rakyat Indonesia yang berpolitik dan paham politik menggembar gemborkan nama NKRI, mulai dari bangsa asli Indonesia sampai kepada para pendatang yang sudah berkolaborasi dengan kaum tempatan dalam politik, bisnis, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Namun demikian tidak sedikit di antara mereka yang mengagung-agungkan NKRI itu tidak tau asal usul dan latar belakangnya. Sebab itulah penelitian ini penting dilakukan agar semua pihak dari rakyat negeri ini mengetahuinya dan memahaminya. Kepentingan lain dari rencana penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman spesial kepada generasi muda agar mereka mengetahui sejarah, mempelajari sejarah dan mencintai sejarah karena sejarah itu merupakan cermin bagi kehidupan sesuatu bangsa.

Kepentingan lain yang tidak dapat ditinggalkan adalah untuk meninggalkan satu lagi khazanah

pengetahuan hasil kajian ilmiah sehingga menjadi rujukan bagi para penuntut dan para penulis dari pihak manapun jua. Penuh harapan kita hasil penelitian ini dapat membawakan nuansa pengetahuan baru dalam kontek ilmu pengetahuan sosial yang selama ini sempat tersisih dan termarginalkan. Apalagi pelakunya adalah orang penting dalam NKRI pada zamannya, lebih serius lagi kita katakan pelaku itu seorang muslim ideologis, muslim tha'at, dan muslim yang peduli ummat yang semestinya watak, karakter, dan gaya hidupnya perlu dipedomani dan ditiru oleh generasi pelanjut di negeri ini.

1.2. LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Setiap penulisan ilmiah atau setiap penelitian mestilah diangkat kerangka teori atau kajian teori dari masalah yang dikaji guna untuk memastikan bahwa kajian tersebut asli dan original. Selain itu ia sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian ilmiah yang mengikut tradisi ilmiah dan mengikuti ketentuan sesuatu penelitian yang ada sehingga hasil daripada rumusan laporan penelitian nantinya akan menentukan objektifitas penelitian sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Kajian teori diperlukan dalam sesuatu penelitian

untuk membentuk bodi laporan penelitian itu komprehensif, logis, akreditatif, dan sinergis dengan atribut penelitian itu sendiri. Upaya-upaya yang paling signifikan untuk mewujudkan kerangka teori tersebut adalah kami mulai dari upaya mendapatkan variable-variabel dalam penelitian kemudian memadukannya dalam laporan penelitian itu sendiri yang berhubungan dengan judul dan rumusan masalah pada penelitian ini. Kerangka inti yang menjadi tali estafeta dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, jawaban terhadap permasalahan, dan kesimpulannya adalah eksistensi, histori, dan aplikasi Mosi Integral Mohammad Natsir dalam sebuah kajian ilmiah.

Kajian teori yang dipaparkan dalam kajian dan penelitian ini berkaitan langsung dengan judul penelitian tentang maksud, arah, dan tujuan daripada Mosi Integral Mohammad Natsir pada zaman agresi Belanda kedua terhadap kemerdekaan Indonesia pada ujung tahun 1948. Diharapkan eksistensi kajian teori yang dibangun di sini dapat memberikan dan mengangkat nilai kualitas penelitian ini menjadi lebih tinggi dari sudut pandang metodologi penelitian. Walaubagaimanapun, nilai dan kualitas sesuatu penelitian tidak dapat dipisahkan dari pantauan kajian teori dan ianya menjadi barometer tinggi rendahnya kualitas yang diperoleh oleh seseorang peneliti.

Disanalah terletak penilaian sesuatu hasil kajian sehingga ia mudah diberikan penilaian oleh pihak-pihak yang membaca dan menilainya, sehingga terbentuk kajian teoritis yang substantif dalam penelitian ini sebagai bahagian yang tidak dapat dipisahkan dengan judul penelitian, outline penelitian, abstrak penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah penelitian, dan juga sampai kepada kesimpulan penelitian nantinya. Semua itu termasuk kedalam kajian teori penelitian yang mesti wujud dalam sesuatu proposal penelitian sebagai syarat kesempurnaan proposal dan penelitian itu sendiri sehingga rumusan hasil penelitian nanti akan mandiri dan lepas dari rambu-rambu plagiasi, copy-paste, dan seumpamanya.

Kajian pustaka sangat perlu dilakukan dalam sesuatu penelitian ilmiah guna selain untuk menghindari terjadinya plagiasi atau *copy-paste*, juga sangat penting untuk memudahkan operasional peneliti memperoleh data dari bahan-bahan baik dalam bentuk buku, *manuscript*, media cetak, media elektronik atau dokumen lainnya. Ia juga bisa berfungsi untuk dapat mengarahkan peneliti guna mencari dan memperoleh data berdasarkan hasil studi perpustakaan yang diformatkannya. Biasanya untuk sebuah penelitian lapangan, kajian pustaka sangat membantu peneliti untuk memudahkan memperoleh data yang lebih konkrit dan akurat.

Kajian pustaka dapat juga berfungsi untuk mengkondisikan bahwa hasil sesuatu penelitian ilmiah yang menggunakannya menjadi lebih akurat dan jauh dari nilai-nilai plagiasi dan data palsu. Dengan studi perpustakaan seorang peneliti telah dibatasi upaya-upaya plagiasi dan *copy-paste* dalam merangkum laporan penelitian. Untuk keperluan itu pula seorang peneliti perlu mengikat diri dengan ketentuan yang ada dalam format *research methodology* sehingga hasil penelitiannya akan lebih berkualifait, berkualitas tinggi dan bermutu tinggi sehingga layak memperoleh apresiasi tinggi dari pihak mana saja yang menjadi penilainya.

Sebagai wujud konkrit dari kajian pustaka dalam rancangan dan rencana penelitian ini perlu ada usaha untuk memperoleh sejumlah buku dan karya ilmiah lainnya berupa manuskrip, thesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu sebagai pembanding dan batasan penelitian dan juga sebagaiantisipasi bagi plagiasi. Di antara buku-buku dan karya-karya yang selaras dengan penelitian ini tetapi tidak sama adalah:

Gamal Abdul Nasir Zakaria, Mohammad Natsir Pendidik Ummah, Bangi: penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003, George Mc Turnan Kahin dkk, Sjafruddin Prawiranegara Penyelamat Republik, Jakarta: Yayasan Asrama dan Pendidikan Islam bekerjasama dengan Panitia Peringatan Satu Abad

Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011), 2011, O. E. Engelen dkk, Lahirnya satu bangsa dan negara, Jakarta: UI Press, 1997, Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU. RI. No. 11 Tahun 2006), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Mohammad Natsir berdakwah di jalur politik, berpolitik di jalur dakwah, Selangor: Wadah, 2009, Mr. S. M. Amin, Indonesia di bawah rezim demokrasi dipimpin, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, Djuyoto Subtani, Tahun 2015 Indonesia pecah, Jakarta: Pustaka Perdamaian, 2007, selain itu ada tiga jilid buku berjudul; Kapita Selekta Mohammad Natsir, yang memuat hampir seluruh karya dan pidato Mohammad Natsir secara original yang sangat relevan untuk dirujuk dalam penelitian ini.

Masih banyak buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang tidak sanggup kami senaraikan semuanya di sini, semua buku yang kami sebut di sini kiranya menjadi sampel yang representatif dan dapat mewakili buku-buku lainnya yang belum tersebutkan untuk menyatakan bahwa judul penelitian yang kami pilih di sini sampai hari ini belum kami dapati dalam peredaran dan perlu dikaji untuk penambahan bahan rujukan dari rujukan-rujukan yang telah ada.

Sudah barang tentu sebagai penelitian yang bersifat historis-politis maka untuk menambah dan memperkaya bahan penelitian, perolehan data dari hasil wawancara perlulah diperoleh untuk kelengkapan dan kesempurnaan hasil penelitian dalam laporan akhir nantinya. Wawancara yang kita maksudkan di sini akan kami laksanakan bersama para pelaku sejarah, keluarga objek kajian, pihak pemerintah, dan sebagainya.

1.3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan alat prosedur dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian.¹⁵ Menjadi satu kewajiban bagi sesuatu penulisan dan penelitian ilmiah untuk mewujudkan sebuah metodologi penelitian. Metodologi tersebut menjadi bahagian tidak terpisahkan dengan sesuatu laporan akhir sebuah penelitian yang dijalankan oleh seseorang pelaku penelitian. Tidak bermakna dan tidak berharga sebuah penelitian tanpa diakhiri oleh satu laporan yang menggunakan metodologi penelitian. Demikian pentingnya metodologi penelitian dalam sesuatu penelitian ilmiah, sebagaimana juga dalam sebuah penulisan ilmiah.

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 26.

Lazim sudah diketahui para ilmuwan dan penulis-penulis karya ilmiah bahwa untuk mengakuratkan sebuah penelitian dari suatu karya ilmiah mestilah dibuktikan dengan data-data yang diperoleh dari lapangan penelitian baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Data fisik semisal buku-buku rujukan, manuskrip, putusan-putusan pengadilan dan data non fisik seperti hasil wawancara, observasi, analisis dan seumpamanya. Dalam hal pengumpulan data-data di lapangan dan mendesain penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode yang ma'ruf dan lazim digunakan untuk sebuah penelitian ilmu-ilmu sosial. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data transparan dan kolaboratif, seperti pernyataan responden baik secara tertulis maupun secara lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶ Untuk mendeskripsikannya mengikut langkah-langkah sebagai berikut :

1.3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari dua penelitian yang lazim digunakan seorang peneliti, yaitu; penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia-pres, 2014), hlm. 250.

(library research). Penelitian lapangan perlu dilakukan karena masih ada generasi peringkat Mohammad Natsir yang paham dan mengetahui persoalan Mosi Integral Mohammad Natsir. Selebihnya banyak murid-murid Mohammad Natsir yang juga memahami persoalan tersebut, dengan demikian kemungkinan untuk memperoleh data di lapangan sangat besar sekali.

Untuk mengakuratkan data sesuai dengan topik pembahasan, penulisan ini tidak boleh dilepaskan daripada penelitian pustaka, karena bahan-bahan bacaan sangat lumayan mencukupi dalam berbagai buku dan dokumen negara yang tersimpan di perpustakaan dan koleksi buku pribadi orang-orang tertentu. Gabungan dua jenis penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan laporan penelitian yang berkualitas dan komprehensif. Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif-analitis, suatu metode yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.¹⁷

1.3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasinya di Aceh

¹⁷ Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

dan seputaran ibukota negara (Jakarta) mengingat sumber data baik pelaku sejarah maupun buku-buku yang relevan tertumpu di sana. Jadi peneliti akan mengunjungi beberapa pustaka yang terkait dengan topik penelitian ini seperti pustaka Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di jalan Kramat Raya no. 45, pustaka UIN Syarif Hidayatullah, pustaka Mohammadiyah, dan lainnya. Sementara interviewer akan kami temui para pakar sejarah, pakar politik, pelaku sejarah, murid-murid Mohammad Natsir, dan pihak-pihak lain yang bertautan dengannya.

1.3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan untuk mengatur penelitian dengan efektif, tepat sasaran, dan terukur. Dalam suatu penelitian, data merupakan bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian.¹⁸ Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, kami menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan teknik tersebut diharapkan wujudnya kesempurnaan penelitian sesuai dengan rancangan dan memuaskan pihak rekanan.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

1.3.4. Observasi

Metode observasi memiliki kebaikan dan keburukan ketika digunakan untuk memperoleh data di lapangan. Kebaikannya adalah; pencatatan dapat dilakukan pada masa terjadinya peristiwa/terlihatnya gejala tertentu, dan tidak tergantung pada jawaban responden, maka lebih objektif dan lebih teliti. Sementara keburukannya adalah; tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh data tentang sikap dan motivasi responden, tidak dapat mengetahui apa yang telah diperbuat responden pada waktu yang lalu, dan rencananya yang akan datang, serta memerlukan banyak waktu.¹⁹

Observasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperkuat metode pengumpulan data di lapangan. Peneliti akan melakukan observasi terhadap data dan fakta yang ada di lapangan untuk meningkatkan mutu penelitian itu sendiri. Observasi dipakai dengan cara lumayan simple yaitu dengan memantau, mengolah data, verifikasi data, dan pengumpulan data oleh observer dengan cara memantau, mengobserver, memperhatikan lenggak lenggok responden dan juga kandungan sesuatu bahan tulisan yang lazimnya sudah usang.

19 Marzuki, *Metodologi riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, cet.4, 1989, hlm. 59.

1.3.5. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara interviewer dengan responden.²⁰ Melalui wawancara dengan sejumlah responden data diperoleh sesuai dengan kerangka teori yang dideskripsikan. Khusus untuk penelitian ini peneliti akan mewawancarai sejumlah responden yang terdiri dari pelaku sejarah yang berkenaan dengan Mosi Integral Mohammad Nasir, kalangan keluarga Mohammad Natsir. Kawan seperjuangan dan murid-murid Mohammad Natsir. Dengan demikian keakuratan data mudah dipertanggungjawabkan.

1.3.6. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan yang berasal dari buku, kitab, jurnal, peraturan-peraturan pemerintah, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti. Dengan kata singkat dapat dikatakan sejumlah dokumen yang terkait dengan judul akan dibuku, dibaca, dipelajari, dan diambil data yang ada dan selaras dengan keperluan data yang diperlukan.

²⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm 72.

1.3.7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam upaya pengumpulan data agar penelitian tersebut menjadi lebih sistematis, realistis, dan mudah untuk dimengerti. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan instrumen yang mendukung dalam proses penelitian seperti menggunakan kertas, alat tulis, buku tulis, alat perekam, dan instrumen-instrumen lain yang dapat memberi bantuan dan memudahkan dalam pelaksanaan penelitian ini.

1.3.8. Langkah-Langkah Analisis Data

Data-data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data yang aktual dan faktual. Setelah semua data penelitian didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

BAB II

EKSISTENSI MOSI INTEGRAL MOHAMMAD NATSIR

2.1. Biografi Mohammad Natsir

Lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908,¹ Mohammad Natsir sejak muda dalam usia dua puluhan sudah aktif dalam dunia politik. Ia bergerak mulai dari organisasi Jong Islamiten Bond (JIB) cabang Bandung dan pernah menjadi ketua dalam organisasi tersebut. Selain itu Mohammad Natsir juga pernah memimpin Partai Islam Indonesia (PII), memimpin Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia

1 Murjoko, *Mosi Integral Natsir 1950*, Thesis Master Sains di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, Jakarta: Juli 2004, hlm. 25.

(Masyumi), dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sehingga akhir hayatnya.²

Sosok Mohammad Natsir tergolong kedalam kategori orang aneh dan asing apabila diukur dengan ukuran dunia Indonesia hari ini. Anehnya karena beliau yang pernah menjadi Ketua Umum partai besar ummat Islam bernama Masyumi³, pernah menjadi menteri penerangan, pernah juga menjadi Perdana Menteri tetapi tidak meninggalkan harta benda semisal rumah, toko, hotel, tanah dan semisalnya kepada anak cucu lazimnya pejabat negara zaman now. Asing karena dalam derap langkah politiknya beliau komit, konsen, konsekwen, dan istiqamah dengan Islam, politik Islam, dan hukum Islam sehingga ketika terkendala dengan konsep Islam dalam berpolitik beliau mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan memasang motto: “Dahulu kita berdakwah melalui politik dan sekarang kita berpolitik melalui dakwah”.⁴

² *Al Muslimun*, No. 190 Januari 1986, hlm. 39.

³ MASYUMI adalah singkatan dari Majelis Syura Muslimin Indonesia, partai Islam terbesar dalam era 1950an di Indonesia. Partai Masyumi didirikan di Yogyakarta pada tanggal 7 Nopember 1945. Sejak 1 Februari 1950 berkedudukan di Jakarta. Muktamarnya bulan Agustus 1952 di Jakarta mengesahkan Anggaran Dasar baru sehingga eksistensi partai Masyumi pasca pindah markas dari Yogyakarta ke ibukota Jakarta dan pengesahan Anggaran Dasar (AD) baru tersebut membuat gezah dan popularitas partai Islam tersebut semakin melambung di mata ummah dan bangsa.

⁴ Wawancara dengan Dr. Muhammad Nur Kertapati, wakil Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta: 23 Juni 2019.

Artinya ketika beliau berpoltik dahulu baik sebagai ketua partai, menteri, maupun perdana menteri beliau selalu berdakwah di parlemen, di pemerintahan, dan di mana-mana dalam menyusun undang-undang yang memihak kepada Islam, dan di mana bisa berdakwah tidak pernah disia-siakan kesempatan dakwah tersebut. Manakala beliau tidak lagi punya kuasa dan menjadi rakyat biasa dalam usia senja, mendirikan lembaga dakwah dan dengan lembaga tersebut mengekspresikan peran politik yang dahulu pernah diperankan dalam masa aktif di politik praktis.⁵

2.1.1. Keluarga

Mohammad Natsir yang setelah menikah dengan Nurnahar pada tanggal 20 Oktober 1934 mendapatkan gelar Datuk Sinaro Panjang lahir di kampung Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 H yang bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1908 M dari rahim seorang ibu bernama Khadijah berasal dari keturunan Chaniago dan seorang ayah bernama; Mohammad Idris Sutan Saripado.⁶ Ayahnya seorang jurutulis dan pegawai rendah pada kantor Kontroler di Maninjau, tahun 1918

⁵ Wawancara dengan Drs. Avid Salihin, Sekjen Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta: 23 Juni 2019.

⁶ M. Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia*, Bandung: Mizan, 2010, hlm. 19.

ia dipindahkan dari Alahan Panjang ke Ujung Pandang Sulawesi Selatan sebagai sipir (penjaga tahanan).⁷ Selain ke Ujung Pandang ayahnya pernah juga dipindahkan ke Bonjol yang terkenal dengan kekuatan pendidikan Islam modern yang digerakkan oleh kaum muda bergelar kaum Paderi. Pembaharuan di Bonjol banyak dipengaruhi oleh pemikiran Islam dari Mesir.⁸

Isteri Mohammad Natsir yang bernama Putri Nurnahar (umi) lahir di Bukit Tinggi tanggal 28 Mei 1905, ia merupakan keturunan Ningrat dari keluarga Sultan Natal yang sukses dalam pendidikan. Tahun 1926 orang tua Umi pernah terlibat pemberontakan melawan Belanda dalam peristiwa Pemberontakan Kamang sehingga dia dibuang dan dipenjarakan di Glodok sampai meninggal dan tidak jelas di mana kuburannya. Ummi mempunyai tali keluarga dengan Sutan Takdir Ali Syahbana, dan Sutan Syahrir. Dalam usianya 14 tahun Umi berpindah tempat tinggal dari Bukit Tinggi ke ibukota Jakarta, di Jakarta Umi pernah menjadi anak angkat dari ayahnya DR. Tarmizi Thaher yang juga menjadi gurunya.⁹ Stop

Selanjutnya Umi aktif di JIB Bandung yang diketuai Mohammad Natsir, ia juga yang pertama melamar

7 Thohir Luth, *M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: 1999, Gema Insani Press, hlm. 21-22.

8 Ahmad Suhelmi, *Soekarno versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, Jakarta: Darul Falah, 1999, hlm. 20

9 Murjoko, *Mosi...*, hlm. 26-27.

menjadi guru pada Sekolah Pendidikan Islam (Pendis) sebuah sekolah Taman Kanak-kanak yang disponsori Mohammad Natsir tersebut. Tidak cukup sampai di situ Umi juga berkorban jiwa, raga, dan harta benda untuk memajukan sekolah tersebut sehingga sekolah tersebut berjalan lancar. Ada kemungkinan faktor keseriusan Umi berjuang untuk Islam tersebutlah Mohammad Natsir menaruh perhatian kepadanya walaupun usia Umi sedikit lebih tua dari beliau, dan kemudian beliau menikah berdua tanggal 20 Oktober 1934 di Bandung.

Umi lebih tua tiga tahun berbanding Mohammad Natsir ketika melangsungkan pernikahan keduanya. Dari hasil pernikahan tersebut beliau dikaruniai enam orang anak, namun satu orang anaknya meninggal ketika beliau menjadi Perdana Menteri pada waktu bertugas ke Aceh bersilaturahmi dengan kelompok DI/TII Aceh pimpinan Tgk. Mohammad Dawud Beureu-eh. Anak-anak yang masih hidup adalah Lies Agus Alwy, Asma Farida, Hasnah Fauziah, Aisyah Rahim, dan Ahmad Fauzi.¹⁰

2.1.2. Pendidikan

Dalam perjalanan hidupnya Mohammad Natsir selalu terdidik oleh lembaga pendidikan yang diikutinya. Dalam usia delapan tahun ia masuk sekolah berbahasa

¹⁰ *Ibid*, hlm. 28.

Belanda sebagai penjajah nusantara pada waktu itu bernama Hollandsch Inlandsche School (HIS) Adabiyah Padang.¹¹ Ini satu sekolah partikelir yang dipimpin oleh H. Abdullah Ahmad yang merupakan sekolah yang menerima murid-murid dari kalangan masyarakat umum. Mohammad Natsir bersekolah di sini karena ia tidak diterima di sekolah pemerintah yang dikhususkan bagi anak-anak pegawai pemerintah seperti demang dan wedana, ketika menempuh pendidikan HIS di Padang tersebut Mohammad Natsir tinggal bersama makciknya Rahim.¹²

Setelah beberapa bulan belajar di HIS padang Mohammad Natsir kemudian dipindahkan oleh ayahnya ke HIS milik pemerintah di Solok, di sana ia langsung duduk di OI atas pertimbangan kepintarannya. Di sinilah ia mulai belajar bahasa Arab dan hukum-hukum fikih pada Tuanku Mudo Amin pada sore hari di Madrasah Diniyah serta mengaji Al-Qur'an pada malam harinya.¹³ Pada tahun 1920 ia pindah lagi ke Padang atas ajakan kakaknya Rubiah dan menamatkan pendidikan HIS di Padang pada tahun 1923. Seterusnya Mohammad Natsir masuk sekolah MULO di Padang dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, di Padang juga

11 Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, jilid 4, hlm. 21.

12 M. Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir*,..., hlm. 19.

13 Deliar Noer, *Gerakan Modern 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm.

ia bergabung dengan Pandu Nationale Islamietische Pavinderij (semacam pramuka sekarang ini).¹⁴ Pendidikan MULO diselesaikan Mohammad Natsir dengan baik pada tahun 1927.¹⁵

Dari Padang Mohammad Natsir bergerak ke Bandung melanjutkan pendidikan di Algemene Midelbare School (AMS) tahun 1927 dan lulus pada tahun 1930 dengan mendapatkan nilai lumayan tinggi. Dengan nilai tersebut Mohammad Natsir berhak memilih Fakultas Hukum di Batavia atau Fakultas Ekonomi di Rotterdam, atau menjadi pegawai negeri dengan imbalan gaji yang menggiurkan. Namun karena lebih menarik terhadap ilmu-ilmu Islam dan gerakan Islam maka Mohammad Natsir menolak semua itu dengan memilih aktif berorganisasi bersama dengan Persatuan Islam (PERSIS) yang dipimpin A. Hassan. Dalam tahun yang sama ia juga ikut kursus guru Diploma Lager Onderwijs (LO) bersamaan waktu tersebut ia tetap aktif di JIB cabang Bandung dan pernah menjadi ketua JIB di sana.¹⁶

2.1.3. Pemikiran Politik

Pemikiran politik Mohammad Natsir tentang

14 Thohir Luth, *M. Natsir, Dakwah...*, hlm. 22-23.

15 George Kahin, Mohammad Natsir (1908-1993): sebuah kenangan, dalam Anwar Haryono dkk, *M. Natsir Sumbangan dan Pemikiran untuk Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah, 1999, hlm. 51.

16 Murjoko, *Mosi...*, hlm. 29-30.

nasionalisme dan persatuan Indonesia tumbuh setelah munculnya pergerakan Islam di Indonesia. Bertahun-tahun sebelum penggunaan istilah nasionalisme Indonesia lewat organisasi-organisasi sudah wujud berbagai organisasi seperti Budi Utomo, Pasundan, Jong Summateranen Bond yang didominasi ummat Islam yang langsung atau tidak langsung telah mengaplikasikan persatuan dan nasionalisme Indonesia.

Sejumlah pergerakan yang langsung berhubungan dengan agama Islam juga telah membuktikan bahwa nasionalisme Indonesia sudah wujud jauh sebelum Indonesia merdeka. Ikatan nasionalisme Indonesia itu wujud melalui berbagai pergerakan Islam yang muncul lewat berbagai wadah seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan lainnya yang telah menembusi keseluruhan wilayah Indonesia dari provinsi ke provinsi. Mohammad Natsir menegaskan bahwa Islam telah menumbuhkan persatuan ke-Indonesia-an yang hari ini disebut nasionalisme Indonesia jauh hari sebelum negara Indonesia wujud dalam peta dunia hari ini.¹⁷

Pemikiran Mohammad Natsir tentang sekularisme adalah, paham sekularisme bertentangan dengan agama Islam, makanya dalam upaya kerja badan Konstituante beliau memberikan pengertian kepada ketua badan Konstituante; Wilopo, bahwa kita harus pilih satu antara

17 *Al Muslimun*, No. 190 Januari 1986, hlm. 39.

dua, pilih agama (Islam) yang datangnyanya dari Allah SWT sebagai dasar negara atau pilih sekularisme hasil pemikiran manusia yang manusia itu sendiri diciptakan oleh Allah SWT. Pada kesimpulannya Mohammad Natsir menegaskan bahwa sekularisme itu yang menyebabkan tambah berkembangnya atheisme di Indonesia.¹⁸

Sebagai pembela azas ideologi Islam Mohammad Natsir secara sungguh-sungguh menyuguhkan argumentasi tentang ideologi yang dikemukakannya. Ia menekankan makna sumber transendental bagi negara Islam ialah wahyu Ilahi dan ia mempertentangkannya dengan paham sekuler yang ditolaknyanya mentah-mentah. Menurutnyanya sekularisme sebagai cara hidup yang hanya mencakup kehidupan dunia saja dan tidak menjangkau ke kehidupan alam baka dan juga tidak berhubungan dengan ajaran Allah. Dalam perbincangannyanya ketika menjadi anggota badan Konstituante, dengan caranya yang muslihat sebenarnya Mohammad Natsir telah menegaskan bahwa sesuatu negara yang mayoritas dihuni ummat Islam seperti Indonesia itu harus berasaskan Islam.¹⁹

Berkenaan dengan pemahaman ideologi yang

18 Mohammad Natsir, *Islam sebagai dasar negara*, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Penerbit Media Dakwah, Universitas Mohammad Natsir, 1421 H/2000M, hlm. 62-75.

19 Lihat Waluyo, *Dari Pemberontak menjadi Pahlawan Nasional, Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2009, hlm. 120-121.

menjadi perdebatan hangat antara Mohammad Natsir dengan Soekarno di mana Soekarno sangat cenderung dengan pemikiran sekularisme yang diprakarsai oleh Kamal Attaturk di Turki pada zamannya. Mohammad Natsir malah mengaitkan pengertian ideologi dalam Islam itu dengan surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya: *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku*. Menurutny seorang muslim hidup di dunia ini ingin menjadi seorang hamba Allah dalam arti yang sepenuhnya yaitu mencari kejayaan di dunia dan kemenangan di akhirat. Antara dunia dan akhirat itu sama sekali tidak mungkin dipisahkan oleh seorang muslim dari ideologinya.²⁰ Dari prolog yang disajikan Mohammad Natsir tersebut jelaslah kepada kita bahwa beliau mengutamakan ideologi Islam baik untuk kehidupan berbangsa maupun kehidupan beragama.

Konsep Islam politik Mohammad Natsir sangat jelas dipaparkan dalam berbagai peluang dan kesempatan. Menurutny Islam sebagai agama tidak hanya mengkafer persoalan ibadah saja melainkan Islam melingkupi berbagai dimensi kehidupan ummat manusia yang telah sempurna diatur dalam ajaran Islam dengan pedoman asasnya Al-Qur'an. Jadi kehidupan berpolitik, kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya tidak boleh lepas

²⁰ Mohammad Natsir 70 tahun kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan, Jakarta: Pustaka Antara, 1398 H/1978 M, hlm. 46-47.

dari aturan-aturan Allah. Menurut Mohammad Natsir antara ibadah dengan politik tidak boleh dipisahkan karena berpolitik itu juga bahagian daripada ibadah. Pandangan semacam ini menggambarkan bahwa agama juga harus mewarnai kehidupan bernegara, dengan demikian Islam merupakan agama sempurna yang tidak memisahkan antara agama dengan negara.²¹

2.1.4. Perjuangan Mohammad Natsir

Bergabung dalam perkumpulan Kern Lichaam Jong Islamieten Bond (KLJIB) menjadi modal dasar bagi Mohammad Natsir untuk mengembangkan kiprahnya yang lebih luas dan matang dalam medan pergerakan, apa lagi beliau sempat menjadi ketua pada 1928-1932. Dari sinilah ia bersua dengan beberapa tokoh Islam yang kemudian sama-sama bergabung dalam partai Masyumi. Orang-orang tersebut antara lain adalah; Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Mohammad Roem, Prawoto mangkusasmito, Haji Agussalim. Dalam tahun 1932-1942 Mohammad Natsir memimpin organisasi Islam terbesar di Bandung yakni Persatuan Islam (Persis), dalam tahun yang sama beliau juga menjadi direktur MULO/HIK sebuah pendidikan Islam yang didirikannya.

21 Mohammad Ali Nawawi, *Konsepsi Islam Politik Mohammad Natsir*, Skripsi program studi aqidah filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 1436 H/2015 M, hlm. 64.

Pada tahun 1940-1942 Mohammad Natsir menjadi Anggota Dewan Kabupaten Bandung dan anggota pimpinan MIAI Bandung. Tahun 1942-1945 menjabat sebagai kepala Biro Pendidikan yang berkaitan dengan persoalan perguruan di Kotapraja Bandung (Bandung Syiakusyo. Tanggal 7-8 November 1945 Mohammad Natsir ikut memprakarsai Kongres Ummat Islam Indonesia pertama yang menghasilkan beberapa poin, yaitu; partai Masyumi merupakan satu-satunya partai yang berazaskan Islam yang akan memperjuangkan aspirasi seluruh ummat Islam Indonesia dalam lapangan politik.

Ketika itu Partai Syarikat Islam (PSII) juga bergabung dalam Masyumi. Dalam Kongres tersebut ikut disepakati bahwa satu-satunya organisasi pelajar adalah Pelajar Islam Indonesia (PII), satu-satunya organisasi kepemudaan Islam adalah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), dan satu-satunya organisasi kemahasiswaan islam adalah Himpunan Mahasiswa ISLAM Indonesia (HMI). Dalam rentang waktu tersebut juga Mohammad Natsir terpilih sebagai salah seorang anggota P.B.Masyumi dengan aktif bersama partai tersebut sehingga ke tahun 1949-1958, dan terakhir beliau menjadi ketua Masyumi dalam beberapa periode yang ditangannya partai tersebut dipaksa bubar oleh

Soekarno.²²

Selain itu sebagai seorang aktifis Mohammad Natsir juga pernah menjabat sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) sebagai sebuah badan yang bertugas melaksanakan pekerjaan sehari-hari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada dasarnya KNIP merupakan pemegang kekuasaan legislatif yang dapat menentukan arah GBHN sebelum terbentuknya DPR dan MPR setelah Indonesia merdeka. Lahirnya KNIP adalah untuk menolak isu yang dicetuskan pihak Belanda yang menyatakan bahwa Indonesia adalah buatan dan antek-antek Jepang. Tuduhan tersebut dibuktikan oleh kekuasaan presiden yang tidak terbatas dan absolut sesuai dengan militerisme Jepang pada sa'at itu. Setelah Sutan Syahrir menjadi Perdana Menteri tanggal 27 Desember 1945, komposisi BPKNIP adalah Supeno sebagai ketua, Mohammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara sebagai wakil ketua dan penulis.

Dalam tahun 1946-1949 Mohammad Natsir pernah menjadi Menteri Penerangan dalam tiga kabinet, yaitu; Kabinet Syahrir II, Kabinet Syahrir III, dan Kabinet Hatta I. dalam waktu tersebut posisi Menteri Penerangan sangat penting karena menjadi pihak yang berunding dengan Belanda dan mewujudkan peran diplomatik

²² Murjoko, *Mosi...*, hlm. 32.

untuk luar negeri. Dalam masa agresi Belanda pertam dan kedua tahun 1947-1949 beliau menjadi anggota cadangan dalam delegasi perundingan Renville sekaligus menjadi redaktur surat kabar harian Suara Republik.

Tanggal 3 April 1950 Mohammad Natsir menyampaikan pidato di parlemen dalam sidang pleno Republik Indonesia Serikat (RIS), sebagai anggota parlemen fraksi Masyumi beliau mengajukan usulan kembali ke NKRI dari negara RIS ciptaan Belanda. Upaya tersebut kemudian lebih populer dengan sebutan Mosi Integral Mohammad Natsir. Hasil upayanya tersebut kemudian disosialisasikan perobahan RIS menjadi NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950.

Aktivitas lain yang pernah dilakukan Mohammad Natsir di antaranya adalah: sebagai pimpinan partai Masyumi pernah berkunjung ke beberapa negara Timur Tengah, memimpin sidang Mukhtar Alam Islami di Damaskus (Syria) membahas issue agresi israel ke Palestina, menggerakkan komunitas muslim Indonesia untuk membantu kemerdekaan Afrika Utara, setelah keluar dari penjara yang ditahan Soekarno melakukan kunjungan ke negara-negara Timur Tengah atas undangan pemerintah negara-negara tersebut, menggerakkan solidaritas Islam untuk pembebasan masjid Al-Aqsha dan muslim Palestina, menjadi wakil presiden World Muslim Congress yang beralamat di Karachi, Pakistan, menjadi

Ta'sisi Rabithah Alam Islami yang bermarkas di Makkah Al-Mukarramah,

Selain itu beliau juga menjadi anggota Majelis A'la al 'alam lil masajid (Dewan Masjid sedunia) yang berpusat di Makkah Al-Mukarramah, menjadi ketua tim bentukan Rabithah Alam Islami untuk mencari penyelesaian masalah muslim Moro di Filipina Selatan, menjadi anggota Dewan Pendiri Al-haiah al-Khairiyah Al-Islamiah Al-Alamiyah (International Islamic Charitable Organization yang berpusat di Kuwait, anggota Dewan Pendiri Oxford islami Studies, di Inggeris, Anggota Dewan Kurator International Islamic University Islamabad Pakistan, dan sejumlah aktivitas lainnya yang luput dari pantaun penulis.²³

2.1.5. Pengaruh Tokoh Bangsa terhadap Mohammad Natsir

Ada sejumlah tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang menjadi rujukan dan berpengaruh terhadap perjalanan hidup Mohammad Nasir, di antaranya adalah: Abikusno Tjokrosujoso, DR. Sukiman Wirosandjoyo, Syamsuddin yangketiganyaberlatarbelakangpendidikanbarat.²⁴Selain

²³ *Ibid*, hlm. 33.

²⁴ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat Islami (Pakistan)*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 145-146.

itu Mohammad Natsir juga dipengaruhi oleh A. Hasan, Agus Salim, dan Syech Ahmad Syoerkati (tokoh pendiri Al-Irsyad).²⁵ Pengaruh A. Hasan terhadap Mohammad Natsir dominan berkaitan dengan persoalan agama dan politik di mana beliau konsen berdiskusi dengan A. Hasan ketika berada di Bandung berkaitan dengan persoalan agama dan politik.²⁶ Dalam pandangan Mohammad Natsir bahwa A. Hasan itu bukan sebagai seorang ulama melainkan juga ia mampu mengembangkan kepribadian seseorang. Mohammad Natsir juga sempat bergaul dan barangkali juga terpengaruhi oleh pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta, Prawoto Mangkusasmito, Yusuf Wibisono, Tjokroaminoto, dan Mohammad Roem.²⁷

Mohammad Natsir juga dipengaruhi oleh pemikiran Mohammad Abduh khususnya tentang pandangan Abduh bahwa Islam merupakan suatu sistem sosial, pengertian tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa etika Islam menentang penjajahan, untuk menjayakan Islam tidak hanya dengan pemurnian ajaran Islam tetapi juga bisa berlaku melalui pemahaman ilmu pengetahuan barat.²⁸ Di antara para tokoh nasional yang sempat berhubungan pengaruhnya dengan Mohammad Natsir

25 Murjoko, *Mosi...*, hlm. 30.

26 Mohammad Natsir, "*Politik Melalui Jalur Dakwah*", dalam Memoar Senarai Kiprah Sejarah, Jakarta: Grafiti Press, 1993, hlm. 82.

27 Murjoko, *Mosi...*, hlm. 30.

28 Kahin, George Mc Turnan, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Yogyakarta: UNS Press, 1995, hlm. 54-55.

nampaknya dengan A. Hasan lebih banyak komunikasi dan diskusi tentang agama dan politik dengan beliau.

2.1.6. Karya Tulis

Sebagai seorang ulama yang juga intelektual dan negarawan sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan dengan buah karya yang monumental serta dapat dipetik hasilnya berabad-abad bagi anak bangsa Islam di muka bumi. Semenjak muda lagi Mohammad Natsir sudah mulai menulis di berbagai media cetak dalam berbagai issue. Adakalanya tulisan tersebut berkenaan dengan ramuan sosial kemasyarakatan, terkadang tentang politik, tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan Islam, dan lainnya.

Tidak sedikit juga tulisan Mohammad Natsir yang sifatnya terpaksa ditulis karena ada tulisan orang lain yang tidak selaras dengan pikirannya sehingga beliau menulis tulisan tertentu untuk mengkonter tulisan orang yang terkadang menyudutkan Islam, atau menyudutkan bangsa, atau tersalah dari konsep ilmu pengetahuan. Di antara tulisan Mohammad Natsir yang sengaja ditulis untuk mengkonter non muslim yang menyudutkan Islam adalah; Qur'an en Evangelie dan Mohammad als Profeet. Dua tulisan tersebut merupakan karya paling awal dipublikasikan dalam surat kabar

berbahasa Belanda; *Aglemeen Indische Dabblad* (AID) sebagai sanggahan ceramah pendeta Christoffels yang banyak menyudutkan Islam dalam media tersebut.²⁹

Selain itu Mohammad Natsir juga sering berdebat lewat tulisan dengan Ir. Soekarno berkaitan dengan konsep negara di mana Soekarno berdiri atas konsep negara sekuler sementara Mohammad Natsir berpijak pada konsep negara Islam. Debat yang berkepanjangan semacam itu berujung kepada terbentuknya Badan Konstituante dalam masa pemilu 1955 sehingga berakhir tahun 1959 ketika lahirnya dekrit presiden yang mengharuskan Indonesia kembali kepada UUD 1945 dan dibubarnya Badan Konstituante. Badan Konstituante bekerja semenjak tahun 1966 sampai 1969 tidak mampu mewujudkan kesepakatan para anggota untuk menetapkan dasar negara yang representatif bagi bangsa Indonesia. Semua itu terjadi karena banyaknya anggota Badan Konstituante yang beragama Islam tetapi berpikiran sekuler yang menolak Islam sebagai dasar negara.

Kedua tulisan Mohammad Natsir tersebut (Qur'an en Evangelie dan Mohammad als Profeet) kemudian oleh gurunya A. Hassan menerbitkan ulang dalam bentuk buku atas nama Komite Pembela Islam. Tahun 1930 Mohammad Natsir menulis buku lain dengan judul;

²⁹ Murjoko, *Mosi...*, hlm. 36.

Komt tot het Gebed dan Hayya 'ala Shalah. Dalam tahun 1931 beliau menulis buku dalam bahasa Indonesia dengan judul; Kebangsaan Muslim, dan tahun 1932 menulis buku berjudul; Goulden Regelts ult de Qur'an. Dalam karya-karya tersebut beliau menghuraikan persoalan-persoalan Islam yang bagus sajiannya untuk para anak bangsa didikan barat sehingga mereka tidak sesat dalam memahami Islam.

Pada tahun 1933 Mohammad Natsir menerbitkan buku lain berjudul; *De Islamietischo Vrouw en haar Rechten*, tahun 1938 dalam bahasa Indonesia menerbitkan buku dengan judul; *Cultuur Islam*, tahun 1939 menerbitkan buku berjudul; *Dengan Islam ke Indonesia Mulia*, dan tahun 1948 menulis buku berjudul; *Islam Sumber Bahagia*, serta buku dengan judul; *Kebudayaan Islam*.³⁰ Sebahagian buku-buku tersebut ditulisnya sebelum dan pada awal kemerdekaan ketika belum banyak orang mau, mampu dan berani menulis, apalagi yang sifatnya mengkonter tulisan-tulisan orang lain seperti yang dilakukan Mohammad Natsir.

Banyak karya tulis Mohammad Natsir lainnya yang sudah beredar di pasar-pasar berkaitan dengan berbagai issue, baik yang diterbitkan ketika beliau masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Tidak sedikit buah karya beliau dari data berupa manuskrip, berupa

30 *Ibid.*

konsep, dan pidato-pidato yang kemudian diramu kembali oleh pihak-pihak terkait seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang didirikan beliau sendiri menjadi buku. Tiga buku besar yang diberi nama Capita Slekta 1, 2, dan 3 yang dijadikan buku oleh kawannya dari sejumlah pidato, ceramah, dan hasil seminar yang pernah dipaparkan Mohammad Natsir. Dengan demikian, setiap orang yang mau mengenal pikiran dan pemikiran Mohammad Natsir mudah saja dengan membaca tiga jilid Capita Slekta tersebut, karena kandungannya melingkupi berbagai issue yang berkembang waktu itu dan masih relevan untuk masa kini.

Sesungguhnya sangat sulit dihitung jari berapa banyak karya tulis Mohammad Natsir yang sudah diterbitkan dan beredar dalam masyarakat sampai hari ini, karena selain penerbitnya yang berbeda-beda, pihak yang mensponsoripun tidak pernah sama. Yang jelas karya tulisnya melingkupi berbagai issue, mulai dari issue partai politik, kenegaraan, pemikiran, kebudayaan, filsafah, peradaban, ekonomi, pendidikan, dakwah Islamiyah, organisasi, dan lainnya. Sebahagian besar buku-bukunya masih beredar di pasaran hingga hari ini dan sebahagian besarnya kini diterbitkan ulang oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

2.1.7. Produk Hukum³¹

Beberapa produk hukum yang sempat terjadi ketika Mohammad Natsir berkuasa atau memegang jabatan di Indonesia antara lain adalah; ketika menjadi Perdana Menteri yang ke 13 atau Perdana Menteri pertama dalam NKRI hasil Mosi Integral Mohammad Natsir;

1. Pencabutan UU darurat nomor 6 tentang pembentukan jabatan Gubernur Militer ibukota dengan UU nomor 33 tahun 1950 pada tanggal 28 Oktober 1950. Inti UU nomor 33/1950 tersebut adalah; (1) bahwa kekuasaan dan kewajiban gubernur Militer di ibukota diserahkan pada instansi sipil dalam urusan non militer, (2) sedangkan urusan militer diserahkan kepada instansi militer yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan, (3) semua peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya akan segera dicabut lagi.
2. Penetapan UU Darurat nomor 34 pada tanggal 10 November 1950 tentang pengubahan UU Darurat nomor 25 tahun 1950 tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai RIS;
3. UU Darurat nomor 40/1950 pada tanggal 30 Desember 1950 tentang surat perjalanan Republik Indonesia. Inti UU tersebut adalah (1) penjelasan tentang jenis-

31 Murjoko, *Mosi...*, hlm. 38-39.

jenis pasport, (2) perpanjangan dan persyaratan pembuatan pasport;

4. UU. Nomor 24/1950 tentang Bea Imigrasi;
5. UU nomor 8/1950 pada tanggal 4 November 1950 tentang seluk beluk perjanjian Republik Indonesia dengan Bank Ekspor dan Import of Washington. Inti undang-undang tersebut adalah (1) Menteri Keuangan diberi kewenangan mengadakan pinjaman atas jaminan Republik Indonesia dengan syarat disahkan terlebih dahulu oleh DPR RI;
6. Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1950 tentang pemberian penggantian pembayaran uang penginapan dan makan di rumah penginapan bagi kalangan Menteri Peraturan Pemerintah ini adalah merupakan solusi bagi para Menteri yang tidak punya penginapan dengan dijamin oleh negara
7. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1950 tentang hubungan bidang ekonomi Indonesia dengan pihak luar negeri
8. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1950 tentang penggajian Wakil Perdana Menteri;
9. Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1950 tentang penggajian Wakil Presiden RI;
10. dll.

2.1.8. Penghargaan

Setiap orang yang hidup di bumi ini selalunya tidak terlepas dengan jasa-jasanya dari hasil kerja dan hasil karya yang dilakukan selama hidupnya. Manifestasi hasil kerja dan hasil karya semacam ini terkadang ada pihak yang berusaha untuk menghargainya dalam bentuk sebuah kehormatan atas tanda jasa yang pernah ada. Tanda jasa dalam bentuk penghargaan itu sering kita dapati diperoleh oleh orang-orang yang sudah berhasil melakukan sesuatu baik dalam bentuk prestasi keilmuan, pekerjaan, kekuatan, pertahanan, permainan, pertandingan, perlombaan dan semisalnya.

Sebagai salah seorang pemain dalam arena politik bangsa, juga pemain dalam perjuangan Islam, Mohammad Natsir merupakan salah seorang yang berhak menerima penghargaan dan tanda, jasa terutama sekali dari pemerintah Republik Indonesia dan dunia internasional, terutama sekali dunia Islam di mana beliau sendiri pernah menjadi pimpinan dalam beberapa organisasi Islam peringkat dunia.

Penghargaan demi penghargaan yang pernah diterima oleh Mohammad Natsir di antaranya adalah:

1. Menerima bintang Nichan Istikhar (Grand Gordon) dari Presiden Tunisia, Lamine Bey atas jasa-jasanya

dalam membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara pada bulan Januari 1957.

2. Menerima hadiah penghargaan international (Jaa izatul Malik Faisal al Alamiyah) dari lembaga Hadiah Internasional Malik Faisal di Saudi Arabia atas jasanya di bidang pengkhidmatan kepada Islam dalam tahun 1980. Lembaga tersebut sebelumnya juga pernah memberikan penghargaan kepada ulama besar India; Syekh Abul Hasan an-Nadwi dan Syekh Abul A'la Al Maududi.
3. Menerima gelar doktor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia.
4. Menerima gelar doktor Honoris Causa dari Universitas Sience, Pulau Pinang, Malaysia.
5. Mendapatkan penghargaan Bintang Adipradana pada masa pemerintahan presiden B.J. Habibie bersama dengan beberapa orang tokoh Masyumi dan pejuang kemerdekaan RI seperti Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap pada tahun 1999.
6. Namanya pernah disebut dalam sidang tahunan MPR pada masa pemerintahan Megawati untuk direhabilitir nama baiknya bersama dengan sejumlah tokoh-tokoh nasional lainnya terutama sekali terkait dengan gerakan pemberontakan Pemerintah Revolusioner

Republik Indonesia (PRRI).³²

7. Dan sejumlah tanda jasa serta penghargaan lainnya yang tidak terliput oleh kita di sini terutama sekali penghargaan dalam skala lokal atau regional.

2.1.9. Jabatan-jabatan yang pernah diduduki

Sebagai seorang aktifis intelektualis yang Islamis, Mohammad Natsir sejak muda lagi sudah menduduki sejumlah jabatan yang pada waktu itu tidak banyak orang dan tokoh masyarakat lainnya dapat menduduki pada jabatan-jabatan sebagaimana yang diduduki Mohammad Natsir. Sudah barang tentu untuk mendapatkan suatu jabatan itu haruslah dimulai dari karir-karir tertentu dalam masyarakat sehingga masyarakat menaruh perhatian dan harapan kepadanya. Begitulah yang terjadi dalam kehidupan Mohammad Natsir yang tidak henti-hentinya beramal untuk agama, ummah, bangsa dan negara sehingga masyarakat menaruh harapan padanya, dari harapan-harapan masyarakat itulah beliau mendapatkan sejumlah jabatan yang tidak dimiliki oleh setiap orang.

Ketika berada di Bandung dan aktif dalam organisasi Jong Islamiten Bond (JIB), Mohammad Natsir dipercaya menjadi ketua JIB di sana dalam tahun 19.

³² *Ibid*, hlm. 37-38.

Masih di Bandung juga Mohammad Natsir menjadi pimpinan Pendidikan Islam (Pendis) yang didirikannya sendiri untuk memajukan pendidikan Islam bagi anak bangsa yang pada waktu itu dipenuhi oleh pendidikan sekuler ciptaan Belanda seperti Mulo, HMS dan sebagainya. Pendis sengaja diwujudkan semata-mata untuk mengimbangi ilmu pengetahuan sekuler yang dikembangkan Belanda melalui sekolah-sekolah non Islam yang didirikan mereka di merata tempat di nusantara.

Pasca kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda Mohammad Natsir sempat menduduki sejumlah jabatan dalam negara seperti; Anggota Badan Pekerja KNIP dalam tahun 1945-1946. Beliau juga sempat menduduki Menteri Penerangan dalam tahun 1946-1949, Ketua Umum Partai Masyumi dalam tahun 1949-1958. Perdana Menteri Republik Indonesia didudukinya dalam tahun 1950-1951. Jabatan ini diperolehnya sebagai hadiah dari presiden Soekarno kepadanya lantaran beliau berhasil mempersatukan Indonesia dari RIS menjadi NKRI. Jadi, usaha-usaha yang dilakukan beliau betul-betul amat fundamental dan monumental.

Selain itu Mohammad Natsir juga pernah menduduki kursi anggota parlemen Indonesia tahun 1950-1958 dan anggota Konstituante Republik Indonesia dalam tahun 1956-1958. Manakala presiden Soekarno semakin

dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), sebagai Ketua Umum partai Masyumi terus memberi masukan atas kebijakan presiden yang tidak menguntungkan Islam, dengan sikap idealisnya kemudian Mohammad Natsir ditangkap oleh Soekarno bersamaan juga dengan dipaksa bubar partai Masyumi dalam tahun 1960.³³

Ketika lepas dari jeritan penjara Soekarno lebih kurang dua tahun lamanya dan Soekarno meninggal, Mohammad Natsir bersama kawan-kawannya berupaya menghidupkan kembali partai Masyumi namun upaya mulia tersebut menemui jalan buntu dan gagal tidak berkesinambungan. Tidak kehilangan akal pikiran dengan kegagalan tersebut Mohammad Natsir kemudian mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada tanggal 26 Februari 1967. Media dakwah tersebutlah yang menjadi wasilah perjuangan politik dan gerakan dakwah beliau bertahun-tahun sehingga menemui ajal pada tanggal 6 Februari 1993.

Kalau kita rincikan secara berurut jabatan-jabatan yang pernah diduduki Mohammad Natsir sesuai dengan yang dipaparkan dalam buku M. Natsir di panggung sejarah republik,³⁴ adalah sebagai berikut:

³³ Abdul Kadir Badjuber, *Dakwah Ilallah M. Natsir, Interpretasi untuk Langkah Dakwah Masa Kini*. Jakarta: STID Mohammad Natsir, tt., hlm. 20-21.

³⁴ Lukman Hakiem, *M. Natsir di panggung sejarah republik*, Jakarta: Republika.

- Tahun 1928-1932 menjadi Ketua Jong Islamieten Bond di Bandung.
- Tahun 1932-1942 menjadi Direktur Pendidikan Islam Bandung di Bandung.
- Tahun 1940-1942 Anggota Dewan Kabupaten Bandung.
- Tahun 1942-1945 menjadi Kepala Biro Pendidikan Kotamadya Bandung (Bandung Syiakusro).
- Tahun 1945-1946 menjadi Anggota Badan Pekerja KNIP.
- Tahun 1946-1949 menduduki jabatan Menteri Penerangan RI.
- Tahun 1949-1958 menjabat sebagai Ketua Umum Partai Masjumi.

Tahun 1950 Ketika menjadi Ketua Fraksi Masjumi di DPR RIS Mohammad Natsir mengajukan mosi untuk meninggalkan RIS dan kembali ke NKRI sesuai dengan proklamasi 1945. Mosi tersebut diterima secara aklamasi oleh anggota DPR RIS dan kemudian gerakan tersebut populer dengan nama Mosi Integral Mohammad Natsir.

- Tahun 1950-1951 menjadi Perdana Menteri RI pertama setelah Indonesia beralih dari RIS ke NKRI.
- Tahun 1950-1958 menjadi anggota Parlemen RI.

- Tahun 1956-1958 menjadi anggota Badan Konstituante RI
- Tahun 1958-1960 menjadi anggota Pemerintah
- Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).Tahun 1960-1962 dikarantina di Batu (Jawa Timur).
- Tahun 1962-1966 ditahan di RTM/Keagungan Jakarta
- Tahun 1967 Vice President World Muslim Congress yang bermarkas di Karachi.
- Tahun 1967 menjadi Ketua Umum Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
- Tahun 1968 menjadi anggota Muslim World League (Rabithah Alam Islami Makkah).
- Tahun 1976 menjadi anggota A'la Al-Alami lil Masjid (Dewan Masjid Sedunia) yang bermarkas di Makkah.

Selain itu Mohammad Natsir juga pernah menerima penghargaan di bidang perjuangan Islam dari King Faisal Foundation di Riyadh. Usaha fundamental lain yang pernah dilakukan adalah menandatangani pernyataan keprihatinan (Petisi 50) yang mengkritik dua pidato Presiden Soeharto tentang Pancasila, semenjak itulah beliau dan kawan-kawan dari Petisi 50 tersebut dikebiri hak-hak azasinya dan hak-hak sipilnya, sehingga

beliau menembuskan nafar terakhir tahun 1993 di Jakarta. Pernah juga menerima Bintang Republik Indonesia Adipradhana dalam tahun 1998. Terakhir dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Mohammad Natsir diangkat menjadi Pahlawan Nasional tahun 2008.

2.2. Sejarah dan Latar Belakang Mosi Integral

Mohammad Natsir

Dalam upaya mengantisipasi Republik Indonesia Serikat (RIS) bentukan Belanda lewat inisiatif Van Mook hasil Konferensi Meja Bundar Selasa 23 Agustus 1949 bersamaan dengan 27 Syawal 1368 H,³⁵ Mohammad Natsir melahirkan ide kontrasepsi dengan RIS yang kemudian populer dengan nama Mosi Integral Mohammad Natsir. Mosi tersebut lahir semata-mata untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan meleburkan semua negara bagian ciptaan Van Mook. Mosi Integral Mohammad Natsi mampu dan berhasil merubah wajah negara Indonesia dari bentuk RIS kepada NKRI. Untuk itu semua sangat amat layaklah kalau diberi penghargaan kepada Mohammad Natsir sebagai bapak NKRI.

Dalam upaya mewujudkan NKRI lewat Mosi

35 Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, jilid dua, cetakan ketiga, Bandung: Surya Dinasti, 1439/2018, hal. 280.

Integralnya Mohammad Natsir berupaya dan mengajak pihak-pihak yang mendirikan dan mendukung konsep negara bagian untuk meleburkan diri menjadi NKRI. Termasuklah mengirim A. Hassan sebagai pimpinan Persatuan Islam (PERSIS) menjumpai Karto Suwiryo sebagai inisiator dan deklarator DI/TII di Bandung guna memintanya untuk membubarkan DI/TII dan bergabung dalam NKRI. Namun Karto Suwiryo tidak mau meleburkannya dan tetap berjuang untuk mendirikan negara Islam Indonesia yang berakhir dengan kematiannya dalam perjuangan tersebut.³⁶

Dalam upaya persiapan kemerdekaan Indonesia, para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ketika membahas rancangan Undang-undang Dasar, muncul juga pemikiran tentang bentuk negara sebagai salah satu materi yang dibicarakan serius. Muncul dua ide sebagai dua usulan dari para anggota rapat tat kala itu, yaitu usulan Indonesia sebagai negara federasi dan Indonesia sebagai negara kesatuan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Mohammad Hatta merupakan salah satu anggota BPUPKI yang mendukung bentuk negara federal. Namun setelah terjadi voting di antara anggota BPUPKI hasilnya 17% yang mendukung negara federasi dan 83% yang mendukung negara kesatuan, itulah yang seterusnya

³⁶ Ahmad Mansur Suryanegara, *Ibid*, hal., 315.

dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945.³⁷

Perbincangan bentuk negara Indonesia itulah yang kemudian menjadi cikal bakal Mosi Integral Mohammad Natsir karena terjadinya upaya pembentukan negara federasi oleh penjajah Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang dideklarasikan oleh Soekarno-Hatta. Penjajah Belanda ingin terus menjajah Indonesia sebagaimana sebelum diambil alih oleh Jepang dalam tahun 1942 disebabkan kalahnya tentera sekutu termasuk Belanda pada awal-awal perang Pasifik.

Tahun 1946 Belanda masuk kembali ke Indonesia secara sepihak mengatasnamakan Jepang yang sedang berkuasa yang sebelumnya telah mengambil kekuasaan dari pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia). Pada masa itulah bergejolak kembali perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda sampai terjadinya Agresi Belanda Pertama tahun 1947 dan Agresi Belanda kedua tahun 1948 yang gagal. Perjuangan rakyat Indonesia itu berlanjut dengan dua taktik dan strategi, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi sehingga terjadinya perundingan demi perundingan dalam kurun waktu 1945-1949.

37 Mohd. Mahfud MD, *Mosi Integral Natsir dan sistem Ketatanegaraan Kita*, dalam 100 Tahun Mohammad Natsir berdamai dengan sejarah, Jakarta: Republika, 2008, hlm. 187-188.

Dalam Perjanjian Linggar Jati tanggal 15 November 1946 Belanda memperkenalkan konsep negara federal Indonesia dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai perubahan dari NKRI. Konsep negara RIS tawaran Belanda tersebut melingkupi; Republik Indonesia, Negara Kalimantan, dan Negara Indonesia Timur. Setelah Perjanjian Linggar Jati lahir Perjanjian Renville,³⁸ pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI),³⁹ perjanjian Roem-Roijen,⁴⁰ dan

38 Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook.

39 PDRI dalam tahun 1948 manakala terjadinya Agresi Belanda kedua dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara sebagai presiden. Manakala Jakarta dan Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda serta Soekarno dan Mohammad Hatta ditahan Belanda maka ditunjuklah Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden PDRI yang berdomisili sementara di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat juga jatuh ke tangan Belanda maka Presiden PDRI bersama sejumlah pembesar Indonesia baik dari Jakarta maupun dari Yogyakarta berhijrah dan bermastautin di Koetaradja (sekarang Banda Aceh). Pada waktu itulah Aceh mengambil peran hebat membiayai makan minum, sandang pangan bagi mereka semua.

40 Perjanjian Roem-Roijen (juga disebut Perjanjian Roem-Van Roijen) adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan HB IX terhadap Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan "Jogjakarta is de Republiek Indonesie" (Yogyakarta adalah Republik Indonesia)

Komperensi Meja Bundar (KMB).

Hakikat wujudnya KMB di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 adalah untuk mengakhiri konfrontasi antara Indonesia dengan Belanda dengan kandungan utamanya adalah pengakuan atau penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda sebagai penjajah kepada pemerintah Indonesia sebagai terjajah yang disepakatiakah disusun dalam bentuk negara federal yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Ada dua tanggapan yang muncul setelah terjadinya KMP di mana pihak Indonesia menyatakan bahwa itu merupakan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara pihak Belanda mengklaim bahwa KMB 1949 merupakan penyerahan kedaulatan (kemerdekaan) dari Belanda kepada Indonesia karena sebelumnya Belanda menganggap masih menjajah Indonesia dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Selain itu ada empat hal penting lain yang menjadi kandungan dan kesepakatan dalam KMB adalah; **pertama**, pembentukan Uni Belanda-RIS yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis; **kedua**, Soekarno dan Hatta akan menjabat presiden dan wakil presiden RIS untuk tahun 1949-1950 dan Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri; **ketiga**, Irian Jaya masih dikuasai oleh Belanda dan tidak dimasukkan kedalam RIS sampai

ada perundingan selanjutnya; keempat, pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.⁴¹

Sepintas lalu terkesan bahwa hasil KMB itu sudah menguntungkan Indonesia karena mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari mantan penjajahnya, Belanda. Namun di sisi lain karena negara yang diakui Belanda itu dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka tersembunyi misi mantan Gubernur Militer Belanda, Van Mook untuk memecahbelah kembali Indonesia Serikat tersebut. Apalagi di dalam Indonesia sendiri muncul pergolakan di parlemen berkenaan dengan hasil KMB yang merubah status negara kesatuan Indonesia menjadi RIS.

Dalam kondisi semacam itu pemerintah lebih banyak diam dan tidak menanggapi pergolakan yang muncul. Hanya menyerahkan kepada rakyat secara serta merta apa yang sedang terjadi sebagai efek dari hasil KMB. Padahal kalau semua itu diserahkan kepada rakyat maka macam-macam akan terjadi termasuk disintegrasi sesama bangsa. Dalam situasi dan kondisi semacam inilah Mohammad Natsir hadir dengan konsep Mosi Integralnya yang meminta pemerintah dan seluruh elemen bangsa segera menyelesaikan masalah tersebut secara integral. Upaya Mohammad Natsir itulah

41 Mohd. Mahfud MD, *Mosi Integral...*, hlm. 188-190.

yang kemudian populer dengan istilah Mosi Integral Mohammad Natsir.

Mosi Integral Mohammad Natsir tersebut selain ditandatangani oleh Mohammad Natsir sendiri sebagai ketua fraksi partai Masyumi yang sekaligus pencetus mosi tersebut, juga ditandatangani oleh wakil-wakil lain sebagai ketua fraksi di parlemen seperti; Soebadio Sastrasatomo, Hamid Algadri, Sakirman, K. Werdojo, A. M. Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto B., Sahetapy Engel, Tjokronegoro, Moch. Tauchid, Amels, dan Sirajuddin Abbas. Namun demikian mosi ini lebih populer dengan nama Mosi Integral Mohammad Natsir dan tiada yang mempersoalkannya karena ide asalnya dari beliau dan beliau juga yang berupaya turun ke berbagai provinsi untuk meyakinkan para pemimpin di provinsi untuk mengakuinya dan membulatkan bentuk negara dari RIS menjadi NKRI.⁴²

Dengan demikian, bentuk negara Indonesia semenjak merdeka sampai hari ini mengalami tiga kali perubahan. Yang **pertama** bentuk negara adalah kesatuan sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan; yang **kedua**, selaras dengan UUD RIS pasal 1 ayat (1) menyebutkan; Negara Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat (RIS); yang ketiga adalah berdasarkan UUDS 1950 pasal

42 *Ibid*, hlm. 190-191.

1 ayat (1) berbunyi Negara Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan.⁴³

Perbincangan pemikiran antara negara federasi dengan negara kesatuan Indonesia betul-betul memakan waktu panjang sehingga mengalami lima kali perdebatan yang tercatat dalam sejarah bangsa.⁴⁴ **Perdebatan pertama** terjadi dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 di mana Mohammad Yamin berpendapat bahwa sebuah struktur politik berdasarkan federalisme akan menyebabkan negara-negara provinsi bakal menjadi pemecahbelah negara kesatuan Indonesia. Atas dasar pikiran inilah Mohammad Yamin menolak federalisme dan mendukung negara kesatuan. Perdebatan pada waktu itu tidak terlalu tajam karena pihak yang mendukung federasi seperti Mohammad Hatta dan Latuharhary tidak lagi memberi sanggahan.

Debat kedua terjadi dalam tahun 1949 selaras dengan terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Momentum ini memunculkan debat serius untuk memberikan status negara Indonesia antara negara kesatuan dengan negara federasi. Debat tersebut

⁴³ Lihat Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Tiga Undang-undang Dasar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

⁴⁴ Murjoko, *Mosi...*, hlm. 5-6.

kemudian mewujudkan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sesuai dengan keinginan Belanda yang menjadi hasil dari KMB. Hasil tersebut disepakati semata-mata untuk menghentikan konfrontasi fisik antara bangsa Indonesia dengan penjajah Belanda yang sudah berjalan lama. Para pendukung federasi pada masa ini mengungkapkan alasan-alasan bahwa masing-masing wilayah di Indonesia dapat mengembangkan keunikan dan kekhususan wilayahnya sesuai dengan adat, budaya dan etniknya masing-masing, alasan ini sebenarnya berasal dari pemikiran pemerintah Belanda yang diterajui oleh Van Mook, yaitu dengan mendirikan negara-negara boneka Belanda di Indonesia. Sementara penerimaan hasil KMB oleh Indonesia tatkala itu hanya sekedar mendapatkan keabsahan eksistensi negara Indonesia di permukaan bumi ini.

Debat ketiga berkenaan susunan negara federal dengan negara kesatuan terjadi dalam tubuh Konstituante dalam tahun 1957. Pada masa demokrasi liberal ini partai-partai yang mendukung federal seperti Masyumi, PSII, Partai Buruh, dan Parkindo tidak berjaya memperjuangkan konsep negara federasinya. Masyumi berpendapat; dengan konsep negara federasi akan dapat melindungi Indonesia dari pemerintahan yang otoritarian.

Debat keempat berkenaan dengan negara

federasi dengan negara kesatuan berlangsung pada masa tumbangnya presiden Soeharto pasca bulan Mei 1998. Pada masa reformasi tersebut muncul rasa anti konsep sentralisasi kekuasaan yang dominan di ibukota sehingga daerah cenderung menjadi penonton apa yang dilakukan pusat. Akibatnya tensi dan frekwensi separatisme naik meningkat seperti di Aceh, Irian Jaya, dan juga sempit muncul di Riau yang diprakarsai oleh Dr. Tabrani. Dalam kesempatan semisal itu pemikiran tentang konsep negara federasi mencuat tinggi dan anti negara kesatuan juga dibenci.

Debat kelima muncul ketika terjadi pembahasan amandemen UUD 1945 pada sidang tahunan MPR RI tahun 2002 dengan ketentuan memberikan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat kalau melakukan perubahan susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi susunan negara federasi. Dalam tubuh masyumi sendiri pemikiran negara kesatuan dengan negara federasi bertembung antara ketuanya (Mohammad Natsir) lebih cenderung kepada negara kesatuan berbangding dengan partainya yang lebih cenderung kepada konsep negara federasi.

Ada issue menarik berkenaan dengan Mosi Integral Mohammad Natsir tanggal 3 April 1950 adalah, bahwa masyarakat beranggapan bahwa mosi tersebut merupakan sebuah usaha original Mohammad Natsir

untuk mengembalikan status negara Indonesia menjadi negara kesatuan setelah berantakan dengan konsep negara federasi yang diprakarsai oleh Van Mook. Dalam konsep Mosi Integral Mohammad Natsir tersebut sebetulnya tidak ada ajakan langsung terhadap bangsa Indonesia untuk kembali kepada negara kesatuan. Pilihan kembali kepada negara kesatuan dalam konsep Mosi Integral Mohammad Natsir hanya dianggap sebagai pilihan yang paling tepat dari semangat dan substansi mosi tersebut pada saat itu yaitu integrasi bangsa. Malah dalam mosi tersebut Mohammad Natsir beberapa kali menyampaikan bahwa kandungan mosi tersebut tidak ada hubungannya dengan kontroversi tentang negara kesatuan dan negara federasi.⁴⁵

2.3. Keberadaan, Harapan, Ancaman dan Tantangan Mosi Integral Mohammad Natsir

Eksistensi atau keberadaan Mosi Integral Mohammad Natsir pada awalnya oleh sebahagian orang tidak dianggap sesuatu yang membawa efek besar terhadap eksistensi negara Republik Indonesia. Karena ide tersebut murni lahir dari akal pikiran Mohammad Natsir sendiri yang pada waktu itu juga tidak sejalan dengan sikap dan pemikiran partai Masyumi yang belai

⁴⁵ Mohd. Mahfud MD, *Mosi Integral...*, hlm. 191.

menjadi anggotanya di sana. Sejarah mencatat, partai Masyumi lebih berpihak kepada pikiran bentuk negara federalis ketimbang unitarian, tetapi Mohammad Natsir sendiri memilih pemikiran unitarian.

Terdapat kesenjangan antara pemikiran seorang tokoh dalam satu partai dengan sikap dari partai itu sendiri. Dalam ranah politik konvensional kondisi semacam ini biasanya akan berakhir dengan dua kesimpulan; tokoh tersebut akan hengkang/dihengkangkan dari partai, atau sang tokoh yang menguasai partai secara mutlak. Walaubagaimanapun, untuk kasus Mosi Integral Mohammad Natsir malah yang terjadi di luar kebiasaan yang kita gambarkan di belakang tersebut.

Mohammad Natsir berjaya meyakinkan sejumlah orang di parlemen untuk menandatangani mosi tersebut dan kemudian hasil tandatangan tersebut dapat melegalkan istilah NKRI sebagaimana yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sungguh sangat luar biasa hasil kerja seorang Mohammad Natsir untuk menyelamatkan sebuah negara yang bernama Indonesia dari upaya-upaya politik *divide et impera* (politik pecah belah) yang diprakarsai penjajah Belanda.

Tanggal 3 April 1950 Mohammad Natsir membacakan Mosi Integralnya di parlemen Indonesia, dengan pembacaan tersebut yang kemudian diterima oleh

anggota parlemen membuat negeri Indonesia bergelar NKRI kembali sebagaimana deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan mosi integral tersebut juga Soekarno mengizinkan Mohammad Natsir menjadi Perdana Menteri pertama setelah agresi Belanda kedua, dan dengan itu pula nama besar dan gezah Mohammad Natsir tercatat dengan tinta emas dalam sejarah anak bangsa Indonesia, khususnya anak bangsa Islam yang searah dan sepemikiran dengannya.

Semenjak Indonesia dinyatakan merdeka lewat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, penjajah Belanda terus menerus merongrong negara yang masih bayi ini dan tidak diakui kemerdekaannya. Mereka memprovokasi bahwa mereka masih menguasai Indonesia dengan melancarkan agresi pertama tahun 1947 dan agresi kedua tahun 1948. Suasana dikondisikan Belanda lewat perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang mencabik-cabik Indonesia. KMB menetapkan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berpusat di Yogyakarta dengan 15 negara bagian lainnya minus Irian Barat.

Dalam situasi semacam itu ide cemerlang lahir dari kepala seorang ulama yang juga sebagai seorang negarawan bernama Mohammad Natsir. Menurut beliau untuk menyelamatkan Indonesia dari ambang kehancuran hanya dengan kembali kepada bentuk

negara NKRI. Sekali lagi tepat pada tanggal 3 April 1957 dalam sidang parlemen DPRS Republik Indonesia Serikat Mohammad Natsir melahirkan pemikiran dan pandangannya mengajak untuk Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan. Dan itulah yang kemudian dikenal sebagai Mosi Integral Mohammad Natsir, pidato Mohammad Natsir di parlemen tersebut mendapat sambutan hangat dari semua anggota parlemen yang juga disetujui sepenuhnya oleh seluruh anggota DPRS-RIS.

Setelah berlalunya masa demi masa, waktu demi waktu, harapan demi harapan, maka wujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai hari ini. Kewujudan NKRI tersebut dimulai dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian dalam sejarah perjalanannya mengalami berbagai cobaan, perobahan, dan ancaman kehancuran. Dari NKRI penjajah Belanda dalam agresi keduanya tahun 1948 coba mengobrak abrik kembali NKRI dengan cara menghidupkan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang memecah-mecah NKRI menjadi negara-negara bagian untuk kemudahan politik mereka.

Di pulau Sumatera penguasa Belanda Van Mook membelah Sumatera menjadi Negara Bagian Sumatera Timur dan Negara Bagian Sumatera Selatan, di pulau Jawa didirikan Negara Pasundan,

Negara Bagian Jawa Timur, dan lainnya. Sementara untuk wilayah timur Indonesia Belanda mewujudkan Negara Bagian Indonesia Timur. Upaya keras Belanda semacam itu semata-mata dilakukan karena mereka sangat berhasrat untuk menguasai dan menjajah kembali Indonesia yang kaya raya ini setelah mereka terpaksa lari karena dikalahkan oleh penjajah Jepang dalam tahun 1942.

Ancaman lain terhadap Mosi Integral Mohammad Natsir setelah disetujui oleh DPRS-RIS tanggal 3 April 1957 adalah lahirnya Gerakan 30 September / Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Gerakan ini menyusup dalam tubuh TNI, DPR/MPR dan sejumlah lembaga negara lainnya dengan tujuan ingin menghancurkan NKRI dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Gerakan yang meledak tahun 1965 tersebut telah membunuh sejumlah jenderal, para ulama, tokoh masyarakat yang dianggap menjadi lawan mereka sehingga mereka mulus merobah status NKRI menjadi negara komunis.

Walaupun bagaimanapun, Allah belum mengizinkan rencana jahat mereka sehingga gerakan mereka dapat dihancurkan dan NKRI tetap utuh sampai hari ini. Ancaman ideologi komunis tersebut terasa sangat berat bagi NKRI mengingat adanya bantuan luar dari negara komunis Cina dan Uni Soviet yang secara terang-terangan memberikan berbagai bantuan kepada Partai Komunis

Indonesia (PKI) untuk melakukan kudeta dan merubah status NKRI menjadi Negara Komunis Indonesia (NKI).

Gerakan ideologi komunis secara besar juga pernah muncul di Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Muso. Pada masa itu Muso secara terang-terangan memberi nama NKRI dengan sebutan Indonesia Soviet, karena ia sangat bernafsu untuk mengkomunikasikan Indonesia. Gerakan tersebut terjadi setelah Muso belajar dan mendalami ideologi komunis puluhan tahun di Uni Soviet sebelum menggerakkan Madiun sebagai pusat praktik ideologi tersebut. Dalam masa itu Muso bersama dengan para pengikutnya telah membantai banyak ulama, tokoh masyarakat, para TNI, Polri, dan orang-orang yang tidak setuju dengan gerakan mereka.

Namun demikian, gerakan Muso di Madiun tersebut kemudian ditumpas oleh pemerintah Indonesia dengan mengeksekusi Muso dan menangkap para pengikutnya. Tetapi sebahagian dari kader mereka sempat lari dan bermarkas di Uni Soviet yang kemudian mereka kembali ke Indonesia memperkuat PKI dan terakhir meletus G30S/PKI di hujung tahun 1965. Bedanya antara gerakan Muso di Madiun dengan gerakan tahun 1965 yang dipimpin D.N. Aidit adalah; gerakan Muso hanya terbatas dengan wilayah Jawa Timur saja, sementara gerakan Aidit meluas seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ancaman ideologi komunis yang pernah mengancam NKRI tersebut menjadi duri dalam daging, api dalam sekam, dan gunting dalam lipatan manakala hari ini anak cucu mereka kembali mengekspresikan keyakinan orang tua mereka untuk menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Walaupun Indonesia masih memiliki undang-undang larangan terhadap ideologi komunis/atheis namun mereka tetap saja berani untuk menghidupkan kembali ideologi komunis yang pernah dipimpin D.N. Aidit tersebut. Sejumlah anak dan keturunan PKI sudah mulai berani bicara kebenaran PKI dan kesalahan Indonesia, ada juga kader PKI yang berani menulis buku: *Aku Bangga Jadi anak PKI*, *50 tahun Partai Komunis Indonesia*, *Anak PKI masuk Parlemen* dan sebagainya.

Tantangan yang membayangi eksistensi Mosi Integral Mohammad Natsir di antaranya yang paling awal adalah; Konferensi Malino. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli – 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (*Borneo*) dan Timur Besar (*De Groote Oost*). Walaupun jarak antara konferensi

Malino dengan Mosi Integral Mohammad Natsir sampai sebelas tahun lamanya, namun ia menjadi dasar hukum bagi pihak-pihak yang anti NKRI dan menyatu dengan negara bagian di Indonesia.

Tantangan lain yang bakal mengancam Mosi Integral Mohammad Natsir adalah adanya upaya pemberian angin segar kepada warga negara non pribumi yang dengan leluasa menguasai aset dan properti yang ada di Indonesia. Karena merasa sudah hebat sendiri mereka tidak segan-segan menghina rakyat Indonesia dan merancang untuk menguasai negara Indonesia yang diprediksikan akan diganti haluan dari NKRI menjadi bentuk lain sesuai dengan keinginan mereka.

Gerakan ini sangat massif, persuasif dengan para penguasa dan sangat strategis untuk tenggang waktu yang telah ditentukan. Mereka berupaya keras untuk menguasai ekonomi di Indonesia, kemudian memiliki properti sebanyak-banyaknya, lalu menguasai media baik media cetak, elektronik, maupun media sosial lainnya. Kemudian mereka menyusup kedalam sistem politik negara dan menguasai sistem politik mulai dari partai politik sampai kepada kedudukan dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang paling diencer mereka pada tahap ini adalah lembaga legislatif karena lembaga inilah yang paling strategis untuk merubah eksistensi sistem hukum, dan politik negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Yang ini merupakan tantangan yang paling menentang bagi eksistensi Mosi Integral Mohammad Natsir yang sekaligus tantangan bagi eksistensi NKRI itu sendiri. Karena gerakan non pribumi tersebut berkolaborasi dengan gerakan-gerakan pribumi yang mampu diperalat oleh mereka sehingga gerakan pribumi menjadi pihak yang meracun bangsa sendiri, menghancurkan negara sendiri yang tidak lebih seperti pemain bola yang memasukkan goal kegawang sendiri. Gerakan tersebut sangat amat berbahaya untuk NKRI karena mendapat sokongan dari pihak pribumi sendiri yang secara sistematis mereka menguasai negara hari ini.

Gerakan separatisme wilayah yang pernah muncul dari beberapa provinsi di Indonesia menjadi tantangan paling menentukan eksistensi NKRI pada zaman ini. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Irian Jaya, Gerakan Fretelin di Timor Timur yang hari ini sudah mandiri menjadi sebuah negara sendiri merupakan tantangan-tantangan yang sangat berbahaya bagi eksistensi NKRI yang diwujudkan via Mosi Integral Mohammad Natsir di Indonesia hari ini.

Apalagi OPM kelihatannya sangat aktif lagi ofensif terhadap keamanan Republik Indonesia yang

sering disebut harga mati oleh para pemimpinnya. Secara etnis penghuni wilayah Irian jaya sangat berbeda dengan penduduk Indonesia lainnya, secara adat budaya mereka memiliki adat dan budaya sendiri yang asing dari adat dan budaya Indonesia, agamapun mereka umumnya beragama Kristen yang fanatik dan membencikan penganut agama Islam yang mayoritas di Indonesia. Dari latar belakang tersebut gerakan OPM yang mereka perjuangkan tersebut sangat menjadi tantangan bagi eksistensi Moasi Integral Mohammad Natsir dan sekaligus bagi NKRI itu sendiri.

Selain itu mereka juga sangat merasa kecewa terhadap pemerintah Indonesia yang hari-hari merambah hasil alam mereka terutama tambang emas yang hasilnya tidak diperuntukkan untuk kemaslahatan penduduk Papua/Irian Jaya. Masyarakat OPM merasa sangat marah dan sakit hati terhadap pemerintah Indonesia dari masa ke masa karena memeras wilayah mereka dengan tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu bagi masyarakat papua NKRI itu tidak ada apa-apa buat mereka, maka mereka berupaya keras untuk melepaskan diri dari NKRI dan menjadikan Papua sebuah negara merdeka.

Lain halnya dengan Aceh yang dalam waktu lama diperas, dijarah hasil alamnya, didiskriminasi, dihina, dianiaya bangsanya, dan dibiarkan bangsanya terkapar

tanpa pendidikan dan layanan kesehatan oleh penguasa NKRI. Kondisi semacam itu terjadi semenjak Indonesia merdeka sampai lahir pemikiran ini sehingga muncullah gerakan separatis yang bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh tahun 1976. Walaupun gerakan tersebut secara resmi sudah berdamai dengan Indonesia tetapi kader-kader anti Indonesia masih sangat tersimpan di Aceh sebagai akibat ketidakadilan Indonesia terhadap Aceh. Gerakan ini sangat mengancam eksistensi NKRI dan Mosi Integral Mohammad Natsir pada masanya sebelum terjadinya perdamaian pada tahun 2005 yang lalu. Diperkirakan ide, pemikiran dan benih gerakan masih tersimpan dalam kehidupan bangsa Aceh sebagai akibat ketidakadilan yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia terhadap Aceh.

BAB III

MOSI INTEGRAL MOHAMMAD NATSIR, ANTARA TUJUAN DAN APLIKASINYA

3.1. Pengertian Mosi Integral Mohammad Natsir

Terminologi Mosi Integral Mohammad Natsir apabila diartikan secara harfiah harus dipisahkan dahulu kata demi kata karena ia terdiri dari empat perkataan. Secara epistimologi kata Mosi mengandung arti keputusan rapat, misalnya parlemen, yang menyatakan pendapat atau keinginan para anggota rapat.¹ Secara terminologi Mosi adalah suatu keputusan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah orang

¹ <https://kbbi.web.id/mosi> Diakses pada tanggal 3 September 2019.

berkaitan dengan sikap terhadap suatu masalah yang perlu dilakukan. Kalau dikatakan Mosi Kepercayaan, ia bermakna mosi yang menyatakan wakil rakyat percaya kepada kebijakan pemerintah (pengurus organisasi dan sebagainya); sedangkan Mosi tidak Percaya adalah; pernyataan tidak percaya dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan pemerintah.²

Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika, dan bersama dengan inversnya,³ menurut google integral adalah; *necessary to make a whole complete; essential or fundamental* (suatu keperluan untuk sebuah kesempurnaan menyeluruh secara esensial dan fundamental. Sementara integral dalam upaya nyata Mohammad Natsir terhadap eksistensi NKRI adalah perpaduan kesatuan sebuah negara Indonesia yang melingkupi seluruh wilayah yang ada dalam negara Indonesia yang hari ini berbatas dari Sabang sampai Marouke.

Makna Mohammad (Mohammad) adalah terpuji, sedangkan pengertian Natsir (Nashir) adalah penolong, kalau digabung keduanya mengandung makna Penolong yang Terpuji. Sesuai dengan namanya Mohammad Natsir, beliau betul-betul menjadi seorang penolong bagi negara

² *Ibid.*

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Integral> Diakses pada tanggal 3 September 2019.

dan bangsa yang bernama Indonesia. Sepak terjang beliau baik terhadap negara maupun bangsa sudah teruji dan sudah tercatat dalam sejarah, beliau menyandang nama yang selaras dengan kerja nyata dalam kehidupannya yaitu penolong yang terpuji, semoga saja kehidupannya di alam baqa tetap terpelihara di hadapan Allah yang aMaha Kuasa.

Secara keseluruhan Mosi Integral Mohammad Natsir adalah satu kerja nyata beliau dalam upaya mengajak sejumlah ketua fraksi dalam parlemen Indonesia tahun 1950 untuk meninggalkan bentuk negara serikat (RIS) ciptaan Belanda dan menuju kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selaras dengan hasil proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Upaya Mohammad Natsir tersebut disetujui oleh parlemen sehingga mimpi Belanda untuk terus berkuasa di Indonesia menjadi hampa dan Indonesia secara lugas menjadi NKRI.

Pada satu sisi di masa awal kemerdekaan dalam tahun lima puluhan posisi Mosi Integral Mohammad Natsir menjadi sebuah karya monumental yang berharga tinggi karena telah berjaya membulatkan kembali Indonesia dari upaya cerai berai Belanda. Tetapi di sisi lain hari ini dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia menjadi malapetaka bagi wilayah-wilayah tertentu yang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah seperti Aceh, Riau, Irian Jaya, dan lainnya.

Tidak cukup sampai di situ, wilayah-wilayah yang bernama provinsi nyaris menjadi sapi perahan bagi NKRI yang tidak berlaku adil dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan negara. Disitulah bermulanya konflik dalaman internal dalam bentuk DI/TII muncul untuk meminta tebusan kerugian masing-masing wilayah seperti Jawa Barat tahun 1949, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan tahun 1950, Aceh tahun 1953, dan sejumlah wilayah lainnya. Namun semua upaya tersebut mengalami kegagalan dan provinsi-provinsi tersebut tetap menjadi bahagian dari wilayah Indonesia dan menjadi tanah tumpah darah NKRI.

Pada tanggal 3 April 1950 Mohammad Natsir membacakan Mosi Integralnya di parlemen seraya mengajak bangsa Indonesia untuk meninggalkan RIS dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pidato Mohammad natsir di parlemen tersebut mendapat sambutan baik dari parlemen dengan menyetujuinya secara langsung dan mendapat dukungan penuh dari eksekutif dan legislatif. Itulah puncak wujudnya Mosi Integral Mohammad Natsir yang diperbincangkan banyak orang sampai hari ini.

Sebagai latarbelakangnya adalah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Belanda terus menerus berupaya untuk menguasai Indonesia kembali lewat agresi pertamanya tahun 1947

dan agresi keduanya tahun 1948. Gagal di dua agresi tersebut akhirnya melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Republik Indonesia dengan pemerintahan Hindia Belanda di Den Haag memutuskan Indonesia merupakan Negara Indonesia Serikat (RIS) karena sa'at itu sudah berdiri sejumlah negara bahagian. Sudah barang tentu pihak Belanda merasa sangat memungkinkan untuk dijadikan Indonesia sebagai negara kesatuan.

3.2. Penyebab Lahirnya Mosi Integral Mohammad Natsir

Sebagai seorang ulama yang juga negarawan, Mohammad Natsir memiliki kemahiran tersendiri dalam melihat dan mensikapi sesuatu persoalan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkhusus berkaitan dengan eksistensi negara Indonesia di awal kemerdekaan yang mengalami fenomena sangat beragam untuk mempertahankannya. Dalam menyikapi eksistensi negara tersebutlah Mohammad Natsir lahir sebuah ide kesatuan yang dituangkannya dalam konsep Mosi Integral di mana ianya didominasi oleh lima penyebab utamanya. Kelima penyebab tersebut yang disebutkan Murjoko⁴ adalah:

Penyebab pertama; Karena susunan negara Indonesia

⁴ Murjoko, *Mosi...*, hlm. 41-73.

pertama berbentuk kesatuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dengan bunyinya: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Awalnya rumusan tersebut diajukan oleh Soekarno dan kemudian disetujui oleh para pendiri bangsa ini, termasuk Mohammad Natsir yang sangat konsen dengan konsep negara kesatuan terhadap Indonesia. Menurut Soekarno untuk membentuk Negara Nasional⁵ Indonesia harus melalui tiga fase.

Fase pertama, berawal dari fase kesukuan yang yang ditandai oleh tiga ciri; *ciri pertama* adalah setiap suku merasa dirinya sebagai satu suku yang mutlak, *ciri kedua* adalah masing-masing suku hanya memikirkan keselamatan sukunya saja, *ciri ketiga* adalah munculnya semangat ide kepulauan dari suku tersebut. Dalam ide kepulauan tersebut mereka merasa bahwa masing-masing suku dalam kepulauan adalah satu kesatuan yang mutlak. Di sana terjalin kerjasama antar suku dalam kepulauan yang berbentuk federalisme secara parsial dan tidak seluruh Indonesia.

Fase kedua berkenaan dengan ide persatuan, ide tersebut ditarik dari lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah tersebut secara realita telah menghilangkan ide dan pemikiran insularisme, ide provinsialisme, ide

⁵ Kesan dari sebutan Negara Nasional oleh Soekarno bagi para pembaca sejarah adalah Negara Kesatuan, hal ini selaras dengan pidato-pidato Soekarno yang sangat dominan dengan ide-ide kesatuan bangsa.

federalisme, dan pemikiran seperatisme. Karenanya siapa saja yang berusaha untuk menghidupkan kembali ide kesukuan dan kepulauan maka ia sama dengan menggali kubur untuk menghidupkan kembali orang mati 28 tahun berlalu.

Fase ketiga adalah fase ide kebangkitan, dalam fase ini mereka meyakini berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, bertanah air satu yaitu tanah air Indonesia dan berbahasa satu yakni bahasa Indonesia. Susunan dasar yang paling awal yang menunjukkan bentuk negara Indonesia yang disebut dengan Negara Kesatuan menjadi spirit tertentu bagi upaya mewujudkan ide dan pemikiran Mosi Integral Mohammad Natsir. Dengan ide kesatuan tersebut terkadang Mohammad Natsir dapat berseberangan cara pandang dengan partai yang dipimpinnya manaka Masyumi mengusung konsep negara federasi sementara dirinya harus dengan konsep Negara Kesatuan.

Penyebab kedua; sebagai strategi menghadapi politik *divide et impera* Belanda, kita pahami bahwa pihak Belanda dengan sangat bersahaja telah mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Kita katakan bersahaja karena nampak dan terkesan melalui gerakan politik Belanda melalui beberapa peristiwa penting seperti Konferensi Malino I dan II,⁶ Perjanjian

6 Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada

Linggarjati,⁷ Perjanjian Renville,⁸ Perjanjian Roem-Roijen,⁹ dan Konferensi Meja Bundar (KMB)¹⁰ yang menetapkan Indonesia sebagai Negara Republik Indonesia Serikat.

tanggal 15 Juli - 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (*Borneo*) dan Timur Besar (*De Groote Oost*).

7 Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Lingga'rjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947.

8 Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook.

9 Perjanjian Roem-Roijen (juga disebut Perjanjian Roem-Van Roijen) adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan HB IX terhadap Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan "Jogjakarta is de Republiek Indonesie" (Yogyakarta adalah Republik Indonesia).

10 Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini, berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian Roem-Royen (1949). Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.

Walaupun demikian, dasar penjajah tetap saja ingin menjajah negara Indonesia dengan berbagai cara termasuklah dengan melanggar satu persatu perjanjian yang telah disepakati dengan Indonesia. Perundingan Linggar Jati dilanggar Belanda dengan Agresi Militer Pertama 21 Juli 1947. Perjanjian Renville dengan Agresi Militer Belanda kedua 19 Desember 1948. Perjanjian Roem-Roijen dilanggar Belanda dengan menghidupkan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) ciptaan Belanda di Bandung 23 Januari 1950 yang berencana melancarkan aksi ke ibukota Jakarta untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS). Pelanggaran Konferensi Meja Bundar juga dilakukan Belanda melalui gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang diproklamirkan 25 April 1950 dipimpin oleh Dr. Ch. R. Soumokil sebagai mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.¹¹

Penyebab ketiga; untuk mencegah berkembangnya gerakan seperatis, Mohammad Natsir memantau perkembangan upaya separatisme yang muncul setelah diproklamirkan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di sana muncul upaya-upaya separatisme seperti Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, Pemberontakan Kapten Belanda Westerling di Bandung dan Jakarta,

¹¹ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, jilid kedua, Bandung: Surya Dinasti, 2016, hlm. 308-311.

Pemberontakan Andi Azis Cs 5 April 1950 di Makasar, Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) tanggal 25 April 1950, Pemberontakan Ibnu Hajar Cs tanggal 10 Oktober 1950 di Kalimantan Selatan, Pemberontakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar 17 Agustus 1951 di Sulawesi Selatan, Pemberontakan Batalyon 426 tanggal 1 Desember 1951 di Jawa Tengah, Pemberontakan DI/TII pimpinan Teungku Mohammad Dawud Beureu-eh 20 September 1953 di Aceh, Peristiwa Dewan Banteng tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat, Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tanggal 15 Februari 1958 di Sumatera Barat, Pernyataan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) mendukung PRRI pada tanggal 15 Februari 1958.

Penyebab keempat; ntuk melanjutkan program kabinet Negara Kesatuan, berhubung terhitung semenjak kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sampai dengan munculnya Mosi Integral Mohammad Natsir tahun 1950 telah terjadi 12 kali pergantian kabinet yang hampir semua kabinet tersebut bertujuan untuk mewujudkan negara kesatuan Indonesia. Lalu Mohammad Natsir mewujudkan ide Mosi Integral untuk mendukung dan memperkuat konsep negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ide Mohammad Natsir tersebut Soekarno memberikan kepercayaan kepada Mohammad Natsir untuk menyusun kabinet berikutnya,

kabinet Mohammad Natsir merupakan kabinet yang ke 13 dan merupakan kabinet parlementer kedua setelah kabinet Syahrir I. pada masa itulah Soekarno mengatakan kepada Mohammad Natsir: negara ini kuserahkan kepada Mohammad Natsir.¹²

Penyebab kelima; untuk mengakomodir gerakan rakyat menuju negara kesatuan. Dari negara kesatuan Republik Indonesia hasil kemerdekaan 17 Agustus 1945 sehingga menuju kepada Negara Republik Indonesia Serikat hasil perundingan KMB 23 Agustus 1949, kemelut demi kemelut terus bergema baik perlawanan terhadap agresi Belanda pertama tahun 1947 maupun yang kedua tahun 1948 dan kemelut internal seperti DI/ TII tahun 1949. Dari kemelut-kemelut tersebut tersimpan benih disintegrasi bangsa dan negara serta benih negara federasi.

Terlepas dari kemelut-kemelut tersebut semangat persatuan dan kesatuan bangsa terus muncul dalam kehidupan bangsa. Sehingga negara-negara bahagian ciptaan Belanda satu persatu ditinggalkan rakyat menuju negara kesatuan, hal ini dibuktikan oleh beberapa daerah di Negara Indonesia Timur yang berhasrat menggabungkan diri kepada Republik Indonesia (RI Yogyakarta) hasil proklamasi 17 Agustus 1945. Di antaranya adalah Dewan Minahasa yang memutuskan

12 Wawancara dengan M. Amin Jamaluddin, Jakarta: 23 Juli 2019.

untuk bergabung dengan NKRI tanggal 30 April 1950 dengan bandingan suara 10:0 yang setuju berbanding dengan 3 suara yang blangko.¹³

Selain itu muncul informasi dari media cetak yang menginformasikan bahwa ada 13 negara bagian telah bubar dalam tahun 1950, di antaranya adalah Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pasundan, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Padang, Labuhan Batu/Asahan Selatan, Sabang, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tenggara.¹⁴ Ada sejumlah magnik yang membuat rakyat dari negara-negara bagian tersebut menarik untuk bergabung dengan negara kesatuan, di antaranya adalah: **pertama**, mereka sangat terkesan dengan kemampuan pasukan bersenjata Republik Indonesia. Belanda hanya sanggup mengawal sebahagian wilayah yang telah diduduki oleh RI sebelum adanya Perjanjian Renville, selain itu dalam negara bagian yang diduduki Belanda pun rakyat tidak patu dan tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Dalam kasus ini Belanda gagal mengajak rakyat Indonesia untuk bekerja sama dengan mereka, dengan demikian RIS tanpa NRI (Yogyakarta) tidak mungkin wujud.

Kedua, mereka yakin di mana posisinya dapat dipertahankan apabila mereka menyetujui kekuasaan

¹³ Murjoko, *Mosi...*, hlm. 70.

¹⁴ *Harian Merdeka*, tanggal 3 Maret 1950.

Republik Indonesia, perkara ini diyakini karena wilayah-wilayah yang tidak diduduki Belanda seperti Sumatera Timur dan Sumatera Selatan sangat strategis dan efektif sebagai modal wilayah NRI. **Ketiga**, Belanda tidak berdaya untuk medesak dan menerapkan strategi politiknya terhadap negara-negara bagian dikarenakan pihak negara-negara bagian tidak puas dengan otonomi yang diberikan Belanda karena mereka menginginkan otonomi yang lebih luas dari yang diberikan itu. Selain itu terpengaruh juga dengan wujudnya para pemimpin negara-negara bagian yang didukung Belanda tetapi tidak mendapat dukungan rakyatnya.

Keempat, meskipun ada sejumlah kalangan dari pemimpin negara bagian yang masih optimis dan berharap kepada Belanda, namun mereka juga terdiri dari kalangan bangsawan yang berpaham nasionalis kebangsaan dan menentang keberadaan Belanda. Apalagi Belanda tidak menyerahkan kekuasaan secara penuh sebagaimana yang mereka miliki selama ini menjadi pemicu bagi para penguasa negara bagian untuk lebih menyatu dengan konsep negara kesatuan.

Ada sejumlah gerakan persatuan yang muncul sebelum lahirnya Mosi Integral Mohammad Natsir adalah: **pertama**, daerah Malang sebagai Negara Bagian Jawa Timur mengajukan mosi untuk lepas dari Negara Jawa Timur dan bergabung dengan Republik Indonesia

(Yogyakarta) pada tanggal 4 Januari 1950; **kedua**, daerah Sukabumi juga meminta lepas dari Negara Bagian Pasundan dan bergabung dengan Republik Indonesia tanggal 30 Februari 1950; **ketiga** Rapat senat Negara Bagian Sumatera Selatan tanggal 10 Februari 1950 memutuskan agar pemerintah negara bagian tersebut segera menyerahkan kekuasaannya kepada RIS; **keempat**, pada tanggal 7 Maret 1950 Negara Bagian Pasundan membubarkan diri dengan menyerahkan kekuasaannya kepada RIS yang seterusnya bergabung dengan Negara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan mereka juga menuntut RIS segera dibubarkan.¹⁵

Kelima, Presiden Soekarno pada tanggal 9 Maret 1950 menandatangani keputusan masuknya Negara Bagian Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Sabang, dan Padang kedalam Republik Indonesia (Yogyakarta); **keenam**, Negara Bagian Kalimantan Timur secara resmi bergabung kedalam Republik Indonesia Yogyakarta; **ketujuh**, pada tanggal yang sama 9 Maret 1950 Negara Bagian Sumatera Selatan bergabung dalam Republik Indonesia, efek dari itu Negara Bagian Bangka dan Belitung masuk kedalam wilayah Sumatera Selatan dan sekaligus bergabung dengan RI tanggal 16 April 1950.

Penggabungan negara-negara bagian ciptaan Belanda tersebut kedalam Negara Republik Indonesia

¹⁵ Murjoko, *Mosi...*, hlm. 71-72.

hasil proklamasi 17 Agustus 1945 demikian derasnya sehingga akhir Maret 1950 hanya tersisa empat negara bagian ciptaan Belanda saja, yaitu; Negara Bagian Republik Indonesia (RI), Negara Bagian Kalimantan Barat, Negara Bagian Sumatera Timur (NST), dan Negara Bagian Indonesia Timur (NIT).¹⁶

Sebagai seorang politikus yang juga negarawan dan ulama Mohammad Natsir memahami betul akan keinginan rakyat yang ingin bersatu pada dalam sebuah negara milik sendiri, diurus sendiri, dihatur sendiri, untuk rakyat dan bangsa sendiri yang jauh dari kontrol dan aneksai pihak luar. Dengan kekuasaan yang ada di tangnnya baik sebagai ketua partai maupun sebagai Menteri beliau mengkoordinasikan dan mengajak komponen bangsa terutama yang duduk di parlemen untuk menandatangani coretan buang pikirannya yang bernama Mosi Integral yang kemudian lebih masyhur dengan sebutan Mosi Integral Mohammad Natsir.

Dari pemaparan tersebut di atas dapat dikonkritkan minimal ada tujuh poin yang menyebabkan lahirnya Mosi Integral Mohammad Natsir; **pertama**, melihat kejahatan penjajah Belanda yang sangat merugikan kaum pribumi membuat masyarakat menginginkan terjadinya perubahan sistem negara di nusantara; **kedua**, masyarakat beranggapan negara sudah merdeka

¹⁶ *Ibid.*

tidak berhak bangsa asing menguasai dan memimpin negaranya; **ketiga**, sistem negara federasi/serikat tidak cocok bagi rakyat Indonesia yang berumpun Melayu; **keempat**, negara kesatuan dalam bentuk republik sudah dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga tidak perlu adanya lagi bentuk negara lain di Indonesia.

Kelima, masyarakat rindu hidup rukun damai dalam negara yang sudah merdeka pada 17 Agustus 1945 sehingga memerlukan ketetapan bentuk dan sistem negara yang dihatur oleh bangsanya sendiri; **keenam**, rasa benci masyarakat terhadap kaum penjajah yang memperlakukan mereka secara tidak manusiawi menjadi pemicu untuk wujudnya kesatuan bangsa; **ketujuh**, karena pikiran dan pemikiran Mohammad Natsir sendiri yang tidak selaras dengan konsep negara federasi, beliau lebih condong kepada konsep negara kesatuan yang integrated sehingga beliau secara personal mengajukan dan mengusung konsep negara kesatuan ketika partainya; Masyumi mengusung konsep negara federasi.

Walaupun, dalam tesis Murjoko disebutkan ada lima hal kenapa Mohammad Natsir mengajukan Mosi Integralnya; **pertama**, Susunan negara kesatuan yang pertama sekali diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dijadikan dasar pertimbangan bagi Mohammad Natsir dalam mengajukan mosi tersebut; **kedua**, Mosi Integral yang diajukan Mohammad Natsir

dalam rangka menghadapi strategi politik pecah belah dari penjajah Belanda yang terkenal dengan istilah *divide et impera*; **ketiga**, mosi integral tersebut juga disampaikan dalam rangka untuk mencegah gerakan separatis yang semakin berkembang; **keempat**, mosi integral juga diajukan dalam rangka mendukung program-program kabinet sebelumnya yang memiliki upaya untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia; **kelima**, mosi integral juga dilakukan dalam upaya melanjutkan upaya-upaya dan gerakan-gerakan persatuan yang pernah ada dalam sejarah Indonesia.¹⁷

3.3. Tujuan Mosi Integral Mohammad Natsir

Dari hasil kajian penyebab-penyebab lahirnya Mosi Integral Mohammad Natsir dapat ditarik tiga tujuan daripada mosi integral tersebut, yaitu:

3.3.1. Tujuan Kebangsaan

Bangsa Indonesia yang mayoritas terdiri dari bangsa Melayu menjadi satu aikon tersendiri untuk menjadi cikal bakal sebuah ras dan bangsa di muka bumi sebagaimana juga dengan ras, suku, dan bangsa-bangsa lainnya di dunia raya ini. Kebangsaan yang beragam

¹⁷ *Ibid.*

etnis tersebut menjadi sebuah integritas yang sangat unik manakala ia berada dan menjadi sabu bangsa dalam satu negara seperti Indonesia. Prihal semacam ini tidak semua negara di dunia ini memilikinya, ada negara yang kondisi kebangsaannya semisal Indonesia seperti India, tetapi kemudian ia pecah menjadi tiga yakni India, Pakistan, dan Bangladesh. Negara-negara di kawasan balkan dan skandinavia malah dari satu negara berpecah belah menjadi negara-negara yang banyak seperti Rusia, Azerbaijan, Turkmenistan, Turkistan, Bosnia, Kroasia, Serbia, dan lainnya.

Terkesan dalam Mosi Integral Mohammad Natsir terkandung nilai dan marwah kebangsaan yang sangat tinggi sehingga dengan wujudnya integrasi bangsa tersebut dapat menjadi pelekut, jimat, dan magnet bagi bangsa Indonesia yang berbilang suku, kaum, ras, etnis, dan kebangsaan dalam kerajaan-kerajaan zaman silam. Peran Mosi Integral Mohammad Natsir dapat memperkokoh dan memadatkan secara kongkrit perpaduan dan kesatuan bangsa manakala ia berhasil beralih dari sistem negara federasi (RIS) bentukan penjajah Belanda untuk kepentingan negara dan bangsa mereka kepada negara kesatuan (NKRI).

Nilai dan markah kebangsaan yang wujud dalam Mosi Integral Mohammad Natsir tidak hanya dapat memperkuat dan mempererat ikatan kebangsaan semata

melainkan ia juga dapat memperkokoh ikatan adat budaya yang dimiliki oleh setiap etnis menjadi satu adat dan budaya Indonesia. Jadi efek dari upaya penyatuan bangsa secara otomatis dapat melahirkan perpaduan adat budaya bangsa itu sendiri. Kondisi semisal ini dalam pepatah melayu termasuk kedalam adagium sambil menyelam minum air, atau sekali acak dua kali dapat, artinya, kehadiran Mosi Integral Mohammad Natsir tersebut bukan hanya dapat mempersatu dan memperkokoh eksistensi kebangsaan semata melainkan ia juga inklud persatuan dan perpaduan adat budaya bangsa itu sendiri manakala masing-masing etnis tersebut membaurkan adat budaya mereka menjadi satu adat dan budaya besar atas nama negara yakni adat dan budaya Indonesia.

Atas landasan predikat seorang ilmuan dan ulama yang paham dan sangat memahami perpaduan ummah dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara, upaya perpaduan ummah itu menjadi misi bagi seorang ulama. Mohammad Natsir telah mengapresiasi upaya tersebut dalam kehidupannya lewat Mosi Integralnya bagi satu bangsa hasil perpaduan bangsa-bangsa yang ada yang kemudian dinamakan bangsa Indonesia. Sungguh nilai mosi integral tersebut sulit diberi nilai yang layak dan padan baginya, hanya Allah sajalah yang lebih patut dan pantas menilainya.

3.3.2. Tujuan Kenegaraan

Di sisi lain kehadiran Mosi Integral Mohammad Natsir tersebut sulit dikatakan tidak untuk kewujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melihat perjalanan sejarah negara ini yang sangat amat unik yang berasal dari berbagai kerajaan di nusantara menjadi sebuah negara kesatuan bergelar Indonesia. Dari upaya penjajahan oleh bangsa-bangsa asing baik dari Benua Eropa maupun Asia seperti Portugis, Inggeris, Belanda dan Jepang kemudian mandiri menjadi sebuah wilayah berdaulat yang bernama Indonesia. Dari upaya-upaya separatisme didalam wilayah Indonesia sendiri kemudian kokoh kembali dengan nama NKRI.

Tujuan kehadiran Mosi Integral Mohammad Natsir di sini menjadi kenyataan untuk mewujudkan dan memperkokoh eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan ini dapat diambil ketika dipadukan eksistensi NKRI semenjak tiada sampai kepada proses penjajahan, proses deklarasi, proses penjajahan lagi, kemudian proses kehadiran konsep negara serikat ciptaan Belanda sehingga menjadi negara kesatuan lagi hari ini setelah dikonkritkan dengan Mosi Integral Mohammad Natsir.

Sulit dibantah kalau proses penjajahan Belanda

khususnya dalam masa agresi kedua tahun 1948 yang kemudian hadir Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ciptaan Belanda dalam tahun 1948-1950, yang dalam tahun tersebut terjadi berbagai upaya perundingan dan perjanjian seperti Perjanjian Malino, perjanjian Renville, perjanjian Roem-Roijen, dan Konferensi Meja Bundar (KMB). Di celah-celah berbagai perundingan dan perjanjian tersebut Mohammad Natsir mengedepankan tujuan kebangsaan dalam Mosi Integralnya yang pada waktu itu belum muncul ide serupa untuk perpaduan dan kesatuan negara dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Efek dari eksisnya NKRI maka sulit dipisahkan dengan wujudnya satu bahasa yang disebut dengan Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Melayu lama yang bertuliskan Arab-latin yang sering disebut dengan Bahasa Jawi. Tahun 1928 bangsa ini diingatkan dengan sumpah Pemuda yang mengikrarkan: Satu Bangsa yaitu Bangsa Indonesia, satu Tanah Air yakni Tanah Air Indonesia, satu Bahasa adalah Bahasa Indonesia. Sumpah pemuda tersebut menjadi ukuran bahwa Indonesia sudah lama wujud bersama dengan bangsa, bahasa, tanah air, komunitas, dan pemerintahan yang bernama Indonesia. Hanya karena dijajah oleh bangsa asing yang bringas saja bangsa Indonesia kehilangan kesempatan dalam waktu lama untuk membenah diri. Baru pada tahun

1945 kemerdekaan itu dideklarasikan walaupun penjajah Belanda tetap mau menjajahnya kembali.

Sebagaimana yang menjadi syarat sah sebuah negara menurut ketentuan hukum internasional adalah; adanya wilayah/tanah air, adanya masyarakat/bangsa, adanya pemerintahan/government, adanya konstitusi/undang-undang. Sebagai persyaratan korelasi dengan semua persyaratan tersebut maka sebuah negara yang memiliki bangsa dan kebangsaan itu mestilah memiliki bahasa, itulah yang dialami oleh negara Republik Indonesia yang memiliki bahasa dengan nama Bahasa Indonesia. Bahasa yang berawal dari bahasa Melayu Jawi tersebut kini menjadi bahasa nusantar kawasan-kawasan yang dihuni oleh bangsa Melayu seperti Indonrsia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, Champa di Vietnam, Moro di Filipina Selatan, dan juga sebahagian warga Singapura.

Dalam konteks Mosi Integral Mohammad Natsir, bahasa secara otomatis ingklud dalam kontek negara karena sebelum mosi tersebut terjadi bangsa ini sudah duluan menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa Indonesia yang secara resmi dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 1928. Walaupun demikian kalau mau bicara jujur, sesungguhnya bahasa yang hari ini disebut dengan bahasa Indonesia jauh lebih tua umurnya dengan negara yang hari ini disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Kalau Indonesia itu merdeka tahun 1945 maka bahasanya sudah duluan wujud jauh sebelumnya, kalau sumpah pemuda dijadikan ukuran maka jauh hari sebelum tahun 1928 bahasa itu sudah duluan ada dengan sebutan Bahasa Melayu. Maka tidak berlebihan kalau kita ambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia jauh lebih tua dibandingkan negara Indonesia.

Oleh karenanya dalam upaya menggolkan buah pikirannya dalam bentuk sebuah mosi, Mohammad Natsir menggunakan Bahasa Indonesia dalam menuliskan naskah mosi integralnya. Dalam menyampaikannya di parlemen beliau juga membacanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka jadilah goresan pena Mohammad Natsir tersebut sebagai sebuah khazanah politik yang berawal dan diawali dengan bahasa Indonesia yang usianya jauh lebih muda daripada negara Indonesia itu sendiri.

3.3.3. Tujuan Keagamaan

Hadirnya Mosi Integral Mohammad Natsir sulit dipisahkan dengan eksistensi agama (Islam) mengingat partai yang diwakilnya (Masyumi) merupakan partai Islam terbesar pada zaman itu yang memiliki jumlah kursi terbanyak urutan kedua setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam pemilu pertama 1955. Dalam sepak terjang

partai Masyumi sesuai dengan konstitusinya mengusung kerangka teori politik Islam yang menempatkan kedaulatan tuhan sebagai kekuasaan tertinggi dalam berpolitik bagi setiap muslim.

Dengan demikian maka perjuangan partai Masyumi merupakan perjuangan Islam untuk kemajuan dan memajukan Islam dan ummat Islam di Indonesia secara khusus, di dunia secara jeneral. Maka tidak salah kalau partai Islam terbesar di zaman awal kemerdekaan tersebut dalam sepek terjangnya selalu mengedepankan kepentingan Islam dan ummat Islam. Ketika tokoh partainya berinisiasi untuk mempersatukan bangsa dan negara lewat sebuah konsep jitu yang menguntungkan bangsa dan negara ini sampai sekarang yang digelar dengan nama Mosi Integral Mohammad Natsir, maka jadilah ia sebuah alternatif keagamaan dalam politik bangsa.

Apabila kita sedikit kembali kebelakang untuk melihat kondisi agama dan keagamaan di negara ini, maka kita akan dapati penghuni besar dan terbesar negara ini adalah bangsa Islam atau kaum muslimin. Artinya, ketika prosentasi menunjukkan 90% penghuni negara Indonesia pada awal kemerdekaan, dalam kacamata hukum apapun, apalagi hukum Islam maka negara ini semestinya wajib menjadi negara Islam. Tetapi disebabkan terlalu baiknya ummat Islam di Indonesia

yang memberikan peluang dan kesempatan kepada non muslim yang secara beramai-ramai hanya berada pada posisi 10% saja maka kesatuan agama di Indonesia menjadi malapetaka ketika agama selain Islam demikian gencar mendobrak Islam dan ummat Islam.

Kondisi semisal ini menjadi sesuatu yang disebut dengan bumerang atau senjata makan tuan dikarenakan ada duri dalam daging, ada api dalam sekam, ada racun dalam makanan, atau ada gunting dalam lipatan. Penyebab dari kondisi yang terlanjur wujud itu maka Islam yang mendominasi 85% penduduk Indonesia tidak lagi beda posisinya dengan Kristen yang 10%, dengan Hindu yang 2%, dengan Budha yang 1%, dengan lain agama semuanya 2%. Padahal masa awal kemerdekaan negara dapat dipastikan Indonesia memiliki satu dominan agama yaitu agama Islam. Situasi sebegitu semestinya ummat Islam menjadi pemilik negara dengan presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para camat, dan para kepala kampung semuanya wajib orang-orang Islam. Sekali lagi kita tegaskan; karena terlalu lugu ummat Islam dengan konsep toleransi yang membahayakan diri sendiri maka kondisi menjadi begini.

Meskipun Mosi Integral Mohammad Natsir tidak memfokuskan sinyalemennya terhadap eksistensi satu agama untuk Indonesia namun sebagai pimpinan partai Islam terbesar nuansa tersebut menjadi sebuah kewajiban

partai Islam yang diatur dalam Siyasa Syar'iyah sebagaimana yang diamalkan Rasulullah SAW manakala menaklukkan Yatsrib dari penghuni Yahudi, Nashrani, Majusi sehingga sepenuhnya menjadi milik ummat Islam. Kondisi ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia dalam kontek Mosi Integral Mohammad Natsir, semestinya mosi integral tersebut dapatlah mencontahi dan mengikuti konsep hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian Yatsrib diganti nama menjadi Madinah, para penganut agama-agama yang ada di dalamnya diarahkan semuanya menjadi muslim sebagai penganut agama Islam sampai ke hari ini.

Semestinya begitulah ummat Islam mengikuti sunnah nabi dalam berpolitik, berpolitik itu untuk mengembangkan Islam, memajukan Islam, memperluas wilayah Islam, untuk menaklukkan wilayah non Islam dijadikan wilayah Islam, untuk mengajak semua penghuni dunia menyembah Allah sebagai tuhan. Bukan sebaliknya berpolitik itu untuk berbuat curang, mendiskreditkan Islam dan muslimin, memberi peluang kepada kafir dengan menyudutkan muslimin sehingga eksistensi Islam dan ummat Islam hari demi hari menjadi ciut. Prilaku politik muslim seperti itu ibarat pemain bola yang mencetak goal kegawang sendiri, nahas, lirik, pilu, dan memalukan.

Semestinya negara Indonesia yang semenjak merdeka dimiliki oleh 90% muslim wajib menjadi negara Islam yang memperkokoh ke-Islam-annya dengan mewujudkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menjadi modal untuk meng-Islamkan wilayah-wilayah sekitarnya. Memberikan keamanan, kesejahteraan kepada non muslim yang hidup di dalamnya, tidak ada diskriminasi agama, suku, puak, ras, dan agama di dalamnya. Ketika kondisi normal semacam ini gagal wujud pada masa kemerdekaan semestinya ia harus diwujudkan dalam konsep Mosi Integral Mohammad Natsir sebagai sebuah tugas dan kewajiban Islam. Dengan demikian maka konsep Mosi Integral Mohammad Natsir bukan hanya integral terhadap bangsa dan negara (dari RIS ke NKRI) melainkan ia juga harus menjadi integral dalam satu agama (Islam) karena sudah banyak bukti ketika Islam menjadi agama yang satu, semua penganut agama non Islam dapat hidup aman, tenteram, damai dan sejahtera di dalamnya, tetapi sebaliknya kenyataan berbicara manakala non Islam dominan dalam sesuatu negara maka ummat Islam menjadi mangsa mereka (lihat kasus Rohingya di Myanmar, kasus Uyghur di Tiongkok/RRT, kasus Kasymir di perbatasan India-Pakistan, kasus Palestina, kasus Tolikara di Irian Jaya), dan lainnya.

Oleh karena itu perlu dipahami oleh segenap para pemimpin muslim bahwa ketika Islam jaya dan berdaulat

non muslim aman dan selamat. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Makkah semua non muslim diselamatkan dalam Baitullah dan rumah Abu Sofyan, Rasulullah SAW bersabda *man dakhala Baitullah fahuwa aminan* ketika ada non muslim yang ragu-ragu masuk ke Baitullah karena dianggap mencurigakan, Nabi berucap pula *man dakhala baiti Abu Sofyan fahuwa aminan*. Maka masuklah mereka beramai-ramai kesana dan diamankan oleh Rasulullah SAW, tidak diganggu melainkan diberi pilihan; masuk Islam atau tetap kafir dengan membayar jizyah tinggal di Makkah.

Para penguasa non muslim terutama sekali para pemimpin negara-negara kuasa besar dunia harus bersih hati, tidak jahat, tidak khianat dan berkasih sayang sesama ummat manusia sebagaimana yang pernah dilakukan pemimpin besai Islam Mohammad bin Abdullah sebagai Rasulullah SAW. Kalau mereka faham dan mau memahami sejarah dan ketentuan Islam semacam itu maka perangai jahat yang mereka miliki dan mereka amalkan dalam kehidupan selama ini wajib segera dihilangkan jauh-jau. Karena di sanalah letak semua sumber masalah, apalagi kalau mereka merancang aktivitas yang menyudutkan dan mengorbankan ummat Islam seperti kasus teror, makar, radikal, ekstrem, fanatik, dan sebagainya.

Ummat Islam Indonesia telah berjaya memerdekakan

negeri ini dari jajahan Belanda, ummat Islam Indonesia juga telah berhasil mengembalikan status NKRI sebagaimana diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dimotori oleh Mohammad Natsir. Itu bermakna ummat Islam di Indonesia memiliki satu perjuangan, yakni perjuangan memerdekakan negara dan perjuangan menegakkan Islam dengan syari'atnya. Oleh karenanya tidak salah sama sekali kalau ummat Islam di Indonesia menjalankan dan mengembangkan syari'at Islam karena itu perintah dan tuntutan agama Islam sebagai agama yang benar yang pernah dijanjikan kedatangannya oleh Allah dalam kitab-kitab terdahulu sebelum turunnya Al-Qur'an yakni Taurad, Zabur, dan Injil. Sebaliknya tidak ada hak bagi non muslim untuk menyalahkan ummat Islam yang menjalankan hukum Islam di negara yang dimerdekakan sendiri oleh ummat Islam dari tangan-tangan jahat penjajah Belanda dan Jepang yang kafir.

Satu perjuangan Islam selain untuk keperluan hidup dunia akhirat muslim sendiri juga menjadi bahagian kehidupan non muslim yang aman di dalamnya. Oleh karena itu dunia sudah membuktikan di mana-mana wilayah di planet bumi ini yang dihuni oleh mayoritas muslim maka minoritas non muslim bisa hidup damai, aman, dan tenteram di dalamnya seperti di Aceh, di Arab Saudi, di Malaysia, dan di sejumlah negara lain di dunia ini. Sebaliknya mana-mana negara mayoritas non muslim

di bumi ini yang di dalamnya terdapat minoritas muslim maka minoritas muslim menjadi korban kekerasan mayoritas muslim seperti di Uyghur China, di Arakan (kaum Rohingya) di Myanmar, di Kashmir India, di Palestin, dan sebagainya. Itulah gambaran kehidupan yang tidak berimbang antara muslim dengan non muslim yang oleh kuasa-kuasa besar dunia mendiskreditkan Islam dan ummat Islam dengan membantu dan membela non muslim.

Di sanalah ummat Islam memerlukan perpaduan dan penyatuan perjuangan untuk menebus ketidakadilan dunia yang sudah berabad-abad lamanya. Ummat Islam wajib mempersatukan kekuatan dalam satu perjuangan yakni perjuangan Islam berdasarkan 'aqidah Islamiyyah sebagaimana yang pernah diprakarsai oleh baginda Rasulullah SAW. dahulu kala. Satu perjuangan dalam satu ideologi yakni perjuangan Islam dalam mempertahankan dan mengembangkan ideologi Islam sebagai satu-satunya ideologi representatif untuk dunia dan alam raya ini yang sudah teruji dan terbukti kebenaran dan keadilannya.

Ideologi Islam merupakan ideologi ketuhanan, ideologi ketauhidan, ideologi keadilan, ideologi kemuslihhatan, ideologi keamanan dan ketentraman yang sudah terbukti dari masa ke masa dan dari zaman ke zaman. Hanya pihak-pihak non Islam sajalah yang

hari-hari berusaha untuk menghilangkan jejak langkan kebenaran ideologi Islam tersebut karena mereka tidak senang dengan keamanan, ketentraman, keadilan, dan kebenaran serta kemuslihatan yang dipaparkan oleh ideologi Islam.

Untuk itu semua eksistensi Mosi Integral Mohammad Natsir yang mengedepankan konsep negara kesatuan untuk Indonesia merupakan bahagian lain dari manifestasi perjuangan Islam oleh ummat Islam dalam bingkai ideologi Islam yang rahmatan lil 'alamin. Dalam mengemukakan konsep Mosi Integral, Mohammad Natsir tidak pernah memilah-milah penganut agama antara penganut agama Islam dengan penganut agama Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu, dan sebagainya. Tetapi yang dikedepankan adalah negara kesatuan untuk seluruh bangsa dari berbagai pemeluk agama.

Di sinilah terdapat keunikan perjuangan Mosi Integral Mohammad Natsir di mana ketika ummat Islam memimpin dan menguasai NKRI tidak pernah mendiskreditkan non muslim dan menempatkan mereka setara dengan muslim pada dataran berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan hari ini ketika non muslim sedikit memiliki kekuasaan langsung mendiskreditkan dan menyisihkan ummat Islam di negara milik ummat Islam sendiri. Kondisi semisal inilah yang menjadi bukti bahwa Islam dan ummat Islam di mana saja berada

menjadi solusi perdamaian di bumi ini. Sebaliknya sebahagian besar non muslim di mana mereka ada di situ pula masalah ada, di mana saja mereka ada di sana pula kekacauan wujud, di mana saja mereka ada di situ pula ummat Islam tersiksa dan disiksa. Dunia sudah membuktikannya.

Dalam keyakinan dan doktrin Islam berjuang mempertahankan ideologi itu merupakan sebuah kewajiban, karena Islam menganjurkan kedamaian, ketentraman, keadilan, kemuslihatan bukan hanya untuk ummat Islam saja melainkan juga untuk non muslim. Karenanya antara perjuangan Islam dan ideologi Islam merupakan satu sisi pandang yang tak dapat dipisahkan karena salah satu target dan sasaran perjuangan dalam Islam adalah untuk mempertahankan dan melestarikan eksistensi ideologi Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin yang dijamin kebenran oleh Allah SWT dan dibuktikan kebenarannya oleh kenyataan yang ada dalam kehidupan dunia.

3.3.4. Aplikasi

Sebagai seorang negarawan yang merupakan seorang ulama dan intelektual serta seorang politikus ulung, Mohammad Natsir hari-hari memikirkan eksistensi ummah, bangsa dan negara yang relevan

dengan ketentuan syari'ah. Beliau menuangkan hasil pemikirannya dalam berbagai tulisan yang disajikan kepada anak bangsa melalui berbagai media, baik yang *dipublish* semasa hidupnya maupun ketika beliau sudah tiada.¹⁸ Semua hasil karyanya sangat bermanfa'at bagi para generasi pelanjut hari ini khususnya generasi yang konsen dengan dengan Islam dan perjuangan Islam di Indonesia.

Salah satu kreasi agung yang dihasilkan oleh Mohammad Natsir sehingga berkesan dan berpengaruh kepada generasi hari ini adalah goresannya yang dibacakan dalam sidang DPR RIS di ibu kota Jakarta yang kemudian dokumen tersebut populer dengan nama Mosi Integral Mohammad Natsir. Barangkali goresan tangan tersebut tidak pernah dipersiapkannya untuk menjadi sebuah dokumen penting yang kemudian hari menyeret nama besarnya melengket pada dokumet itu sehingga bergelar dengan nama Mosi Integral Mohammad Natsir.

Prinsipnya Mohammad Natsir memikirkan dan melakukan sesuatu yang dapat membawa hasil positif kepada bangsa dan negara. Goresan tangannya yang memaparkan dan mempersoalkan perbedaan antara konsep negara serikat dengan negara kesatuan itu

¹⁸ Wawancara dengan Prof. Dr. A. M. Saifuddin, Ketua Dewan Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta: 26 Juli 2019.

mengajak para pembaca untuk berkesimpulan kalau Mohammad Natsir berpikiran konsep Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk penjajah Belanda merupakan suatu jebakan dan strategi penjajah untuk menguasai kembali wilayah yang sudah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Untuk mengelak dari strategi penjajah tersebut beliau memaparkan secara implisit konsep negara kesatuan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dituangkan dalam goresannya yang kemudian terkenal dengan nama Mosi Integral Mohammad Natsir.¹⁹ Semua itu dilakukan hanya karena beliau konsisten dengan eksistensi negara Indonesia dan keabsahan sebuah bangsa besar bernama bangsa Indonesia. Statemen ini didukung oleh kenyataan bahwa dalam kehidupannya selalu melakukan sesuatu yang dapat bermanfaat terhadap bangsa dan negara sampai dengan karya terakhirnya mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada tahun 1967 ketika beliau sudah tidak lagi berkesempatan untuk berpolitik praktis.

3.3.5. Berawal dari Kerisauan Kehancuran NKRI

Melihat strategi penjajah Belanda dalam agresi

¹⁹ Wawancara dengan Lukman Hakiem, penulis sejarah Indonesia, Jakarta: 27 Juli 2019.

kedua tahun 1948 yang menyerang Indonesia kembali setelah diproklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Mohammad Natsir sebagai salah seorang anggota parlemen fraksi Masyumi mengajak para anggota parlemen lainnya untuk menyelamatkan negara Indonesia lewat konsep bentuk negara yang bersifat kesatuan.²⁰ Agresi Belanda kedua setelah gagal dengan agresi pertamanya dalam tahun 1947 berusaha keras untuk mengadopsi kembali Indonesia menjadi jajahan Belanda dengan membentuk negara-negara bagian sebagai boneka Belanda di merata wilayah Indonesia mulai dari Summataera di sebelah barat sampai ke Maluku di sebelah timur.

Sebagai seorang ulama yang ikut memperjuangkan keberadaan negara Indonesia dari penjajahan Belanda Mohammad Natsir merasa bertanggung jawab untuk mempertahankan wujudnya Indonesia di muka bumi ini. Untuk keperluan tersebutlah beliau mengajak para anggota parlemen untuk menyetujui konsep persatuan dan perpaduan wilayah-wilayah yang sudah dipilah-pilah dengan konsep negara bagian oleh Belanda menjadi satu wilayah muthlak dengan nama negara kesatuan.²¹

Mohammad Natsir risau kalau penjajah Belanda yang

20 Wawancara dengan Amlir Saifa Yasin, wakil ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta: 26 Juli 2019.

21 Wawancara dengan Lukman Hakiem, penulis sejarah Indonesia, Jakarta: 27 Juli 2019.

sudah menguasai kembali Indonesia dengan menangkap presiden dan wakil presiden, menduduki ibukota dan menciptakan negara-negara bagian di Indonesia dalam tahun 1948, Indonesia akan dimiliki Belanda. Apalagi melihat perilaku Belanda yang sangat agresif dan ofensif terhadap anak negeri dengan mengedepankan politik *divide et impera* (politik belah banbu), yang satu diinjak dan yang satu lagi diangkat keatas. Perilaku penjajah semacam itu membuat Mohammad Natsir berpikir dan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bangsa dan negara sehingga Indonesia tetap eksis di dalam peta dunia.

Kerisauan Mohammad Natsir terhadap kehancuran NKRI mengajaknya untuk berpikir, berbuat dan melanjutkan perjuangan suci untuk eksistensi sebuah negara bernama Indonesia yang sudah dijajah dan dikotori oleh Belanda dengan konsep negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Perjuangan suci itu diaplikasikan dalam sebuah konsep dari hasil pemikirannya yang pada waktu itu hanya sekedar sebuah goresan pemikiran untuk disampaikan kepada seluruh anggota parlemen dalam DPR RIS. Pemikiran dan goresan tersebut yang pada awalnya sebagai ide seorang negarawan tidak diduga mampu merubah bentuk negara yang diciptakan penjajah yang berkuasa dari negara serikat menjadi negara kesatuan.

Mohammad Natsir risau kalau konsep negara serikat yang diaplikasikan penjajah terus berjalan dengan mulus, Indonesia akan dikuasai lagi oleh Belanda, atau Indonesia hilang dalam peta dunia, atau Indonesia menjadi negara-negara bagian yang tidak terintegrasi secara utuh seperti hari ini sehingga peluang untuk terpecah belah menjadi banyak negara sangat terbuka lebar seperti negara Uni Soviet, negara Yugoslavia dan sebagainya. Makanya dengan gaya yang lembut, cara yang muslihat Meohammad Natsir bekerja keras untuk meyakinkan anggota parlemen dari berbagai partai untuk kembali kepada konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghapus konsep negara serikat bentukan Belanda. Upaya tersebut dilakukan Mohammad Natsir melalui sebuah konsep yang dibacakan di parlemen yang kemudian populer dengan nama Mosi Integral Mohammad Natsir.

Mosi integral Natsir merupakan satu prestasi gemilang dalam pentas sejarah yang sangat monumental dalam parlemen Indonesia. Ulama Negarawan yang bergelar Datuk Sinaro Panjang (1908-1993) ini mampu menyatukan kembali Indonesia yang terpecah belah dalam pemerintahan negara-negara bagian atau federal buatan Van Mook menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita kenal sekarang ini. Di balik itu, mosi ini tidak lahir begitu saja. Terjadinya

perdebatan di Parlemen Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah titik kulminasi aspirasi masyarakat Indonesia yang kecewa terhadap hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus-2 November 1949. Pihak yang termasuk menolak hasil KMB adalah M. Natsir yang waktu itu sebagai Menteri Penerangan (Menpen) dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Lobi Natsir ke pimpinan fraksi di Parlemen Sementara RIS dan pendekatannya ke daerah-daerah selanjutnya ia formulasikan dalam dua kata, yaitu "Mosi Integral".²²

3.3.6. Upaya-Upaya Penyelamatan Bangsa dan Negara

Tanggal 3 April 1950 Mohammad Natsir menyadarkan anggota sidang parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Serikat (DPRS RIS). Mohammad Natsir merasa geram dan kecewa dengan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dengan sengaja mengotak-ngotakkan bangsa Indonesia menjadi negara boneka penjajah Belanda. Mohammad Natsir tidak bisa menerima keputusan KMB yang memecah belah Indonesia menjadi 17 bagian (negara

²² Tahun Mosi Integral: Mengenang Perjuangan M Natsir <https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2019/03/31/162456/69-tahun-mosi-integral-mengenang-perjuangan-m-natsir.html> Diakses pada tanggal 11 September 2019

federal). Perjanjian KMB tersebut berlangsung dari 23 Agustus-2 November 1949 dan menghasilkan empat hal. Yaitu;

- (1) Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat (RIS) setuju membentuk Uni yang longgar antara Negeri Belanda dan RIS dengan Ratu Belanda sebagai pimpinan simbolis,
- (2) Sukarno dan Mohammad Hatta akan menjabat Presiden dan Wakil Presiden, dan antara 1949-1950, Hatta akan merangkap menjadi Perdana Menteri RIS.
- (3) Belanda masih akan mempertahankan Irian Barat, sekarang Papua, dan tidak ikut dalam RIS hingga ada perundingan lebih lanjut dan terakhir
- (4) Pemerintah RIS harus menanggung hutang pemerintah Hindia-Belanda sebesar 4,3 miliar Gulden akibat pertempuran selama 1945-1949. Sebab itu, Natsir yang ketika itu sebagai Ketua Fraksi Masyumi di DPRS RIS mengajukan mosi yang kemudian dikenal dengan 'Mosi Integral'. Lewat mosi integral Nasir tersebut cikal bakal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk kembali setelah diporandakan kaum penjajah.²³

²³ Zainal C Airangga, Mosi Integral 1950, Upaya Natsir Selamatkan NKRI

<https://nusantara.news/mosi-integral-1950-upaya-natsir-selamatkan-nkri/>

Dari kerisauan Mohammad Nasir tersebut akibat ulah KMB maka beliau berbuat sesuatu yang dapat menyelamatkan bangsa dan negara dari perpecahan dan kehancuran. Upaya yang dilakukannya secara ril dan konkrit adalah menolak secara perlahan keputusan KMB dan mengajukan konsep Mosi Integral sebagai solusi jitu perpaduang bangsa dan negara. Pada masa itu tidak ada orang yang mampu berpikir untuk meyelamatkan bangsa dan negara sebagaimana yang dipikir dan yang dilakukan Mohammad Natsir.

Kehadiran mosi tersebut di parlemen DPRS-RIS tersebut dengan kandungan yang sangat kurang tegas tentang konsep ril mosi integralnya membuat bangsa Indonesia terpadu kembali sebagai rakyat dan bangsa yang satu dalam sebuah negara bernama Indonesia. Dengan mosi itu pula membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang utuh dengan konsep negara kesatuan. Dengan demikian maka eksistensi negara dan bangsa Indonesia menjadi terhormat dan utuh dalam sebuah wilayah yang dimerdekakan bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian penjajah seperti sejumlah negara lain di muka bumi ini.

Itulah realisasi kebesaran dan keagungan sebuah mosi yang pada waktu itu terasa seperti biasa saja namun hari ini ternyata ia merupakan sebuah konsep sederhana yang membawa hasil besar dan luar biasa bagi bangsa

dan negara Indonesia. Dalam konsep mosi tersebut Mohammad Natsir tidak secara tegas mengedepankan konsep pengalihan status negara dari republik Indonesia Serikat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau hanya memberikan gambaran bahwa beliau tidak mempersoalkan eksistensi konsep *unitarisme* dan *federalisme*. Penggal petikannya adalah:

“Saudara Ketua,

Dalam menentukan sikap fraksi saya terhadap mosi ini, fraksi adalah terlepas dari soal “apakah kami dapat menerima oper semua keterangan-keterangan yang tercantum dalam mosi atau tidak!”. Juga menjauhkan diri dari pada pembicaraan unitarisme dan federalisme dalam hubungan mosi ini, sebab pusat persoalannya tidak ada hubungannya dengan hal – hal itu, akan tetapi jauh di lapangan lain. Pembicara-pembicara yang mendahului saya, sudah dengan panjang lebar mengemukakan hal ini.

Orang yang setuju dengan mosi ini tidak usah berarti, bahwa orang itu unitaris, orang federalispun mungkin juga dapat menyetujuinya. Sebab soal ini sebagaimana saya katakan, bukan soal teori struktur negara unitarisme atau federalisme, akan tetapi soal menyelesaikan hasil dari perjuangan kita masa lampau yang tetap masih menjadi duri dalam daging. Tiap-tiap orang yang

meneliti jalan persengketaan Indonesia –Belanda, tentu akan mengetahui bagaimana riwayat timbulnya Negara Sumatera Timur (NST). Dan bagaimana fungsinya NST itu. Walaupun bagaimana juga ditimbang, ditinjau dan dikupas, tetapi rakyat dalam perjuangannya melihat struktur itu sebagai bekas alat lawan untuk meruntuhkan Republik Indonesia. Maka inilah yang menimbulkan reaksi dari pihak rakyat. Bukan soal teori unitarisme dan federalisme.

Kejadian-kejadian yang bergolak di NST sekarang bukan suatu hal yang kunsmatig atau dibikin-bikin akan tetapi adalah satu akibat yang tidak dapat dielakkan dan yang harus kita selesaikan dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai hasil perundingan dengan Belanda dahulu. Orang bisa berkata, bahwa semua mosi atau resolusi dari rakyat dan demonstrasi- demonstrasi yang telah berlaku di NST itu menurut Yuridische vormnya belum dapat dianggap sebagai suatu manifestasi dari kehendak rakyat. Tapi coba, apakah akibatnya jikalau mosi ini ditolak lantaran dianggap prestisennya belum cukup? Ia akan berarti pancingan bagi rakyat untuk menghebat dalam demonstrasi!.

Sahabat karib Mohammad Natsir, Mr. Mohamad Roem sebagai aktifis pergerakan dari Partai Masjumi mengatakan: "... betapa dalam ikhtiar melicinkan Mosi Integral itu, Pak Natsir berbicara dengan Pemimpin

Fraksi dari yang paling Kiri yakni Ir. Sakirman dari PKI, dan dengan yang paling Kanan yakni Sahetapy Engel dari BFO. Dan pada waktu menyampaikan usul mosi integral di parlemen maka beliau menahan diri untuk tidak berbicara soal federalisme atau unitarisme. Karena pokok persoalan bukan di situ....”²⁴

Pokok persoalan yang menjadi sasaran Mohammad Natsir adalah keputusan KMB tidak menguntungkan negara dan bangsa Indonesia maka kalau bicara federalisme atau unitarisme maka ia langsung atau tidak langsung akan berhadapan dengan kandungan KMB. Karenanya Mohammad Natsir mengajukan konsep lain yang terkesan mengajak anggota parlemen memikirkan keberadaan negara sehingga jauh dari negara bagian atau negara serikat. Dari langkah yang diambil tersebut nampaklah sebuah kearifan yang dimiliki Mohammad Natsir sehingga keputusan KMB tidak terusik namun Mosi Integralnya berjalan sukses dan mencapai sasaran. Dalam bait lain beliau mengemukakan:

“Saudara Ketua,

Dalam menentukan sikap fraksi saya terhadap mosi ini, fraksi adalah terlepas dari soal “apakah kami dapat menerima oper semua keterangan-keterangan yang tercantum dalam mosi atau tidak!”. Juga menjauhkan diri

²⁴ Mohamad Roem, *Peralihan ke Negara Kesatuan*, Jakarta: Media Dakwah, 1993, hal 47.

dari pada pembicaraan unitarisme dan federalisme dalam hubungan mosi ini, sebab pusat persoalannya tidak ada hubungannya dengan hal – hal itu, akan tetapi jauh di lapangan lain. Pembicara-pembicara yang mendahului saya, sudah dengan panjang lebar mengemukakan hal ini. Orang yang setuju dengan mosi ini tidak usah berarti, bahwa orang itu unitaris, orang federalispun mungkin juga dapat menyetujuinya. Sebab soal ini sebagaimana saya katakan, bukan soal teori struktur negara unitarisme atau federalisme, akan tetapi soal menyelesaikan hasil dari perjuangan kita masa lampau yang tetap masih menjadi duri dalam daging. Tiap-tiap orang yang meneliti jalan persengketaan Indonesia –Belanda, tentu akan mengetahui bagaimana riwayat timbulnya Negara Sumatera Timur (NST). Dan bagaimana fungsinya NST itu. Walaupun bagaimana juga ditimbang, ditinjau dan dikupas, tetapi rakyat dalam perjuangannya melihat struktur itu sebagai bekas alat lawan untuk meruntuhkan Republik Indonesia. Maka inilah yang menimbulkan reaksi dari pihak rakyat. Bukan soal teori unitarisme dan federalisme.

Kejadian-kejadian yang bergolak di NST sekarang bukan suatu hal yang kunsmatig atau dibikin-bikin akan tetapi adalah satu akibat yang tidak dapat dielakkan dan yang harus kita selesaikan dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai hasil perundingan dengan Belanda

dahulu. Orang bisa berkata, bahwa semua mosi atau resolusi dari rakyat dan demonstrasi- demonstrasi yang telah berlaku di NST itu menurut Yuridische vormnya belum dapat dianggap sebagai suatu manifestasi dari kehendak rakyat. Tapi coba, apakah akibatnya jikalau mosi ini ditolak lantaran dianggap prestisennya belum cukup? Ia akan berarti pancingan bagi rakyat untuk menghebat dalam demonstrasi!

Saya teringat pada pidato presiden pada pembukaan Sidang Parlemen ini. Beliau berkata, bahwa dalam satu tahun ini kita tetap konstitusionil. Kita akan menuruti apa yang disebut dalam konstitusi dan tidak akan menyimpang dari konstitusi. Akan tetapi menyimpang dari padanya, jikalau keadaan memaksa. Hal ini diperlihatkan oleh rakyat. Dan diartikannya jika keadaan bisa, tidak memaksa, tidak memberikan jalan baginya untuk mencapai cita-citanya, maka diciptakannya keadaan yang memaksa dengan segala akibatnya yang dipikul oleh rakyat itu sendiri.

Barangkali di dalam meninjau mosi ini Pemerintah merasa khawatir, kalau - kalau mosi ini akan mengakibatkan suatu bentrokan. Akan tetapi menolak dan mematikan mosi ini berarti memperhebat apa yang telah terjadi. Oleh karena itu letakkanlah titik berat dari mosi ini pada apa yang disebut dalam keputusan, yaitu supaya Pemerintah Republik Indonesia Serikat

(RIS) menempuh jalan biasa dengan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan persoalan ini. Jikalau pemerintah menganggap bahwa jika pekerjaan itu dengan sekaligus dan serentak dijalankan, akan menimbulkan bermacam – macam kekacauan, maka bagi Pemerintah cukup terbuka jalan mengadakan Undang – Undang Darurat untuk mengadakan peralihan, sehingga RIS dapat bertindak tidak membiarkan rakyat di NST bergolak, dan diberikan kepada mereka kesempatan untuk menyelesaikan soalnya sendiri. Maka dalam pasal-pasal yang ada dalam undang-undang darurat itu terbuka jalan bagi pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan dengan sebaik-baiknya.

Saudara ketua, Izinkanlah saya sekarang berbicara terlepas atau tidak terlepas dari pada soal unitarisme atau federalisme, akan tetapi dalam hubungan yang lebih besar mengenai mosi ini. Sebagai hendak mengemukakan sedikit pemandangan mengenai dasar dari pada kejadian – kejadian yang kita hadapi sekarang, dari mulai kedaulatan diserahkan kepada kita, baik kiranya kalau kita terlebih dahulu melihat posisinya mosi ini di dalam, hubungan yang lebih besar. Takkala Konstitusi sementara ditandatangani dan diratifikir, umumnya orang, baik pemerintah ataupun parlemen menganggap bahwa Konstitusi itu dan struktur-struktur negara dengan segala sifat – sifat yang baik dan cacat –

cacat yang ada di dalamnya, dapat dipakai sebagai dasar pemerintahan sementara sampai Konstituante yang akan datang.

Akan tetapi rupanya jalan sejarah menghendaki lain. Segera sesudah penyerahan kedaulatan, di daerah timbul pergolakan. Apa yang terpendam dan tertekan selama beberapa tahun yang lalu dalam hati rakyat, sekarang meluap dan meletus dengan berupa demonstrasi dan resolusi untuk merombak segala apa yang dirahasiakan oleh rakyat sebagai restan- restan dari struktur kolonial di daerahnya, terutama di daerah Republik di pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Ini semua tidak mengherankan, akan tetapi adalah memang pembawaan riwayat perjuangan yang *inherent* dengan cara penyelesaian persengketaan Indonesia –Belanda yang diakhiri dengan KMB.²⁵

Jadi upaya penyelamatan bangsa dan negara dalam rumusan Mosi Integral Mohammad Natsir sangatlah jelas berdasarkan perpaduan bangsa dan negara dalam NKRI. Ianya dapat membawa akibat sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Penyelamatan bangsa tercerminkan dalam kewujudan mosi yang mengedepankan proses NKRI sementara penyelamatan negara wujud dalam

²⁵ <https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2019/03/31/162456/69-tahun-mosi-integral-mengenang-perjuangan-m-natsir.html>, diakses 4 Oktober 2019

proses peralihan status negara dari RIS ke NKRI

3.3.7. Strategi Perpaduan Ummat

Mosi Integral Mohammad Natsir juga dapat memposisikan dirinya menjadi salah satu strategi perpaduan ummat dalam wilayah NKRI.

Langgam.id – Ketua Fraksi Partai Masyumi Mohammad Natsir berbicara cukup panjang hari itu di parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS). Pidato yang kemudian diterima menjadi keputusan Parlemen RIS dan dikenal sebagai ‘Mosi Integral Natsir’

“...Berhubungan dengan ini, saya ingin memajukan satu mosi kepada pemerintah yang bunyinya demikian:

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Serikat dalam rapatnya tanggal 3 April 1950 menimbang sangat perlunya penyelesaian yang integral dan pragmatis terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang sangat cepat jalannya pada waktu akhir-akhir ini.

Memperhatikan: Suara-suara rakyat dari berbagai daerah, dan mosi-mosi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai saluran dari suara-suara rakyat itu, untuk melebur daerah-daerah buatan Belanda dan menggabungkannya ke dalam Republik Indonesia...”

Pidato mosi integral itu dikutip Yusril Ihza Mahendra

dalam tulisannya, 'Menyelamatkan NKRI; Berkaca pada Peran Sjafruddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir' yang termuat dalam Buku '100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah' (2008).

Mosi integral Natsir itu langsung diterima di hari yang sama, 3 April 1950 menjadi keputusan parlemen RIS dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah. Peristiwa itu tepat 69 tahun yang lalu dari hari ini, Rabu (3/4/2019).

Mohammad Mahfud MD dalam buku yang sama menyebutkan, selain oleh Natsir mosi tersebut juga ditandatangani beberapa ketua fraksi di parlemen. Mereka adalah Soebadio Sastrasatomo, Hamid Algadri, Sakirman, K. Werdojo, AM Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto B, Sahetapy Engel, Tjokronegoro, Moch. Tauchid dan Sirajuddin Abbas.

"Namun mosi ini lebih dikenal sebagai Mosi Integral Natsir tanpa pernah ada yang mempersoalkannya. Karena memang dimotori dan dikonsep oleh Natsir untuk kemudian dimintakan dukungan kepada fraksi-fraksi lain," tulis mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mosi integral Natsir hadir senada dengan semangat kebatinan yang dirasakan mayoritas Bangsa Indonesia pasca Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB memang berbuah pengakuan kedaulatan atas Indonesia dan

mengharuskan tentara Belanda keluar dari wilayah RI. Namun, bentuk negara menjadi serikat. Berbeda dengan yang dirancang dalam UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. RIS membuat wilayah Nusantara terbagi jadi tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom. Republik Indonesia hanya tinggal Yogyakarta dan Sumatra (kecuali Sumatra Timur dan Sumatra Selatan) dan menjadi negara bagian dari RIS.

Deliar Noer dalam Buku 'Partai Islam di Pentas Nasional (1945-1965)' menyebutkan, mayoritas bangsa Indonesia ketika itu menilai, bentuk federal adalah cermin keinginan Belanda. Hal itu ditambah kekisruhan di berbagai negara bagian tidak memberi gairah untuk mempertahankan bentuk negara serikat.

Deliar mencontohkan, percobaan kup oleh Kapten Westerling di Bandung dan Jakarta pada minggu terakhir Januari 1950. Kemudian pemberontakan Kolonel Andi Aziz dari bekas tentara Hindia Belanda KNIL di Makassar pada bulan April tahun itu juga,

"Sebaliknya, banyak orang mencari sebab kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara pada bentuk negara serikat itu. Perasaan seperti ini tercermin dalam sidang-sidang badan perwakilan rakyat, baik di pusat maupun di daerah," tulisnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Negara Sumatera Selatan memulai gerakan pembubaran negaranya tanggal 10 Februari 1950. Pada 7 Maret giliran Negara Pasundan membubarkan diri dengan bergabung ke Republik Indonesia (Yogyakarta). Lalu, disusul lagi oleh Negara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura.

“Proses pembubaran diri negara-negara bagian itu cepat sekali berjalan, sehingga pada akhir Maret 1950 hanya empat negara yang tertinggal: Republik Indonesia, Kalimantan Barat, Sumatera Timur, dan Indonesia Timur,” tulis Deliar Noer.

Mosi Integral Natsir hadir dalam suasana seperti itu. Namun bukan berarti jalan mudah. “Dua setengah bulan saya melaukan lobi, terutama dengan negara-negara bagian di luar Jawa,” kata Natsir sebagaimana ditulis M. Dzulfikriddin, dalam Buku ‘M. Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia’.

Di Parlemen, tulis Dzulfikriddin, Natsir juga harus melobi lintas fraksi. Sejak dari para pimpinan partai berbasis Islam, seperti Siradjuddin Abbas (Perti) dan Amelz (PSII), sampai I.J. Kasimo (Partai Katolik), A.M. Tambunan (Partai Kristen) dan Sukirman (PKI).

Hasilnya, semua berdiri di belakang mosi Natsir. Mahfud MD menyebutkan, ada dua hal yang menjadi konsen Natsir dalam mosi tersebut.

Pertama, kritik keras terhadap pemerintah yang bersikap defensif dan sepertinya membiarkan rakyat mencari penyelesaian sendiri atas masalah-masalah yang dihadapi tanpa bimbingan pemerintah. “Kedua, perlunya penyelesaian integral masalah-masala serius yang sedang menimpa bangsa Indonesia pada saat itu.”

Menurut Mahfud, sebenarnya dalam mosi tidak ada dorongan eksplisit untuk membentuk negara kesatuan. Meski begitu, tidak pula dapat dibantah bahwa mosi integral itu kemudian menjadi titik tolak untuk segera kembali ke negara kesatuan. “Semangat implisit di dalam mosi memang kembali ke negara kesatuan,” ujarnya.

Dan, tindak lanjut pemerintah sesudah mosi, memang menggunakan mosi tersebut untuk kembali ke negara kesatuan.

Perdana Menteri Mohammad Hatta membaca dengan baik semangat mosi. Bak pepatah Minang, “alun takilek, alah takalam” (cepat dan cermat membaca situasi), langkah-langkah pemerintahan RIS di bawah Perdana Menteri Mohammad Hatta menerjemahkan dengan baik mosi Natsir. Pemerintah kemudian menindaklanjuti dengan membentuk komite persiapan yang melibatkan wakil-wakil semua negara bagian. Pembicaraan antara Pemerintah RiS di bawah Perdana

Menteri Mohammad Hatta dan Pemerintah Republik Indonesia di bawah Presiden Mr. Assaat tanggal 19 Mei 1950 menghasilkan piagam. Salah satu isi piagam, sebagaimana dikutip Mahfud, dalam waktu yang singkat akan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diproklamasikan. Hasil akhirnya, Presiden Sukarno menyampaikan Naskah Piagam Pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sidang gabungan DPR dan Senat RIS pada 15 Agustus 1950.

Yang diperjuangkan Natsir, menurut Mahfud, lebih dari sekedar soal negara kesatuan atau federal. Tetapi lebih besar dari itu, yaitu, persatuan, untuk menyelamatkan Republik . (HM).²⁶

3.4. Faktor-faktor Ummat dan Bangsa Kurang Mengetahui tentang Mosi Integral Mohammad Nasir

Ada satu masalah besar terkait dengan eksistensi Mosi Integral Mohammad Natsir yaitu kurangnya pengetahuan ummat tentang sejarah lahirnya Mosi Integral Mohammad Natsir dan relevansi antara Mosi Integral Mohammad Natsir dengan keberadaan NKRI sekarang ini. Tidak banyak anak bangsa ini yang tahu,

²⁶ <https://langgam.id/memperingati-mosi-integral-natsir/> diakses pada tanggal 12 September 2019

mengerti, dan memahami keberadaan Mosi Integral Mohammad Natsir hari ini, akibatnya jasa besar Mohammad Natsir untuk NKRI berlalu begitu saja karena orang-orang tidak berkepentingan dengannya. Secara natural, Mohammad Natsir sebagai seorang negarawan, ulama, dan pemimpin bangsa yang layak dijadikan rujukan untuk bangsa ini mestilah diangkat nama baiknya atas kreasi jasa-jasanya yang berfaedah baik kepada negara maupun bangsa sampai hari ini. Tetapi semua itu seperti didiamkan saja hanya karena disangkutkan dengan pemberontakan Pemerintah Refolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang Mohammad Natsir pernah beberapa minggu berada di dalamnya.²⁷

Kurang pahamnya ummat terhadap peristiwa Mosi Integral Mohammad Natsir tidak dapat dipisahkan dari perilaku dua rezim yang pernah berkuasa di negara yang ikut diperjuangkan kemerdekaannya oleh Mohammad Natsir. Mereka itu adalah Soekarno dan Soeharto sebagai presiden pertama dan kedua NKRI yang dicetuskan oleh Mohammad Natsir, Mohammad Natsir pernah dipenjarakan oleh Soekarno dan partai yang dipimpinnya yakni Masyumi dipaksa bubar. Soeharto pernah mencekal Mohammad Natsir sehingga beliau tidak boleh keluar negeri walaupun untuk kepentingan

²⁷ Hasil Wawancara dengan Lukman Hakim, *Pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia*, Tanggal 21 Juli 2019.

pebgobatan. Ketika Universitas Kebangsaan Malaysia mau menganugerahkan Doktor Honoris Causa kepada Mohammad Natsir, Soeharto tidak mengizinkan beliau keluar Indonesia untuk mengambilnya di Malaysia.²⁸

Prilaku semacam itu menjadi faktor penghambat masyarakat negara ini mengenal lebih jauh tentang Mosi Integral Mohammad Natsir, padahal mosi tersebut telah membebaskan kungkungan Belanda terhadap Indonesia manakala Belanda ingin menguasai kembali negara ini dalam agresi keduanya tahun 1948 yang ketika kegagalan menemui penjajah mereka menjadikan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat dengan membentuk negara-negara bagian di bawah kekuasaan mereka. Lalu tampil Mohammad Natsir dengan konsep Mosi Integralnya mengajak anggota parlemen dari berbagai fraksi dan berbagai partai untuk menjadikan Indonesia sebagai NKRI kembali sebagaimana awal diproklamirkan dahulu dalam tahun 1945.

Menurut salah seorang informan, ada beberapa faktor kurangnya pengetahuan ummat tentang Mosi Integral Mohammad Natsir, yaitu:²⁹

1. Tidak dimasukkannya materi tentang Mosi Integral Mohammad Natsir dalam sejarah pendidikan

28 Hasil Wawancara dengan Abdul Wahid Alwi dan Muhammad Nur Kertapati, *Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia*, Tanggal 22 Juli 2019.

29 Hasil Wawancara dengan M. Siddik Kertapati, *Kepala Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia*, Tanggal 22 Juli 2019.

nasional. Pada setiap tingkatan sekolah di negeri ini, mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi ada mata pelajaran atau mata kuliah sejarah nasional. Materi yang disediakan pada mata pelajaran sejarah biasanya tentang sejarah sebelum kemerdekaan, sejarah berdirinya negara Republik Indonesia sampai kepada sejarah periodisasi perkembangan negara Indonesia. Pemberian materi-materi sejarah tersebut kepada anak didik bertujuan supaya mereka paham sejarah dan memiliki rasa cinta kepada negara ini. Pemerintah tidak memasukkan materi tentang sejarah Mosi Integral Mohammad Natsir ke dalam kurikulum mata pelajaran sejarah, padahal Mosi Integral Mohammad Natsir punya peran signifikan dalam sejarah berdirinya negara NKRI.

2. Minimnya buku-buku tentang Mosi Integral Mohammad Natsir. Dengan minimnya buku-buku tentang Mosi Integral Mohammad Natsir membuat masyarakat susah menemukan rujukan tentang sejarah dan peran Mosi Integral Mohammad Natsir, sehingga pengetahuan ummat dan masyarakat tentang Mosi Integral Mohammad Natsir tentu sangat rendah.
3. Kurangnya minat baca bangsa Indonesia tentang sejarah. Bagi sebagian orang membaca

sejarah adalah pekerjaan yang membosankan, hal ini boleh jadi karena orang tersebut belum memahami hakikat dari sebuah sejarah. Faktanya memang minat baca sejarah bangsa Indonesia masih rendah.

4. Lemahnya pendidikan sejarah bagi masyarakat. Masyarakat di luar pelajar sangat jarang mendapatkan edukasi khusus tentang sejarah, hal ini membuat rendahnya pengetahuan masyarakat atau ummat tentang sejarah khususnya sejarah Mosi Integral Mohammad Natsir
5. Masyarakat kurang peduli tentang sejarah. Ketidakpedulian masyarakat tentang sejarah membuat pengetahuannya tentang suatu sejarah kurang, bila hal ini tidak segera diatasi maka rasa cinta kepada negarapun akan berkurang.

Responden lain menambahkan bahwa faktor kurangnya pengetahuan ummat tentang Mosi Integral Mohammad Natsir karena ummat masih awam tentang politik Islam atau siyasah.³⁰ Sebagian ummat belum mendapat informasi yang utuh tentang konsepsi politik Islam, ummat hanya melihat praktik politik yang dipertontokan oleh politikus-politikus haus kekuasaan, politikus

³⁰ Hasil Wawancara dengan A.M Saifuddin, *Pembina Dewan Dakwah Islam Indonesia*, Tanggal 22 Juli 2019.

yang tidak berintegritas yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan, padahal Politik Islam tidak pernah mengajarkan hal demikian, politik Islam sangat mengedepankan etika dalam mencapai target perjuangan. Sebenarnya Mosi Integral Mohammad Natsir adalah salah satu contoh strategi dalam politik Islam.

3.5. Relevansi Mosi Integral Mohammad Nasir dengan Politik Ummat Islam

Ummat Islam punya peran besar dalam perjalanan dan pembentukan NKRI dan peran tokoh dan ummat Islam dalam perjalanan Indonesia. Tokoh Islam Mohammad Natsir adalah pencetus cikal bakal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Mosi Integralnya yang dibacakan di parlemen DPRS-RIS tahun 1950. Dalam perjalanan bangsa ini, terdapat peran besar ummat Islam. “Dengan tokohnya Moh Natsir, yang dikenal dengan mosi integralnya,”. Gagasan Natsir mengusulkan agar negara bagian RIS (Republik Indonesia Serikat) berubah menjadi Negara Kesatuan Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Mosi Integral Natsir.

Natsir menyatakan ketidaksetujuannya Irian Barat masuk ke RIS. Ia meninggalkan posisinya sebagai menteri penerangan dan berkonsentrasi di parlemen sebagai ketua

Fraksi Partai Masyumi. Natsir memanfaatkan momentum berkeliling ke daerah untuk meminta masukan ulama dan masyarakat tentang sistem negara yang ideal. Dari proses itu, Natsir kemudian merumuskan Mosi Integral.

“Jadi Natsir adalah pemimpin formal di Indonesia yang selalu melibatkan ulama dalam pengambilan keputusan. Dan pesannya adalah jangan pernah meninggalkan ulama, apalagi kalau ulama sudah berfatwa,” Integrasi yang ingin ditunjukkan saat ini, adalah membangun ‘rumah besar’ yang di dalamnya ada organisasi-organisasi besar, tapi satu dengan lainnya ada satu kesatuan keummatan. “Ini sebagaimana terjadi di Jakarta dulu. Bagaimana gerakan 212 mencampakkan gerakan-gerakan formal lain sebagai gerakan yang mengklaim sebagai gerakan formal yang bisa mengeliminir kekuatan-kekuatan yang lain,”³¹

Gerakan Mosi Integral Mohammad Natsir secara tidak langsung dapat menghubungkan perjuangan politik ummat Islam Indonesia manakala hasil dari mosi integral tersebut dapat merubah status negara Indonesia dari RIS ke NKRI. Kalau Indonesia masih dalam bentuk RIS maka perjuangan ummat Islam akan terkendala karena RIS milik dan dipimpin serta dikontrol oleh Belanda. Namun dalam negara NKRI perjuangan ummat Islam lebih memudahkan dan selesai.

³¹ Republika, Selasa 02 Apr 2019.

Keselesaian politik ummat Islam dalam NKRI nampak ketika partai-partai Islam dapat berkiprah dengan leluasa dan seksama dalam negara NKRI. Perjuangan menegakkan Mosi Integral Mohammad Natsir menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan politik ummat Islam waktu itu karena perjuangan ummat Islam di dalam sebuah negara miliknya sendiri dan lepas dari kontrol penjajah Belanda. Kesan itu dapat dirasakan sampai kehari ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada kemungkinan lain yang bakal terjadi seandainya RIS masih bertahan dan NKRI belum wujud kembali di luar kerja mosi integral. Umpamanya kemungkinan Indonesia menjadi milik Belanda memiliki peluang yang besar, atau kemungkinan minimlanya adalah Indonesia tetap menjadi boneka Belanda. Dari sini tergambarkan betapa besarnya hubungan antara Mosi Integral Mohammad Natsir dengan politik ummat Islam dari dahulu sampai kehari ini. Beruntunglah bangsa Indonesia karena memiliki sosok Mohammad Natsir walaupun Sukarno dan Soeharto sempat mencekalnya karena tersandung persoalan politik yang dapat mengancam kepemimpinan mereka berdua yang berpenampilan nasionalis-sekularis.

Menurut salah seorang responden, relevansi Mosi Integral Mohammad Natsir dengan politik ummat Islam

hari ini adalah adanya nilai perpaduan ummat.³²Adanya Mosi Integral Mohammad Natsir membuat nilai persatuan ummat semakin meningkat, ummat Islam dapat berjuang secara bersama-sama dalam penerapan nilai-nilai keIslaman dalam negara NKRI bahkan ummat Islam berhasil memperjuangkan beberapa hukum Islam menjadi hukum positif di negeri ini.

Hal senada ditambahkan oleh responden lainnya, menurutnya Mosi Integral Mohammad Natsir sangat berpengaruh terhadap perpaduan ummat.

Para informan juga menambahkan bahwa dengan adanya Mosi Integral Mohammad Natsir telah melahirkan kekompakan ummat dan mempererat ukhwah Islmiyah.³³

32 Hasil Wawancara dengan M. Siddik Kertapati, *Kepala Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia*, Tanggal 22 Juli 2019.

33 Hasil Wawancara dengan A.M Saifuddin, *Pembina Dewan Dakwah Islam Indonesia*, Tanggal 22 Juli 2019.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Mosi Integral Mohammad Natsir adalah satu ide besar Mohammad Natsir yang merupakan ketua Partai Masyumi dalam upaya mengajak sejumlah ketua fraksi dalam parlemen Indonesia tahun 1950 untuk meninggalkan bentuk negara serikat (RIS) ciptaan Belanda dan menuju kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan hasil proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Upaya Mohammad Natsir tersebut

disetujui oleh parlemen sehingga misi penjajah Belanda untuk terus berkuasa di Indonesia menjadi menjadi gagal. Pada tanggal 3 April 1950 Mohammad Natsir membacakan Mosi Integralnya di parlemen seraya mengajak bangsa Indonesia untuk meninggalkan RIS dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pidato Mohammad natsir di parlemen tersebut mendapat sambutan baik dari parlemen dengan menyetujuinya secara langsung dan mendapat dukungan penuh dari eksekutif dan legislatif. Itulah puncak wujudnya Mosi Integral Mohammad Natsir yang diperbincangkan banyak orang sampai hari ini.

2. Mosi Integral yang digagas oleh Mohammad Natsir mempunyai beberapa tujuan, yang pertama tujuan kebangsaan yaitu untuk memperkokoh dan meningkatkan kualitas perpaduan dan kesatuan bangsa. Kedua adalah tujuan kenegaraan yaitu untuk berdirinya kembali dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang ketiga adalah tujuan keagamaan yaitu untuk penguatan dan peningkatan kualitas persatuan dan kesatuan ummat Islam Indonesia. Sedangkan target mosi integral Mohammad Natsir adalah Meyakinkan negara-negara bagian RIS untuk

kembali ke NKRI dan meyakinkan sejumlah fraksi di parlemen untuk menandatangani mosi tersebut sehingga dengan ditandatanganinya mosi integral tersebut dapat melegalkan berdirinya kembali NKRI sebagaimana yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

3. Kurangnya pengetahuan Bangsa Indonesia tentang mosi integral Mohammad Natsir karena Pemerintah Indonesia mengaitkan sosok Mohammad Natsir dengan pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) Faktor berikutnya adalah Tidak dimasukkannya materi Mosi Integral Mohammad Natsir dalam pelajaran sejarah nasional, Minimnya buku-buku tentang Mosi Integral Mohammad Natsir, kurangnya minat baca ummat dan bangsa tentang sejarah khususnya sejarah Mosi Integral Mohammad Natsir, Lemahnya pendidikan sejarah bagi masyarakat dan masyarakat tidak peduli terhadap sejarah khususnya sejarah Mosi Integral Mohammad Natsir.

4.2. SARAN-SARAN

1. Hendaknya pemerintah memasukkan materi tentang sejarah Mosi Integral Mohammad Natsir

secara utuh dalam kurikulum sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

2. Hendaknya para intelektual memperbanyak penelitian, penulisan jurnal dan buku yang berkaitan dengan Mosi Integral Mohammad Natsir.
3. Hendaknya pemerintah mengajak masyarakat untuk membaca dan memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya sejarah Mosi Integral Mohammad Natsir.

4.3. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Badjuber, *Dakwah Ilallah M. Natsir, Interpretasi untuk Langkah Dakwah Masa Kini*. Jakarta: STID Mohammad Natsir, tt.

Amikavathi Periasamy, *Integration as a Form of Curriculum Reform: The Teaching of Environmental Education in KBSM Geography in a Malaysian Context*, Doctoral Thesis in University of Queensland, 2000.

Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, jilid dua, cetakan ketiga, Bandung: Surya Dinasti, 1439/2018.

Ahmad Suhelmi, *Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, Jakarta: Darul Falah, 1999,

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Tiga Undang-undang Dasar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Djuyoto Subtani, *Tahun 2015 Indonesia Pecah*, Jakarta: Pustaka Perdamiaian, 2007.

Deliar Noer, *Gerakan Modern 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1990.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, cet.4, 1989.

Gamal Abdul Nasir Zakaria, *Muhammad Natsir Pendidik Ummah*, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003.

George Mc Turnan Kahin dkk, *Sjafruddin Prawiranegara Penyelamat Republik*, Jakarta: Yayasan Asrama dan Pendidikan Islam bekerjasama dengan Panitia Peringatan Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911-2011), 2011.

George Kahin, Mohammad Natsir (1908-1993): sebuah kenangan, dalam Anwar Haryono dkk, *M. Natsir Sumbangan dan Pemikiran untuk Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah, 1999.

<https://kbbi.web.id/mosi> Diakses pada tanggal 3 September 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Integral> Diakses pada tanggal 3 September 2019.

<https://langgam.id/memperingati-mosi-integral-natsir/> Diakses pada tanggal 11 September 2019

69 Tahun Mosi Integral: Mengenang Perjuangan M Natsir. <https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2019/03/31/162456/69-tahun-mosi-integral-mengenang-perjuangan-m-natsir.html> Diakses pada tanggal 11 September 2019

Zainal C Airlangga, Mosi Integral 1950, Upaya Natsir Selamatkan NKRI <https://nusantara.news/mosi-integral-1950-upaya-natsir-selamatkan-nkri/> Diakses pada tanggal 11 September 2019

Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh, Ulama, Pemimpin, dan tokoh Pembaharuan*, Bangi, Malaysia: UKM, 2005.

Lukman Hakiem, M. Natsir di panggung sejarah republik, Jakarta: Republika.

Mohd. Mahfud MD, *Mosi Integral Natsir dan sistem Ketatanegaraan Kita*, dalam 100 Tahun Mohammad Natsir berdamai dengan sejarah, Jakarta: Republika, 2008.

- M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah, Edisi revisi, 2001.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mr. S. M. Amin, *Indonesia di bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Muhammad Natsir *Berdakwah di Jalur Politik, Berpolitik di Jalur Dakwah*, Selangor: Wadah, 2009.
- Mohamad Roem, *Peralihan ke Negara Kesatuan*, Jakarta: Media Dakwah, 1993.
- Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Penerbit Media Dakwah, Universitas Mohammad Natsir, 1421 H/2000M.
- Mohammad Natsir, “Politik Melalui Jalur Dakwah”, dalam *Memoar Senarai Kiprah Sejarah*, Jakarta: Grafiti Press, 1993
- Mohammad Natsir *70 tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1398 H/1978 M.
- Mohammad Ali Nawawi, *Konsepsi Islam Politik Mohammad Natsir*, Skripsi Program Studi Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Syarif

- Hidayatullah, Jakarta: 1436 H/2015 M.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Murjoko, *Mosi Integral Natsir 1950*, Thesis Master Sains di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, Jakarta: Juli 2004.
- M. Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia*, Bandung: Mizan, 2010.
- Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Grafiti, 1990.
- O. E. Engelen dkk, *Lahirnya Satu Bangsa dan Negara*, Jakarta: UI Press, 1997.
- Paul D. Leedy, *Practical Research, Planning and Design*, Sixth Edition, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1997.
- Paul van't Veer, *De Atjeh Oorlog*, Amsterdam: NV. Uitgeverij DeAbeiderspers, terjemahan Abubakar dengan judul: Perang Belanda di Aceh, 1969.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- S.S. Djuangga Batubara, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh Mujahid Teragung di Nusantara*, Medan: GPPRIFSM, 1987.

Sinar Darussalam Majalah Pengetahuan dan Kebudayaan,
Y.P.S.D. Unsyiah – IAIN Ar Raniry Banda Aceh,
No. 174/175.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:
Universitas Indonesia-pres, 2014.

Thohir Luth, M. Natsir, *Dakwah dan Pemikirannya*,
Jakarta:Gema Insani Press, 1999.

Waluyo, *Dari Pemberontak menjadi Pahlawan Nasional*,
Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia,
Yogyakarta: Ombak, 2009

Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Fundamentalisme*
dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi
(Indonesia) dan Partai Jamaat Islami (Pakistan),
Jakarta: Paramadina, 1999,

Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU. RI. No. 11
Tahun 2006), Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

4.3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

4.4.1. HASANUDDIN YUSUF ADAN,



Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, lahir di Meunasah Jumphoh, Kemukiman Adan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Aceh / 19 Juli 1962. Sa’at ini menjadi dosen Fiqh Siyasah pada Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Alamat tinggal sementara ini di Jln. Sawah nomor 9 Gampong Ilie Kecamatan Uleekareng, Kota Banda Aceh. Aceh-Sumatera. Phone: +6285260185571 (WA) e-mail: diadanna@yahoo.com/hya@ar-raniry.ac.id/hasanyusufna@gmail.com

Pendidikan yang ditempuhnya adalah: Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kembang Tanjung, tamat 1974, Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN) Kembang Tanjung, tamat 1977, Dayah Po teumeureuhôm Pu-uek Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Aceh, tahun 1974-1979, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun Beureunuen, tamat 1979, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Beureunuen, tamat 1981, Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tamat 1985, Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Jami'ah Ar-Raniry Banda Aceh, tamat 1987, Program Pendidikan Diploma Kependidikan (PPDK) Unsyiah Banda Aceh, tidak tamat, Master of Comparative Laws (MCL), Kulliyah of Laws, International Islamic University Malaysia (IIUM), tamat 1998, Master of Art (MA) Jabatan Siasah Syar'iiyyah, Fakulti Syari'ah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur tammat tahun 2000, Program Doctor Falsafah pada Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah (UMS) Kota Kinabalu Malaysia tamat 2014.

Dalam bidang organisasi beliau aktif di sejumlah organisasi intra dan ekstra sekolah/kampus seperti: Sekretaris Umum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MTsAIN Kembang Tanjung, tahun 1977-1978, Ketua Umum OSIS MAN Beureunuen, tahun 1980-1981, Ketua Umum Senat Mahasiswa Program Pendidikan Diploma

Kependidikan (PPDK) Unsyiah, tahun 1982-1985, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1985-1986, Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008-2012.

Ketua Umum Pengurus Rayon Pelajar Islam Indonesia (PII) Kemukiman Adan, tahun 1977-1980, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat PII Kecamatan Mutiara, tahun 1980-1981, Ketua Umum Pengurus Komisariat PII Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1982-1984, Sekretaris satu Pengurus Daerah PII Perguruan Tinggi, tahun 1984-1986, Ketua Umum Pengurus Wilayah PII Daerah Istimewa Aceh, tahun 1986-1988, Departemen Hubungan Antar Organisasi Pengurus Besar PII, tahun 1986-1989, Ketua Asrama Mutiara Banda Aceh, tahun 1984-1985, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar dan Masyarakat (IMPM) Mutiara cabang Banda Aceh, tahun 1986-1990, Ketua Yayasan Kesejahteraan Pelajar Islam Daerah Istimewa Aceh (YAKPIDA), tahun 1988, Wakil Sekretaris Umum Majelis Presidium Pemuda dan Mahasiswa Aceh (MPMA) Jakarta, tahun 1988-1992, Ketua Umum Tanoh Rincong Students Association (TARSA) Malaysia, tahun 1992-1995, Presiden of Human Rights Forum for Acehnese Students and Society/Forum Mahasiswa dan Masyarakat Aceh untuk Hak Azasi Manusia (FORMAHAM) Malaysia, tahun 1998-2000,

Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2000-2003, Wakil Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2001-2003, Ketua Umum 'Adnin Foundation Aceh tahun 2001-2011, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2007-2011, 2012-2015, & 2016-2020

Pengalaman Kerja: Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Adi Darna Banda Aceh, tahun 1987, Mengajar pada Fakultas Teknik Unsyiah Banda Aceh, tahun 1988, Mengajar pada Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh, tahun 1988, Mengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1988-1991, Mengajar pada Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Makkah tahun 2000-2004, Mengajar pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh 2009-2011, Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun sejak 2002 – sekarang. Settlement and Water Supply Senior Team Leader in Oxfam Aceh Besar 2005-2006, Consultant of Conflict and Development, World Bank Banda Aceh sejak 7 September 2006 – 30 Juni 2007, Local Governance Specialist of Canada/Aceh Local Government Assistance Program (CALGAP), 6 Oktober – 31 Desember 2008.

Buku-buku yang sudah ditulis adalah: *Tamaddun*

dan Sejarah, Etnografi Kekerasan di Aceh, Jogjakarta: PrismaSophie, 2003, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh, Ulama, Pemimpin dan Tokoh Pembaharuan*, Bangi Malaysia: UKM, 2005, *Sejarah Aceh Dan Tsunami*, Jogjakarta: Arruz Media, 2005, *Elemen-elemen Politik Islam*, Jogjakarta: AK. Group & Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006, *Politik dan Tamaddun Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, Banda Aceh: 2006, *'Aqidah Modal Utama Implementasi Syari'ah*, Yogyakarta: AK. Group & Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006, *UUPA Dan Kemungkinan Perubahan Pemerintahan Serta Sistem Politik Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Aceh & Ar-Raniry Press, Yogyakarta: AK. Groub, 2007, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2007, *Syari'at Islam Di Aceh antara Implementasi dan Diskriminasi*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2008, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh & Pena, 2009, *Khuthbah Jum'at dan dua Hari Raya*, Kajian ilmiah tentang isue-isue semasa, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2009, *Aceh dan Inisiatif NKRI*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation publisher, 2011, *Eksistensi Kader PII Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2012, *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013, *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin

Foundation Publisher, 2016, Andil Pusa untuk Bangsa dan Negara, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2017, Siyasah dan Jinayah dalam bingkai Syari'ah, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher 2018.

Selain itu beliau aktif menulis di sejumlah jurnal, majalah, koran, tabloid, web site, dan juga buku-buku penulisan bersama. Beliau juga sering tampil sebagai pemateri/pemakalah dalam berbagai even seminar/lokakarya baik di dalam maupun luar negeri. Sejumlah penelitian juga telah diselesaikan dalam ranah akademik, beliau juga berpengalaman mengelola media baik sebagai editor maupun kolumnis. Ceramah, Dialog Interaktif dan Talk Show di Media Elektronik seperti radio dan televisi. Sebagai aktivis beliau banyak melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang dakwah, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembinaan ummah.

4.4.2. HUSNI A. DJALIL



Husni A. Jalil, MA adalah dosen dan Sekretaris Prodi pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyelesaikan S1 pada Fakultas Syari'ah Jurusan Syari'ah Ahwal Syakhsiyyah (SAS) IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

(2001-2004) dan S2 di Jurusan Syari'ah Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia. Di samping mengajar, penulis juga aktif di ormas Pelajar Islam Indonesia (PII), Dewan Dakwah Aceh dan LSM Pattiro Aceh. Penulis juga sudah melakukan beberapa penelitian yaitu Pendokumentasian Harta Wakaf di Aceh (Studi terhadap Praktek dan Gagasan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Mengenai Optimalisasi Pendokumentasiannya, Keragaman Pengamalan Mazhab Fikih dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Islam (Studi Perspektif Ulama Aceh) dan Mosi Integral Mohamamad Natsir; Upaya Perpaduan Ummat dan Bangsa dalam NKRI.